

# WOMEN'S COLLECTIVE ACTION FOR EMPOWERMENT IN INDONESIA



**A study of collective action initiated by  
partners of the MAMPU program**

Penelitian ini dilaksanakan dengan kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, namun analisis dan temuan di dalam laporan ini hanya mencerminkan pandangan para penulis, dan tidak mewakili pandangan kedua pemerintah.

**MAMPU**

Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Setiabudi Atrium, 3rd Floor, Suite 306  
Jl. JI HR Rasuna Said, Kav 62, Jakarta  
12950 INDONESIA  
T: +62 21 521 315  
F: +62 21 521 0339  
E: [info@mampu.or.id](mailto:info@mampu.or.id)  
W: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id)

# Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia

Sebuah studi tentang aksi kolektif yang  
diinisiasi  
oleh para mitra Program MAMPU

Oleh Migunani

**MAMPU**

Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan  
Pemberdayaan Perempuan

2017

## TIM PENELITIAN

### Penulis

Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho, Bakti Andari, Joeni Hartanto, Retno Agustin, Any Sundari

### Peneliti Utama

Lies Marcoes  
Bakti Andari  
Joeni Hartanto  
Retno Agustin  
Any Sundari  
Novina Suprobo

### Anggota Tim Peneliti Lapangan

Kharisma Prasetya	Nevi Kurnia	Sudarman
Seto Rohmatullah	Ramses Marbun	Clara Yuli Pratiwi
Enggar Harjanti	Agus Dwi Witanto	C Nadya Ari
Maria Immaculata Ita Rosita	Artantya Krispradipta	Cundoko
Setyawan J Kridanta	Agnes Novita Andy Prastiwi	Heri Sambodo
Elianju Sihombing	Sutikno Sutantio	Wahyu Triazmono

### Kutipan:

Migunani (2017) *Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia: Sebuah studi tentang aksi kolektif yang diinisiasi oleh para mitra Program MAMPU Yogyakarta*: Migunani dan MAMPU



# Ringkasan Eksekutif

## Latar belakang penelitian

Penelitian ini dilaksanakan atas arahan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Program MAMPU) untuk lebih memahami **bagaimana dan dalam kondisi seperti apa keterlibatan perempuan dalam kelompok-kelompok lokal yang diinisiasi oleh para mitra MAMPU menghasilkan pemberdayaan individu dan kolektif yang positif**. Penelitian ini muncul dari kesadaran adanya peningkatan skala kelompok lokal dan berbagai bentuk aksi kolektif lainnya yang terkait dengan jaringan MAMPU. Penelitian ini dilaksanakan untuk menanggapi rekomendasi dari kajian jangka menengah MAMPU, yaitu untuk mempertimbangkan hal-hal kritis dari kelompok perempuan, serta menelusuri faktor-faktor yang dapat membantu terciptanya kelompok-kelompok 'berkualitas'.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah menciptakan pengetahuan baru yang selaras dengan tujuan MAMPU. Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwasanya kapasitas inti dan kesiapan untuk melakukan aksi kolektif merupakan batu loncatan untuk mengangkat suara dan pengaruh yang kemudian dapat membawa perubahan jangka panjang pada akses perempuan miskin di Indonesia kepada layanan dan program pemerintah serta pencaharian mereka. Sesuai arahan MAMPU, penelitian ini berfokus pada tingkat desa atau masyarakat sebagai lokus kegiatan serta untuk melihat perubahan yang diharapkan.

Dalam konteks penelitian ini, kami mendefinisikan **aksi kolektif perempuan** sebagai pembentukan formal atau informal dan kegiatan kelompok atau jaringan yang terutama terdiri dari perempuan yang bertujuan menciptakan perubahan positif pada kehidupan perempuan. Aksi kolektif dimaknai sebagai proses bekerja untuk mempengaruhi perubahan, yang dengannya lembaga sukarela dibentuk dan dijalankan, serta kelompok-kelompok yang secara sadar bertindak bersama-sama. Untuk penelitian ini, **pemberdayaan** diartikan sebagai perubahan positif yang terkait dengan lima jenis aset yang diidentifikasi di dalam kerangka pemberdayaan MAMPU sebagaimana diperlihatkan di bawah ini.

### Lima aset kerangka pemberdayaan MAMPU



Penelitian ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap (*phased mixed-methods design*) yang berfokus pada studi kualitatif. Fase pertama mencakup kajian dokumen, pemetaan awal, dan wawancara staf mitra nasional. Tahap selanjutnya adalah survei atas para fasilitator aksi kolektif. Kemudian dilakukan penelitian lapangan di delapan lokasi, yang melibatkan wawancara perorangan dan kelompok, serta survei yang dilakukan kepada para anggota aksi kolektif. Secara keseluruhan sejumlah 219 perempuan dan 78 laki-laki berpartisipasi dalam wawancara individu atau kelompok, dan sebanyak 169 anggota dari berbagai aksi kolektif perempuan menjadi sasaran survei.

## Contoh aksi kolektif yang diteliti

Penelitian ini mengidentifikasi delapan contoh aksi kolektif yang masing-masing terkait dengan mitra nasional MAMPU sebagai berikut:

Contoh aksi kolektif perempuan	Lokasi penelitian lapangan	Terkait dengan (mitra nasional MAMPU)
Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA)	Kabupaten Pangkajene Kepulauan (PanKep), Sulawesi Selatan (pedesaan)	'Aisyiyah
Posko	Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (pedesaan)	Komnas Perempuan Forum Pengadaan Layanan - Dewan Pengarah Nasional, dengan sub-mitra Swara Parangpuan
Sekolah Perempuan	Kabupaten Gresik, Jawa Timur (pedesaan)	Kapal Perempuan dengan sub-mitra <i>Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan</i> (KPS2K)
Balai Perempuan	Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan (perkotaan)	<i>Koalisi Perempuan Indonesia</i> (KPI)
Migrant Workers United Wonosobo (MUIWO)	Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (pedesaan)	Migrant CARE dengan sub-mitra Social Analysis Research Institute (SARI)
<i>Serikat PEKKA</i>	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (pedesaan)	PEKKA
Community Center	Kabupaten Merangin, Jambi (pedesaan)	Permampu, melalui Aliansi Perempuan Merangin (APM)
Kelompok Kreatif Bunda	Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta (peri-urban)	Yasanti, melalui Program Perempuan Pekerja Rumahan (PPR)

**Ciri utama dari setiap contoh aksi kolektif dipengaruhi oleh sifat hubungan antara kelompok lokal dengan nasional.** Sebagaimana diduga, hal ini turut mempengaruhi fokus kegiatan kelompok maupun keanggotaan, identitas kelompok, model keterlibatan, serta struktur pendukung atau fasilitasi.

Kami mengidentifikasi tiga jenis hubungan utama antara mitra nasional MAMPU dengan aksi kolektif perempuan di tingkat lokal. Dalam banyak hal terjadi pembauran karakteristik, namun secara umum kita dapat membedakan antara:

- **Tipe A - struktur vertikal multi-tingkat:** Mitra nasional berhubungan dengan kelompok lokal melalui perwakilan provinsi, kabupaten atau kecamatan. Identitas kelompok lokal mencerminkan identitas mitra nasional dan memiliki bentuk yang serupa disetiap lokasi.

- **Tipe B - pelibatan sub-mitra:** Mitra nasional membentuk kemitraan dengan masyarakat sipil diberbagai tingkatan yang bekerja di isu yang sama. Para sub-mitra ini kemudian membentuk atau mendukung kelompok-kelompok aksi kolektif atau kegiatan yang terkait dengan isu bersama. Identitas kelompok lebih bersifat individu, sementara peran sub-mitra lebih dominan.
- **Tipe C - kegiatan multi-pemangku kepentingan:** Hal ini dikatalisasi oleh mitra nasional di berbagai tingkatan, dan kegiatan multi-pemangku kepentingan ini adalah aksi kolektif, sementara anggotanya adalah organisasi (bukan perorangan).

## METODE PEMBENTUKAN

Sebagian besar contoh aksi kolektif perempuan yang diteliti sudah ada sebelum para mitra nasional bergabung dengan MAMPU. **Pelibatan dengan MAMPU telah mendukung perluasan dan pengembangan aksi kolektif perempuan di tingkat lokal melalui tiga mekanisme utama:** (i) perluasan model eksisting ke wilayah geografis baru; (ii) pembentukan kelompok baru dan cara baru bagi para mitra nasional untuk berhubungan dengan akar rumput; dan (iii) menyegarkan dan menyusun kembali hubungan yang sudah ada menjadi tindakan nyata yang berfokus pada kesetaraan gender atau pemberdayaan perempuan.

Para mitra nasional dengan sebuah struktur vertikal multi-tingkatan (Tipe A) telah membentuk proses untuk mengembangkan kelompok baru dan mencari anggota baru. Para anggota dapat berasal dari golongan khusus (*specific catchment*), atau diundang untuk bergabung melalui perekrutan. Para mitra ini memiliki strategi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perempuan di kelompok lokal, termasuk melalui program pengembangan kapasitas berbasis kurikulum bertahap dan bervariasi. Dalam hal pelibatan sub-mitra atau jaringan (Tipe B dan C), peran sub-mitra lebih dominan dibandingkan peran mitra nasional, dan disetiap kasus, terdapat perhatian khusus untuk mengintegrasikan kesadaran akan hak dan advokasi ke dalam pembentukan kelompok dan pendidikan bagi anggota.

## ANGGOTA KELOMPOK

Mayoritas anggota aksi kolektif didorong oleh keinginan untuk meningkatkan interaksi sosial atau meningkatkan keterampilan dan kapasitas diri mereka. **Terdapat kombinasi pendekatan dalam hal pelibatan kelompok miskin.** Kami menemukan bahwa:

- Para mitra nasional sengaja menasar kelompok yang mengalami kemiskinan ekonomi untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif (PEKKA/Serikat PEKKA dan 'Aisyiyah/Balai Sakinah 'Aisyiyah);
- Upaya yang ada difokuskan pada kelompok kepentingan yang mungkin termarginalkan secara sosial dan politik, namun tidak selalu yang termiskin secara ekonomi (Kelompok Kreatif Bunda, MUIWO);
- Mencampurkan para perempuan dari berbagai latar belakang (Sekolah Perempuan, Community Center);
- Pelibatan yang lebih <sup>1</sup>'elit' yang dapat bermanfaat bagi kelompok miskin sebagai pengguna layanan atau melalui perubahan sosial yang lebih luas (Balai Perempuan, Posko).

Penelitian ini menunjukkan bahwa bagi kelompok miskin, motivasi untuk berpartisipasi - dan persetujuan keluarga untuk terlibat dalam kegiatan - didorong oleh **potensi manfaat ekonomi dari**

<sup>1</sup> Untuk konteks laporan ini, kami mendefinisikan 'elit' sebagai memiliki pengaruh besar, koneksi pribadi kepada pengambil keputusan, atau secara relatif dianggap cukup kaya. Istilah-istilah ini sama sekali tidak dikaitkan dengan konotasi negatif.



**keterampilan baru serta potensi membangun usaha bersama kelompok.** Perempuan pertama-tama harus memiliki pendapatan agar dapat menerima suatu ideologi.

Jika anggota kelompok berasal dari kalangan elit masyarakat, mereka cenderung lebih terlibat aktif secara politik sebagai individu maupun jaringan kelompok. Dengan demikian, fokus aksi kolektif menjadi berorientasi keluar. Penelitian ini menunjukkan bahwa **melibatkan para elit dan perempuan berpengaruh yang berorientasi pembangunan kedalam aksi kolektif, khususnya pada isu-isu yang sensitif merupakan strategi yang efektif untuk membawa perubahan.** Namun penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan peluang yang tepat serta program pengembangan yang terstruktur, **perempuan dari kelompok paling marginal pun dapat menjadi pendorong perubahan yang kuat dan berpengaruh.**

## MODUS OPERASI

Aksi kolektif terkait para mitra MAMPU hampir selalu beroperasi di dalam suatu struktur kelompok formal. Seluruh contoh yang ditemukan menunjukkan bahwa mayoritas menerapkan pendekatan kolaboratif. Namun, tentu saja terdapat spektrum yang luas dari pendekatan yang dilakukan, dari bekerja erat dengan bidang keagamaan dan budaya (seperti Balai Sakinah 'Aisyiyah) hingga pendekatan yang lebih berorientasi kepemimpinan feminis atau hak asasi manusia perempuan (Balai Perempuan dan lainnya).

Pada seluruh kasus tersebut, **dimensi advokasi atau mempengaruhi kebijakan terlokalisasi.** Artinya, ia berfokus pada desa, atau maksimal pada kebijakan daerah (kabupaten). Penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan yang jelas antara kebijakan nasional atau gerakan perempuan nasional diluar hubungan langsung dengan mitra nasional, kecuali pada kelompok-kelompok yang berpartisipasi dalam 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan.

Mekanisme utama untuk mempengaruhi kebijakan adalah: (i) melalui jaringan dan hubungan yang dibangun oleh para anggota aksi kolektif; dan (ii) melalui perantara (*intermediary*). Kami mendefinisikan perantara sebagai entitas yang secara langsung mendukung aksi kolektif lokal, serta beroperasi diantara kelompok dan proses lokal dan mitra nasional. Para perantara dapat berupa individu, organisasi masyarakat sipil (CSO) pendukung, atau satu tingkat lebih tinggi dalam struktur vertikal. Salah satu temuan kunci dari penelitian ini adalah bahwa **peran perantara ternyata sangat penting.** Hal ini karena mereka menginisiasi, memotivasi, melatih, mendukung, serta mendorong aksi kolektif lokal, serta menciptakan hubungan dengan kebijakan maupun area pengaruh lainnya. Seringkali peran perantara tidak dapat dipisahkan dari aksi kelompok.

Kami menemukan adanya hubungan antara strategi perekrutan dan sasaran aksi kolektif yang terkait dengan para mitra MAMPU, serta aksi kolektif yang telah lama ada maupun aksi kolektif yang mewujud dalam bentuk lainnya. Misalnya, Balai Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia sengaja merekrut banyak anggota dari kalangan perempuan dari berbagai peran dan koneksi, seperti dari staf kantor desa, Posyandu, keluarga berencana, atau kader CSO, serta calon anggota DPRD. Seluruh format aksi kolektif yang diteliti memiliki hubungan dengan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Paling minimal, hal ini dibatasi oleh kepentingan bersama dalam hal kesehatan reproduksi perempuan yang dijalankan oleh Posyandu, hingga keanggotaan lintas latar belakang serta kepemimpinan bersama. Namun belum ditemukan contoh yang signifikan adanya aksi kolektif perempuan yang didukung MAMPU yang bekerja sama dengan PKK untuk membawa perubahan dalam kesetaraan gender.

Memang terdapat pengalaman baik di kalangan mitra nasional MAMPU ketika melaksanakan **berbagai pendekatan pembangunan kapasitas untuk para anggota aksi kolektif tersebut.** Pendekatan terstruktur dari PEKKA, KPI, Kapal Perempuan, dan Yasanti tampak berpengaruh pada perubahan rasa percaya diri dan keyakinan diri perempuan yang kemudian juga meningkatkan aset pemberdayaan mereka.

## Dampak pada aset individu dan kolektif

Secara umum, para anggota aksi kolektif merasa bahwa terdapat banyak sekali dampak positif partisipasi mereka dalam aksi kolektif. Secara singkat, dengan merujuk pada aset-aset yang dijelaskan di dalam kerangka pemberdayaan MAMPU, perubahan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- **Aset individu** atau **manusia** mencakup perubahan kesehatan dan pendidikan pribadi, keterampilan dan pengetahuan, termasuk literasi, numerasi, pendapatan dan keterampilan untuk bekerja, serta rasa keyakinan diri dan percaya diri ditingkat individu. Hampir seluruh anggota aksi kolektif dari seluruh contoh yang diteliti melaporkan adanya perubahan dalam ranah pemberdayaan ini. Percaya diri yang didapatkan merupakan langkah awal yang penting bagi perempuan, khususnya yang berasal dari elemen masyarakat yang sangat marjinal. Program-program pembangunan kapasitas terstruktur yang dijalankan oleh beberapa mitra tampak berhasil mempercepat dan menjaga berjalannya perkembangan ini.
- **Aset keuangan dan sumber daya** mencakup pendapatan dan tabungan, kemampuan untuk meminjam, mengakses pasar, meningkatkan masukan produktif, termasuk peralatan dan perlengkapan. Namun tidak banyak mitra MAMPU yang berinvestasi dalam bidang ini, yang tercermin dari relatif sedikitnya para anggota aksi kolektif yang melaporkan adanya perubahan di area ini. Terdapat bukti dalam pemberdayaan kolektif bahwa para anggota dapat terbantu dengan dana bersama, yaitu melalui kegiatan simpan pinjam. Tetapi masih belum jelas apakah hal itu mencerminkan adanya perubahan pendapatan yang berkelanjutan.
- **Aset kapasitas** (*agency*) mencakup partisipasi dan pengaruh perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta akses yang lebih baik bagi perempuan pada pekerjaan, layanan, serta program-program pemerintah. Dari seluruh bentuk aksi kolektif yang diteliti, terdapat beberapa contoh perubahan yang berhasil terkait dengan ranah pemberdayaan ini, khususnya partisipasi perempuan dalam hal diskusi di masyarakat desa serta forum-forum pengambilan keputusan, termasuk didalam pertemuan perencanaan pembangunan (Musrenbang).
- **Aset sosial** mencakup teman, saudara, dan jaringan sosial, inspirasi dari orang lain maupun membantu orang lain, serta akses kepada orang-orang berpengaruh. Keinginan untuk meningkatkan interaksi sosial selalu menjadi pendorong utama bagi perempuan untuk bergabung dan berpartisipasi dalam aksi kolektif. Pengalaman interaksi kelompok juga merupakan aspek penting dari contoh-contoh aksi kolektif yang diteliti, sekaligus merupakan faktor yang membangun percaya diri pada perempuan.
- **Aset pendukung** mencakup akses kepada dokumen administratif atau hukum, perlindungan hukum, dan seterusnya. Namun proporsi anggota aksi kolektif yang melaporkan perubahan didalam ranah pemberdayaan ini justru adalah yang terkecil. Beberapa contoh aksi kolektif, khususnya MUIWO dan Kelompok Kreatif Bunda, ditandai dengan adanya fokus pada aset pendukung, seperti status hukum, akses kepada informasi, serta perlindungan hak tenaga kerja. Sementara mitra lainnya menyentuh isu keamanan dan kebebasan individu dari kekerasan, serta akses kepada layanan. Sebagian besar contoh menunjukkan adanya kesadaran bahwa lingkungan kebijakan yang mendukung, keamanan dan kebebasan pribadi dari kekerasan, serta akses kepada layanan, dapat memperluas jangkauan aksi kolektif perempuan dari yang semula berupa kelompok kecil yang berfokus internal (pada anggotanya), menjadi berorientasi ke luar (ke masyarakat luas).

Namun terkadang **sulit membedakan antara pemberdayaan individu dan kolektif**. Di sejumlah area, seperti kelompok simpan pinjam, dimensi kolektif ini terlihat jelas; sementara di kelompok lain, manfaat lebih menonjol pada tingkat individu. Selain itu tampak bahwa status sebagai kelompok mendorong isu-isu yang diperjuangkan lebih muncul ke permukaan, serta membuka peluang untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan di tingkat desa, seperti melalui Musrenbang, meskipun hanya satu atau dua individu yang benar-benar terberdayakan yang mampu bicara mewakili kelompok.

Dalam hal arah pemberdayaan, **pengembangan aset manusia, khususnya pemberdayaan, keyakinan diri, dan -sebagaimana istilah para responden - 'keberanian', tampak menjadi prasyarat sebelum mereka dapat mengalami bentuk pemberdayaan lainnya**. Para anggota dari setiap contoh aksi kolektif yang diteliti melaporkan adanya reaksi beruntun dari peningkatan rasa percaya diri dan pengetahuan (perubahan dalam aset manusia atau individu), menjadi kemampuan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam maupun mempresentasikan kepada forum komunitas (aset kelembagaan). Selanjutnya terdapat beberapa harapan bahwa hal ini akan mendorong mereka untuk mengembangkan aset keuangan dan sumber daya maupun aset pendukung, yang nantinya akan saling melengkapi. Perubahan dalam aset sosial, khususnya dalam hal munculnya berbagai kesempatan baru dan mendapatkan teman baru merupakan aset yang bersifat lintas sektoral.

## Langkah ke depan

Saat ini MAMPU berada pada fase kedua dan berencana untuk semakin mendorong aksi kolektif di tingkat desa, kabupaten dan nasional dengan lebih terfokus kepada kebijakan. Bagian ini berisi rangkuman temuan utama penelitian ini, serta menyoroti beberapa pilihan langkah kedepan bagi MAMPU yang diselaraskan dengan fokus fase kedua.

Pertama, MAMPU perlu terus mengakui dan menghargai keberagaman yang ditemukan di delapan kasus aksi kolektif yang diteliti. Setiap mitra memainkan peran berbeda, namun juga terdapat peluang besar untuk melakukan pembelajaran lintas-mitra maupun adaptasi manajemen, misalnya yang terkait dengan:

- Berbagai pendekatan yang menghubungkan perempuan dengan berbagai layanan, serta membangun pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual (Balai Sakinah 'Aisyiyah dan Community Center).
- Berbagai justifikasi dan manfaat bekerja dengan kelompok dari berbagai latar sosial-ekonomi untuk menciptakan perubahan transformatif (Posko dan Balai Perempuan untuk pelibatan kelompok elit, Serikat PEKKA dan Sekolah Perempuan (Yasanti dan Kapal Perempuan) untuk melibatkan kelompok marjinal).
- Mengatasi perbedaan prioritas antara kelompok lokal dengan agenda kebijakan (MUIWO/SARI).
- Pendekatan terstruktur untuk membangun kapasitas dan motivasi para anggota aksi kolektif, yang dikembangkan berdasarkan metodologi setiap mitra yang sudah teruji.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika melibatkan perempuan kedalam aksi kolektif, atau ketika memulai suatu kelompok baru, **hal pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan situasi ekonomi anggota**. Namun tampak bahwa MAMPU, saat ini belum terlihat adanya dukungan teknis yang cukup maupun upaya lain untuk mengembangkan usaha yang layak yang terhubung dengan pasar secara berkelanjutan. Meskipun telah diadakan pelatihan, manfaatnya masih belum terasa. **MAMPU dapat mempertimbangkan untuk membangun kapasitas internal**

untuk mendorong kegiatan pembangunan ekonomi yang lebih layak serta menciptakan perubahan yang diperlukan dilingkungan kebijakan terkait.

**Bukti yang sangat terbatas dari pelibatan perempuan muda sebagai kelompok terpisah** pada delapan kasus yang diteliti, meskipun beberapa anggota dari kelompok-kelompok tersebut memang masih muda. MAMPU dan mitra sepertinya melewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dengan kalangan generasi perempuan muda yang lebih terdidik, melek teknologi, namun tidak terlibat didalam politik. **MAMPU dapat menelusuri apakah ada asosiasi atau organisasi perempuan muda yang berminat dan sesuai untuk menjadi bagian dari gerakan.**

Selain itu, perlu juga diberikan **perhatian khusus pada kelayakan (viabilitas) ekonomi kelompok** jika aksi kolektif dilaksanakan melalui struktur kelompok (sepaimana dalam delapan contoh ini). Para mitra nasional dan perantara dapat mempertimbangkan bagaimana caranya agar kelompok-kelompok tersebut dapat menjaga keberlanjutan kegiatan mereka, seperti melalui iuran anggota, dana dari pemerintah, maupun sumber lainnya. Terkait dengan hal ini, MAMPU dan para mitranya perlu menggunakan **analisis terhadap undang-undang desa dan peluang untuk mengakses dana desa** serta strategi-strategi yang tepat untuk melaksanakannya.

Penelitian ini menawarkan justifikasi **untuk meningkatkan investasi kepada perantara**, sebagai pelengkap, atau terkadang sebagai pengganti, model-model aksi kolektif berbasis kelompok lokal. Hal ini didasarkan pada peran penghubung dan pendukung yang dijalankan oleh SARI, KP2SK, dan APM, maupun pada mitra-mitra nasional.

**MAMPU dan para mitranya dapat menelusuri berbagai peluang untuk berbagi pendekatan pembangunan kapasitas pengembangan**, serta mengidentifikasi bagaimana semua hal tersebut dapat diperluas baik didalam maupun diluar jaringan MAMPU. Kami menyarankan dilakukannya **investasi lebih lanjut dengan pendekatan terstruktur untuk membangun kapasitas dan motivasi para anggota aksi kolektif**, yang dikembangkan berdasarkan metodologi setiap mitra yang sudah teruji.

# Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif .....	vii
Latar belakang penelitian .....	vii
Contoh aksi kolektif yang diteliti .....	viii
Dampak pada aset individu dan kolektif .....	xi
Langkah ke depan.....	xii
Daftar Isi .....	xiv
Daftar tabel dan angka .....	xv
Ucapan Terima Kasih .....	xvii
Singkatan dan Akronim.....	xviii
Latar Belakang Penelitian .....	1
Aksi kolektif perempuan di Indonesia .....	2
Metodologi Penelitian .....	4
Kerangka konseptual - definisi .....	4
Kerangka penelitian .....	6
Pengumpulan data .....	7
Analisis data .....	9
Temuan .....	12
Ciri-Ciri Aksi Kolektif: .....	12
Metode pembentukan .....	12
Tujuan aksi kolektif perempuan .....	14
Siapa saja anggota aksi kolektif perempuan? .....	17
Modus operasi.....	20
Partisipasi pada Aksi Kolektif - Dampak pada Aset Individu dan Kolektif .....	29
A. Aset Manusia (Kekuatan di dalam).....	29
B. Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali) .....	31
C. Aset Kapasitas (Kemampuan untuk).....	34
D. Aset Sosial (Kemampuan dengan).....	36
E. Aset Pendukung .....	38
Konsekuensi Negatif dari Aksi Kolektif Perempuan .....	41
Temuan Utama dan Langkah ke Depan.....	43
Referensi.....	46
Studi Kasus Masing-Masing Contoh Aksi Kolektif .....	47
Balai Sakinah 'Aisyiyah.....	48
Serikat PEKKA .....	55
Sekolah Perempuan .....	62
Koalisi Perempuan Indonesia Parepare .....	69
Buruh Migran Indonesia.....	75
Program Perempuan Pekerja Rumahan (PPR).....	81
Community Center .....	87

Posko Lestari dan Mentari .....	93
---------------------------------	----

## Daftar tabel dan angka

Tabel 1. Garis besar proses pengumpulan data .....	7
Tabel 2. Lokasi penelitian lapangan yang dipilih.....	9
Tabel 3. Tujuan dan fokus mitra nasional MAMPU dan yang terkait dengan aksi kolektif perempuan .....	14
Tabel 4. Karakteristik anggota aksi kolektif perempuan di lokasi studi lapangan.....	17
Tabel 5. Karakteristik demografis anggota BSA Pangkep yang disurvei .....	50
Tabel 6. Perubahan pada aset pemberdayaan sejak terlibat di dalam aksi kolektif, sebagaimana dilaporkan oleh anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah yang disurvei .....	51
Tabel 7. Peserta studi lapangan: Balai Sakinah 'Aisyiyah, Pangkep .....	53
Tabel 8. Karakteristik demografis anggota Serikat PEKKA yang disurvei.....	57
Tabel 9. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota Serikat PEKKA yang disurvei .....	58
Tabel 10. Peserta studi lapangan: Serikat PEKKA, Lingsar, Kabupaten Lombok Barat .....	60
Tabel 11. Karakteristik demografis anggota Sekolah Perempuan Hebat yang disurvei.....	63
Tabel 12. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota Sekolah Perempuan Hebat yang disurvei.....	64
Tabel 13. Peserta studi lapangan: Sekolah Perempuan Hebat, Kabupaten Gresik.....	67
Tabel 14. Karakteristik demografis anggota Balai Perempuan yang disurvei .....	70
Tabel 15. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota <i>Balai Perempuan</i> yang disurvei.....	72
Tabel 16. Peserta studi lapangan: Balai Perempuan/Koalisi Perempuan Indonesia, Kota Parepare .....	73
Tabel 17. Karakteristik demografis anggota MUIWO yang disurvei.....	77
Tabel 18. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota MUIWO yang disurvei .....	78
Tabel 19. Peserta studi lapangan: MUIWO Wonosobo.....	79
Tabel 20. Karakteristik demografis anggota <i>Kelompok Bunda Kreatif</i> yang disurvei .....	83
Tabel 21. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota <i>Kelompok Bunda Kreatif</i> yang disurvei.....	84
Tabel 22. Peserta studi lapangan: Kelompok Bunda Kreatif, Kabupaten Bantul .....	86
Tabel 23. Karakteristik demografis anggota Community Center yang disurvei.....	88
Tabel 24. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota Community Center yang disurvei.....	90
Tabel 25. Peserta studi lapangan: Community Center, APM Merangin .....	91
Tabel 26. Karakteristik demografis anggota <i>Posko</i> yang disurvei.....	95
Tabel 27. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota Posko - Swara Parangpuan yang disurvei.....	96
Tabel 28. Peserta studi lapangan Aksi Kolektif Perempuan: Posko-Swara Parangpuan.....	98
Gambar 1. Kerangka pemberdayaan MAMPU .....	5
Gambar 2. Kerangka penelitian - area eksplorasi.....	6
Gambar 3. Peta lokasi penelitian .....	11
Gambar 4. Motivasi awal para anggota yang disurvei untuk bergabung lalu terus berpartisipasi di dalam aksi kolektif perempuan.....	17
Gambar 5. Persepsi anggota yang disurvei tentang status rumah tangga mereka dibandingkan dengan rumah tangga lain di desa lokasi studi lapangan .....	19
Gambar 6. Proporsi anggota aksi kolektif yang disurvei yang melaporkan berpartisipasi di dalam berbagai jenis kegiatan pada tiga bulan terakhir.....	21
Gambar 7. Peran perantara pada aksi kolektif tingkat lokal.....	26
Gambar 8. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif terkait aset manusia.....	29
Gambar 9. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif terkait aset keuangan dan sumber daya.....	32
Gambar 10. Proporsi anggota kelompok aksi kolektif perempuan yang disurvei melaporkan adanya perubahan positif terkait aset kapasitas .....	34

Gambar 11. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang melaporkan perubahan positif terkait aset sosial mereka.....37



# Ucapan Terima Kasih

---

Tim peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh perempuan dan laki-laki yang telah berpartisipasi didalam penelitian lapangan mendalam di delapan lokasi yang disebutkan. Kami berharap penelitian ini benar-benar mengangkat cerita-cerita yang ingin Anda sampaikan.

Kami juga sangat berterima kasih atas waktu dan bantuan yang diberikan oleh para mitra nasional dan sub-mitra MAMPU untuk mengidentifikasi dan menyiapkan berbagai studi kasus yang menarik dan beragam tersebut. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam seluru wawancara, survei, maupun diskusi informal yang kami adakan.

Terakhir, terima kasih banyak kepada MAMPU atas penugasan untuk melaksanakan penelitian ini, dan secara khusus kepada Aaron Situmorang dan Stewart Norup yang sudah mengkaji berbagai tahapan proyek tersebut serta memberikan masukan yang berguna dan konstruktif. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gille Brown dan Rachel Diprose yang sudah bertindak sebagai pengkaji sejawat (*peer reviewer*) untuk laporan ini.



# Singkatan dan Akronim

APM	<i>Aliansi Perempuan Merangin</i>	Merangin Women's Alliance
BaKTI	<i>Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia</i>	Support Office for Eastern Indonesia
BKKBN	<i>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional</i>	Indonesian Population and Family Network
BMI	<i>Buruh Migran Indonesia</i>	Migrant Workers Indonesia
BNP2TKI	<i>Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</i>	Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad
BP	<i>Balai Perempuan</i>	Women's Forum
BP3TKI	<i>Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia</i>	Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers
BPD	<i>Badan Permusyawaratan Desa</i>	Village Consultative Body
BPJS	<i>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</i>	Social Security Agency
BSA	<i>Balai Sakinah 'Aisyiyah</i>	Sakinah 'Aisyiyah Forum
BUEKA	<i>Bina Usaha Keluarga 'Aisyiyah</i>	'Aisyiyah Family Business Development Agency
CSO		Civil Society Organisation
FPL DPN	<i>Forum Pengadaan Layanan - Dewan Pengarah Nasional</i>	Service Provision Forum - National Executive Board
GISI	<i>Gerakan Infak Sayang Ibu</i>	Assistance for Beloved Mothers' movement
Jamkesmas	<i>Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	Community Health Insurance
JKN	<i>Jaminan Kesehatan Nasional</i>	Jaminan Kesehatan Nasional
K3	<i>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</i>	Occupational Health and Safety
Kejar Paket A/B/C	<i>Kelompok Belajar Paket A/B/C</i>	Group Study Package A/B/C (out of school education at A=elementary, B=junior high school, C=high school)
Komnas Perempuan	<i>Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan</i>	National Commission on Violence Against Women
KPI	<i>Koalisi Perempuan Indonesia</i>	Indonesian Women's Coalition
KPS	<i>Kartu Perlindungan Sosial</i>	Social Protection Card
KPS2K	<i>Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan</i>	Women and Life Resources Group
KUA	<i>Kantor Urusan Agama</i>	Religious Affairs Office
MAMPU	<i>Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan</i>	Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction
MMR	<i>Angka Kematian Ibu</i>	Maternal Mortality Rate
MUIWO		Migrant Workers United Indonesia Wonosobo
Musrenbang	<i>Musyawarah Perencanaan Pembangunan</i>	Development Planning Forum
Musrenbangdes	<i>Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</i>	Village Development Planning Forum
Musrenbangdus	<i>Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun</i>	Sub Hamlet Development Planning Forum
PEKKA	<i>Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga</i>	Empowerment of Women Heads of Families
Perda	<i>Peraturan Daerah</i>	Local (sub-national) Regulation
Perdes	<i>Peraturan Desa</i>	Village Regulation

<i>Permampu</i>	<i>Perempuan Sumatra Mampu</i>	Sumatra Capable Women
PERWARI	<i>Persatuan Wanita Republik Indonesia</i>	Women's Association of the Republic of Indonesia
PKK	<i>Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</i>	Family Welfare Empowerment
PNPM	<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat</i>	National Program for Community Empowerment
<i>Pokja</i>	<i>Kelompok Kerja</i>	Working Group
<i>Posyandu</i>	<i>Pos Pelayanan Terpadu</i>	Integrated Health Post
<i>Posko</i>	<i>Pos Koordinasi</i>	Coordination Post
PPR	<i>Perempuan Pekerja Rumahan</i>	Women Homeworkers
<i>Puskesmas</i>	<i>Pusat Kesehatan Masyarakat</i>	Community Health Centre (sub-district level)
<i>Raskin</i>	<i>Beras Miskin</i>	Rice for the Poor
SARI		Social Analysis Research Institute
<i>Serikat PEKKA</i>	<i>Serikat Perempuan Kepala Keluarga</i>	PEKKA Union
SJSN	<i>Sistem Jaminan Sosial Nasional</i>	National Social Security System
SKTM	<i>Surat Keterangan Tidak Mampu</i>	Poverty Certification Letter
SP	<i>Sekolah Perempuan</i>	Women's School
SPH	<i>Sekolah Perempuan Hebat</i>	School for Strong Women
<i>Yasanti</i>	<i>Yayasan Annisa Swasti</i>	Anisa Swasti Foundation
YLP2EM	<i>Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat</i>	The Foundation for Community Economic Development
WCA/AKP	<i>Aksi Kolektif Perempuan</i>	Women's Collective Action
VIA	<i>Inspeksi Visual dengan Asam Asetat</i>	Visual Inspection with Acetic Acid



## Bagian 1

# Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan atas arahan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Program MAMPU) untuk lebih memahami **bagaimana dan dalam kondisi seperti apa keterlibatan perempuan dalam kelompok-kelompok lokal yang diinisiasi oleh para mitra MAMPU menghasilkan pemberdayaan individu dan kolektif yang positif.**

MAMPU adalah sebuah inisiatif berjangka delapan tahun (2012-2020) yang didanai oleh program Australian Aid, yang mendukung pengembangan jaringan dan koalisi organisasi perempuan dan gender ('mitra' MAMPU) serta anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan, regulasi dan layanan pemerintah, serta menjalankan pengaruh di sektor swasta. MAMPU berfokus pada lima area tematik:

1. Meningkatkan akses perempuan kepada program-program perlindungan sosial pemerintah;
2. Meningkatkan akses perempuan kepada peluang kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja
3. Meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri
4. Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu (maternal) dan reproduksi
5. Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Hipotesis dalam penelitian MAMPU ini adalah bahwasanya kapasitas inti dan kesiapan untuk melakukan aksi kolektif merupakan batu loncatan untuk mengangkat suara dan pengaruh yang kemudian dapat membawa perubahan jangka panjang pada akses perempuan miskin di Indonesia kepada layanan dan program pemerintah serta pencaharian mereka. Penelitian ini muncul dari kesadaran akan adanya peningkatan skala kelompok lokal dan berbagai bentuk aksi kolektif lainnya yang terkait dengan jaringan MAMPU, serta adanya keinginan untuk menciptakan pengetahuan baru yang relevan dengan tujuan MAMPU.

Pada awal proyek penelitian ini diawal tahun 2016, lebih dari 1.000 kelompok lokal yang terhubung dengan MAMPU dicatat kedalam penelitian. Selanjutnya, data yang diberikan MAMPU sejak akhir 2016 menunjukkan bahwa para mitra MAMPU membantu lebih dari 2.300 kelompok lokal, yang melibatkan lebih dari 53.000 perempuan dan lebih dari 2.400 laki-laki.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu menelusuri dan menyelidiki aksi kolektif seperti apa yang sudah ada, cara kerjanya, dan apa saja yang sudah dicapai dengannya. MAMPU mengusulkan dilakukannya pendekatan berbasis studi kasus serta revisi beberapa pertanyaan penelitian pada tahap persiapan. Migunani sebagai sebuah organisasi yang berbasis di Indonesia berfokus pada penciptaan pengetahuan melalui penelitian dan evaluasi, kemudian dikontrak untuk melaksanakan proyek ini.

Laporan ini adalah hasil dari kerja lapangan, konsultasi, debat dan analisis selama beberapa bulan. **Penelitian ini berfokus pada tingkat desa atau masyarakat sebagai lokus kegiatan serta untuk melihat perubahan yang diharapkan.**<sup>2</sup> Penelitian ini disusun dalam struktur sesuai

<sup>2</sup> Meskipun beberapa bagian dari aksi kolektif yang ada dapat melampaui tingkat masyarakat, seperti aksi kolektif untuk perubahan kebijakan yang mensyaratkan adanya aksi kolektif lintas kabupaten atau daerah.

dengan kerangka penelitian, yang dijelaskan pada bagian metodologi. Penelitian ini mencakup deskripsi ciri-ciri aksi kolektif, yaitu siapa anggotanya, kenapa mereka berpartisipasi, bagaimana pelaksanaannya, hingga hasil pengamatan dan laporan diri dari contoh-contoh yang diteliti. Penelitian ini diakhiri dengan pembahasan beberapa opsi yang dapat diambil MAMPU kedepan, khususnya dua hal penting yang perlu dicatat. Pertama, disepanjang penelitian, tim peneliti berupaya sehati-hati mungkin untuk tidak melangkah masuk ke wilayah evaluasi. Artinya, mereka tidak melakukan penilaian atau perbandingan apapun diantara contoh-contoh yang diteliti. Penelitian ini justru bertujuan untuk menunjukkan kondisi apa adanya, serta bagaimana kondisi tersebut (aksi kolektif) bekerja bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kedua, penelitian ini terdiri dari delapan studi kasus, dan karenanya temuan ini tidak dapat dianggap mencerminkan suatu pengalaman umum. Namun studi kasus yang ada mencerminkan dilakukannya penelitian dan analisis yang mendalam, serta keberagaman yang signifikan. Studi-studi kasus tersebut mengangkat berbagai opsi yang muncul dari kombinasi berbagai faktor struktural dan situasional, dan bukan mengembangkan jalan untuk melakukan replikasi.

## Aksi kolektif perempuan di Indonesia

Aksi kolektif perempuan sebagaimana dijelaskan dalam laporan penelitian ini sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia. Perkumpulan Sapa Tresna (pendahulu 'Aisyiyah yang merupakan salah satu mitra nasional MAMPU dalam penelitian ini) misalnya berfokus mempromosikan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di awal abad ke-20. Sejak itu, contoh-contoh aksi kolektif perempuan selalu terkait dengan gerakan kemerdekaan Indonesia, yang sebagian besarnya berbasis agama atau etnis. Beberapa diantaranya juga mengikuti struktur nasional dan memiliki cabang di pusat hingga daerah, seperti Persatuan Wanita Republik Indonesia atau PERWARI, sementara lainnya berbasis lokal atau daerah.

Orde Baru (1966 - 1998) juga berdampak besar pada organisasi kemasyarakatan, karena seluruh kelompok masyarakat saat itu ditempatkan dibawah kendali negara, dan diwajibkan mengembangkan dan melaksanakan program-program yang juga ditentukan oleh negara. Aksi kolektif perempuan di tingkat masyarakat ini kemudian perlahan menghilang kecuali yang terkait dengan kelompok keagamaan dan PKK.

PKK pertama kali berdiri di Jawa Tengah, di mana para penduduk desa, sejalan dengan budaya setempat, membentuk kelompok warga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tak berbayar serta untuk melakukan tugas-tugas kemasyarakatan. Perempuan kemudian membentuk kelompok sendiri, dan belakangan kelompok tersebut diformalkan oleh istri Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ny. Isriati Moenadi menjadi sebuah organisasi masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada perempuan. Organisasi itu kemudian dinamakan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Inisiatif ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibu Kardinah Soepardjo Roestam, istri Gubernur Jawa Tengah. Ketika Soepardjo Rustam ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri, PKK yang sudah dimulai, yang awalnya merupakan sebuah aksi kolektif perempuan di Jawa Tengah, menjadi program pemerintah di tingkat nasional. Pengaruh militeristik didalam birokrasi Orde Baru juga diadopsi oleh PKK. Istri kepala desa otomatis menjadi ketua PKK di tingkat desa. Pola yang sama juga diterapkan di seluruh tingkatan ke atas - kecamatan, kabupaten, dan provinsi - hingga pemerintah pusat. Istri Menteri Dalam Negeri otomatis menjadi ketua PKK Pusat, sementara istri Presiden Soeharto, Ibu Tien, menjadi pembina. Begitu diformalkan, PKK segera kehilangan karakter aslinya sebagai sebuah aksi kolektif perempuan; namanya kemudian diubah oleh Orde Baru menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Pada masa Orde Baru, perempuan juga berpartisipasi dalam berbagai kelompok keagamaan atau pengajian. Mereka berkumpul sekali seminggu untuk mendengarkan ceramah keagamaan.



Terkadang mereka juga akan ikut di pengajian di desa atau kabupaten lain. Umumnya kelompok-kelompok ini terafiliasi dengan organisasi-organisasi Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah.

Memasuki era Reformasi, perempuan mendapatkan peluang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan lain selain PKK dan pengajian. Karena sebelumnya aksi kolektif perempuan yang lebih bersifat feminis atau pembangunan dikekang oleh politik Orde Baru, kelompok-kelompok yang mampu memanfaatkan keterbukaan dan demokratisasi dari era Reformasi ini adalah kelompok-kelompok keagamaan. Hal ini akhirnya membuka jalan meningkatnya konservatisme keagamaan serta peningkatan proyeksi ide tentang bagaimana perempuan harus berperilaku dan berpakaian, bersamaan dengan pembatasan lebih keras terhadap pergerakan, suara, dan partisipasi mereka di ruang publik.

Contoh-contoh aksi kolektif perempuan yang dibahas didalam laporan ini harus dipandang dalam konteks ini serta dengan memahami sejarah yang dijelaskan diatas. Saat ini aksi kolektif perempuan dibentuk oleh latar belakang dimana ia beroperasi. Sistem budaya, agama dan kepercayaan, kekerabatan, pemerintahan, serta kemiskinan adalah faktor pendorong dan pembentuk kesempatan bagi perempuan untuk berkumpul, baik untuk berinteraksi sosial maupun mendapatkan dukungan sosial, dengan harapan meningkatkan pendapatan mereka, atau untuk menanggapi isu-isu seperti ketidaksetaraan dan ancaman bagi keamanan mereka. Sementara itu, latar saat ini menunjukkan adanya polarisasi kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan agama, atau kecenderungan mereka terhadap agama, dengan mereka yang lebih mendukung dan mengakomodasi keberagaman perempuan ditingkat terendah, yaitu di desa kecil dan kecamatan lokasi contoh-contoh ini beroperasi.

# Metodologi Penelitian

## Kerangka konseptual - definisi

Dalam konteks penelitian ini, kami mendefinisikan **aksi kolektif perempuan** sebagai pembentukan formal atau informal dan kegiatan kelompok atau jaringan yang terutama terdiri dari perempuan dan bertujuan untuk menciptakan perubahan positif pada kehidupan perempuan.<sup>3</sup>Aksi kolektif dimaknai sebagai proses bekerja untuk mempengaruhi perubahan, yang dengannya lembaga secara sukarela dibentuk dan dijalankan, serta kelompok-kelompok yang secara sadar bertindak bersama-sama.<sup>4</sup> Inklusivitas proses dalam definisi aksi kolektif perempuan juga amat penting. Hal ini mencerminkan bahwa di beberapa konteks, interaksi antar perempuan di luar rumah dapat dianggap sebagai pencapaian yang signifikan, meskipun bentuknya relatif fleksibel maupun tidak rutin. Karenanya, penelitian ini tidak berfokus untuk menilai struktur dan fungsi kelompok berdasarkan kriteria standar (misalnya: praktik dan sistem pemerintahan, kepemimpinan, dan administratif), namun lebih berfokus pada hasil dari pertemuan-pertemuan perempuan tersebut.

**Pemberdayaan** diartikan sebagai perubahan positif yang terkait dengan lima jenis aset yang diidentifikasi didalam kerangka pemberdayaan MAMPU (Gambar1): aset manusia (kekuatan didalam), aset keuangan dan sumber daya (kendali), aset kapasitas (kekuatan untuk), aset sosial (kekuatan dengan), dan aset pendukung. Kerangka pemberdayaan MAMPU sejalan dengan model-model yang menyoroti kendali atas sumber daya (fisik, manusia, intelektual, keuangan, dan diri), serta ideologi (kepercayaan, nilai dan sikap), serta definisi yang menekankan pentingnya mendapatkan 'kekuatan' (power).<sup>5</sup> Karenanya, meskipun fokus penelitian ini lebih kepada laporan mandiri tentang perubahan yang terjadi pada perempuan, termasuk sikap dan keyakinan mereka terhadap masyarakat dan posisi mereka didalamnya, penelitian ini juga menelusuri interaksi dan pengaruhnya terhadap norma-norma sosial, kebijakan, dan praktik yang ada yang menjaga status quo yang tidak setara, termasuk ketidaksetaraan didalam kelompok perempuan itu sendiri.

Kerangka pemberdayaan MAMPU didasarkan pada karya Rowlands dan lainnya yang mengkonseptualisasikan berbagai bentuk komponen kekuasaan:

- Kekuatan atas (*power over*): kemampuan untuk mempengaruhi dan memaksa
- Kekuatan untuk (*power to*): mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada (eksisting)
- Kekuatan dengan (*power with*): peningkatan kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas
- Kekuatan dari dalam (*power from within*): peningkatan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah

Rowlands (1997) Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras. Oxford: Oxfam.

<sup>3</sup> Definisi ini serta penekanan terhadap proses dan juga struktur kelompok didasarkan pada karya Pandolfelli, Meizen-Dick, & Dohrn (2007); Agarwal (2000); dan Evans & Nambiar (2013).

<sup>4</sup> Pandolfelli, L., Meizen-Dick, R., and Dohrn, S. (2007). Gender dan Aksi Kolektif: Kerangka Konseptual dan Analisis CAPRI Working Paper No. 64. pp.1-3

<sup>5</sup> Termasuk, Batliwala, S. (1993). *Empowerment of Women in South Asia: Concepts and Practices*. Mumbai: Asian- South Pacific Bureau of Adult Education; Sen, G. (1997). *Empowerment as an Approach to Poverty*. New York: UNDP; Kabeer, N. (1999) 'Resources, agency, achievements: reflections on the measurement of women's empowerment' *Development and Change* Vol 30: 435-464; Eyben, R., Kabeer, N., & Cornwall, A. (2008). *Conceptualising empowerment and the implications for pro poor growth*. Brighton: Institute of Development Studies.

Gambar 1. Kerangka pemberdayaan MAMPU



MAMPU secara khusus bertujuan untuk membawa perubahan bagi **perempuan miskin**. Para mitra MAMPU menegaskan definisi kemiskinan yang mencakup kemiskinan dari peluang dan akses (seperti kepada layanan dan pengambilan keputusan), kemiskinan relatif, serta ketidaksetaraan, dan tidak hanya mengandalkan ukuran-ukuran berbasis pendapatan dan konsumsi yang umum digunakan. Pemerintah Indonesia memiliki metodologi yang kompleks untuk menghitung tingkat kemiskinan rumah tangga,<sup>6</sup> yang terutama didasarkan pada indikator-indikator pendapatan dan konsumsi. Di dalam RPJMN, pemerintah memfokuskan upaya pengentasan kemiskinan terhadap '40 persen masyarakat terbawah', yaitu kelompok yang mencakup rumah tangga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan, namun dapat jatuh dengan cepat ke garis kemiskinan akibat guncangan ekonomi atau keluarga.

Untuk kemudahan dan efisiensi, penelitian ini menggunakan dua proses pengecekan untuk mengidentifikasi perempuan miskin: (i) dengan menanyakan apakah perempuan yang diwawancarai atau keluarganya memiliki identifikasi formal yang menunjukkan mereka miskin, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu perlindungan sosial lainnya, dan (ii) dengan meminta mereka melakukan penilaian subjektif tentang apakah para anggota aksi kolektif menganggap diri mereka termasuk kedalam kelompok sosial-ekonomi bawah, menengah, atau atas di desa mereka. Hal ini dikombinasikan dengan analisis atas pendidikan dan pengalaman mereka, pertanyaan dan pengamatan seputar interaksi, dan juga penilaian diri (*self-assessment*) oleh para anggota aksi kolektif tentang apakah mereka merasa rumah tangga mereka cukup berpengaruh atau kurang, atau apakah termasuk ke dalam golongan termarginalkan di masyarakatnya. Cara-cara ini dapat mengungkapkan informasi terkait kemiskinan peluang, kemiskinan relatif, dan ketimpangan. Secara umum, tim peneliti menemukan bahwa berdasarkan tingkat perkembangan dan kemiskinan menyeluruh di area-area yang dikunjungi, serta pengamatan atas kondisi rumah tangga, bahkan yang termasuk kelompok elit<sup>7</sup> di kalangan responden pun seringkali masih tergolong '40 persen terbawah'.

<sup>6</sup> Lihat <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23>.

<sup>7</sup> Untuk konteks laporan ini, kami mendefinisikan 'elit' sebagai memiliki pengaruh besar, koneksi pribadi kepada pengambil keputusan, atau secara relatif dianggap cukup kaya. Istilah-istilah ini sama sekali tidak dikaitkan dengan konotasi negatif.

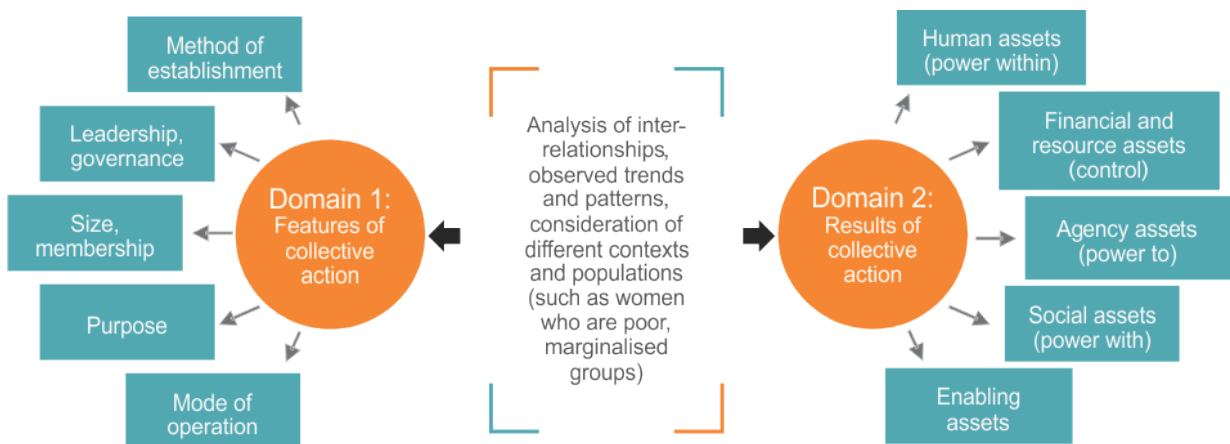


## Kerangka penelitian

Untuk penelitian ini, digunakan sebuah kerangka penelitian sederhana (Gambar 2) untuk memandu pengembangan instrumen penelitian dan juga analisis data awal. Sisi kiri kerangka penelitian ini, yaitu ciri-ciri khas aksi kolektif - baik dalam bentuk kelompok maupun proses, adalah wilayah kepentingan khusus MAMPU. Sementara itu disisi kanan, yaitu hasilnya, mencerminkan lima area kerangka pemberdayaan MAMPU.

Kerangka ini mencakup area-area utama penelitian yang diarahkan oleh pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disepakati (lihat di bawah ini). Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut kemudian disempurnakan oleh tim peneliti berdasarkan usulan awal dari MAMPU.

Gambar 2. Kerangka penelitian: area eksplorasi



Kerangka ini mencakup area-area utama penelitian yang diarahkan oleh pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disepakati (lihat dibawah ini). Pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut kemudian disempurnakan oleh tim peneliti berdasarkan usulan awal dari MAMPU.

### Pertanyaan penelitian pemandu

Pertanyaan utama: Bagaimana dan dalam kondisi seperti apa keterlibatan perempuan dalam kelompok-kelompok lokal yang diinisiasi oleh para mitra MAMPU menghasilkan pemberdayaan individu dan kolektif?

#### Pertanyaan terkait area 1: Ciri-ciri aksi kolektif:

1. Apa saja ciri utama setiap jenis kelompok lokal yang dibentuk oleh para mitra dibawah MAMPU?
2. Apa indikasi yang menunjukkan bahwa perempuan miskin telah dilibatkan, dan bagaimana cara mereka dilibatkan di dalam aksi kolektif yang diinisiasi atau didukung oleh para mitra MAMPU?
3. Bagaimana kelompok-kelompok yang dibentuk oleh MAMPU berhubungan dengan dan dibandingkan dengan bentuk aksi kolektif yang telah ada sebelumnya?

#### Pertanyaan terkait area 2: Hasil aksi kolektif

1. Menurut perempuan sendiri, apa saja manfaat yang didapat dengan menjadi anggota kelompok lokal, dan apakah ada perbedaan pandangan di setiap kelompok dan konteks tentang manfaat ini?
2. Bagaimana keanggotaan dikelompok lokal mempengaruhi aset individu dan kolektif sesuai yang dinyatakan didalam kerangka pemberdayaan MAMPU?
3. Apakah ada contoh konsekuensi negatif atau kemunduran baik pada individu maupun kelompok yang disebabkan keterlibatan mereka di dalam aksi kolektif perempuan?

## Pengumpulan data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain metode campuran bertahap (*phased mixed-methods design*). Proses pengumpulan data dijelaskan pada Tabel 1. Rincian lebih lanjut tentang sampel responden dimasukkan di dalam studi kasus pada Bagian 3.

Seluruh tim peneliti Migunani terlibat aktif dalam penyempurnaan pertanyaan penelitian dan pengembangan alat penelitian (*tool*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami konten dan struktur pertanyaan, serta tujuan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cara ini pada gilirannya akan membuat proses wawancara menjadi lebih mengalir. Pelatihan bagi para peneliti mencakup teknik bertanya, perekaman wawancara, penulisan catatan dan observasi lapangan, serta etika penelitian termasuk lembar persetujuan dan kemampuan untuk peka terhadap berbagai situasi. Tidak ada hambatan berarti yang dialami pada saat penelitian lapangan; para responden kelompok maupun perorangan bersikap terbuka dan senang dilibatkan di dalam penelitian. Proses tatap muka lebih efektif dibandingkan survei jarak jauh, bahkan meskipun menggunakan telepon.

Responden utama diidentifikasi pertama kali melalui rekomendasi dari para mitra nasional dan fasilitator lapangan, lalu melalui teknik bola salju. Para fasilitator lapangan dan perantara (yang definisinya dijelaskan pada Bagian 2) membantu para peneliti untuk mengumpulkan anggota aksi kolektif dan lainnya untuk melakukan diskusi kelompok. Wawancara informan kunci berlangsung selama sekitar 1 jam, diskusi kelompok sekitar 2 jam, dan survei anggota sekitar 30 menit per responden. Diskusi kelompok dengan para anggota juga memanfaatkan alat partisipatif seperti lini masa sejarah (*historical timeline*).

Tabel 1. Garis besar proses pengumpulan data

Tahap	Instrumen dan proses	Fokus	Responden dan sampling
1	Pemetaan awal diselesaikan	Kerangka penelitian	Mitra nasional MAMPU

Tahap	Instrumen dan proses	Fokus	Responden dan sampling
(Mei)	melalui review dokumen, diikuti dengan kontak via email dan telepon.	domain 1 - informasi tingkat tinggi tentang struktur, keanggotaan, lokasi, dan tujuan kelompok.	('Aisyiyah, PEKKA, KPI, <i>Kapal Perempuan</i> , Migrant CARE, FPL-DPN, Yasanti and Permampu)
2 (selesai November)	Survei tier kedua diselesaikan secara online (menggunakan <i>survey monkey</i> ), email, atau telepon. Waktu survei diperpanjang dari rencana awal untuk mendapatkan lebih banyak tanggapan.	Kerangka penelitian domain 1, bergerak ke domain 2  Ditambahkan kedalam metodologi untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ditemukan pada proses pemetaan.	Diawali dengan mengirim <i>blast email</i> kepada para mitra MAMPU, menarget fasilitator kelompok tingkat kabupaten atau kecamatan, koordinator mitra MAMPU, atau perwakilan lainnya  Total responden = 77, (termasuk sejumlah individu non-perwakilan dalam peran-peran ini)
3 (September - Oktober)	Penelitian lapangan mendalam dengan 4 komponen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara kelompok aksi kolektif</li> <li>- Survei anggota aksi kolektif</li> <li>- Wawancara informan utama dengan para pemimpin mitra MAMPU dan kelompok perempuan lainnya</li> <li>- Wawancara laki-laki/tokoh masyarakat laki-laki</li> <li>- Observasi dan diskusi informal pada saat kunjungan lapangan</li> </ul>	Kerangka penelitian domain 2, dengan sejumlah aspek dari domain 1	Delapan lokasi (lihat Gambar 3)  Hingga 10 anggota per kelompok yang terlibat didalam wawancara kelompok (total 163 perempuan, 55 laki-laki diwawancara dari 28 kelompok)  Survei terhadap para anggota kelompok-kelompok di seluruh wilayah yang dikunjungi (sampel acak jika jumlah total anggota lebih dari 20 orang per lokasi, total responden yang disurvei 169 orang)  Wawancara dengan laki-laki yang berfokus pada pasangan anggota kelompok, kepemimpinan lokal, atau target aksi kolektif (total 22 wawancara terhadap 23 responden)

## PEMILIHAN LOKASI PENELITIAN LAPANGAN

Sesuai pemetaan awal dan wawancara dengan para perwakilan mitra nasional, delapan contoh aksi kolektif berhasil diidentifikasi (satu per mitra). Para peneliti utama kemudian berkonsultasi kembali dengan para mitra nasional MAMPU untuk memilih lokasi studi lapangan untuk menjamin tercapunya karakteristik-karakteristik berikut:

- Keterwakilan kelompok pedesaan dan peri-urban;
- Keterwakilan berbagai tujuan aksi, sesuai dengan tema dan kerangka pemberdayaan MAMPU;
- Indikasi contoh yang menarik atau sukses;
- Keterwakilan berbagai jenis format kelompok (yang sudah ada/pre-eksisting, yang diinisiasi oleh koneksi dengan MAMPU, atau organik yang dibandingkan dengan yang dibentuk untuk tujuan spesifik sejak awal);
- Keseimbangan antara kisah sukses (*showcase*) atau lokasi favorit untuk kunjungan dari luar, dan lokasi yang terabaikan.

Lokasi studi lapangan dan contoh aksi kolektif yang relevan, serta mitra nasional terkait dimasukkan ke dalam tabel berikut dan peta pada halaman 11. Kecuali ketika merujuk kerja mitra nasional, maka kami menggunakan nama aksi kolektif yang diteliti disepanjang laporan ini.

Tabel 2. Lokasi penelitian lapangan yang dipilih

Contoh aksi kolektif perempuan	Lokasi penelitian lapangan	Terkait dengan (mitra nasional MAMPU)
Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA)	Kabupaten Pangkajene Kepulauan (PanKep), Sulawesi Selatan (pedesaan)	'Aisyiyah
Posko	Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (pedesaan)	Komnas Perempuan Forum Pengadaan Layanan - Dewan Pengarah Nasional, dengan sub-mitra Swara Parangpuan
Sekolah Perempuan	Kabupaten Gresik, Jawa Timur (pedesaan)	Kapal Perempuan dengan sub-mitra <i>Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K)</i>
<i>Balai Perempuan</i>	Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan (perkotaan)	<i>Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)</i>
Migrant Workers United Wonosobo (MUIWO)	Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (pedesaan)	Migrant CARE dengan sub-mitra Social Analysis Research Institute (SARI)
<i>Serikat PEKKA</i>	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (pedesaan)	PEKKA
Community Center	Kabupaten Merangin, Jambi (pedesaan)	Perempuan, melalui <i>Forum Komunikasi Perempuan and Aliansi Perempuan Merangin, (APM)</i>
Kelompok Kreatif Bunda	Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta (peri-urban)	Yasanti, melalui Program Perempuan Pekerja Rumahan (PPR)

## Analisis data

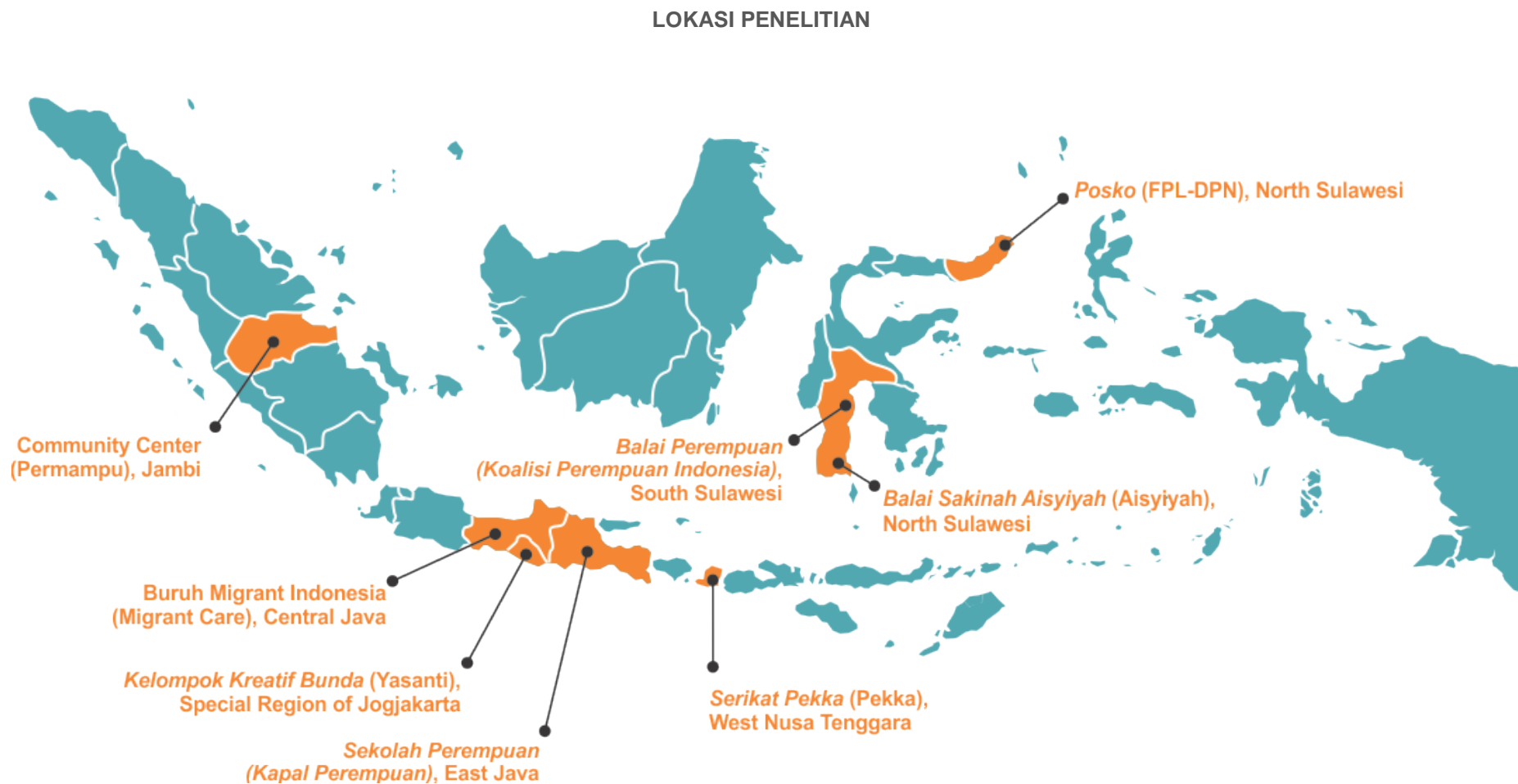
Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan software paket statistik untuk ilmu sosial (SPSS) dan berfokus pada statistik deskriptif, khususnya *cross-tabulasi* frekuensi dan proporsi dari berbagai respon. Secara umum, ukuran sampel, khususnya ketika dipilih berdasarkan contoh aksi kolektif, masih terlalu kecil untuk digunakan uji statistik lainnya.

Wawancara kualitatif kemudian ditranskrip, diimpor ke dalam Nvivo, lalu dikodifikasi berdasarkan tema kunci (seperti berdasarkan kerangka penelitian dan pertanyaan penelitian), dan sub-tema (terkait dengan jawaban tertentu). Analisis lintas kasus (*cross-case*) dan validasi dimulai dengan pertemuan seluruh peneliti lapangan pada bulan Desember 2016. Berbagai temuan, persamaan dan perbedaan antar berbagai contoh aksi kolektif perempuan yang ada diidentifikasi dan didiskusikan. Tim peneliti lapangan menyiapkan profil masing-masing contoh yang dikaji, kemudian bersamaan dengan output Nvivo tematik dianalisis dan didiskusikan lebih lanjut oleh para penulis laporan utama. Proses menggunakan penelitian kasus holistik untuk setiap contoh dan output tematik lintas-kasus ini sangat penting untuk memastikan bahwa atmosfer dari kunjungan lapangan dan kesan peneliti benar-benar tersampaikan secara maksimal, sekaligus teruji dengan analisis tematik lebih luas terhadap transkrip yang dihasilkan.

Selanjutnya, lokakarya temuan utama dengan para mitra MAMPU dan perwakilan dari contoh aksi kolektif dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Pendapat peserta lokakarya telah dimasukkan kedalam laporan ini.



Gambar 3. Peta lokasi penelitian



## Bagian 2

# Temuan

## Ciri-Ciri Aksi Kolektif:

Kami mengidentifikasi tiga jenis hubungan utama antara mitra nasional MAMPU dengan aksi kolektif perempuan di tingkat lokal. Dalam banyak hal terjadi pembauran karakteristik, namun secara umum kita dapat membedakan antara:

- **Tipe A - struktur vertikal multi-tingkatan:** Mitra nasional berhubungan dengan kelompok lokal melalui perwakilan provinsi, kabupaten atau kecamatan. Identitas kelompok lokal mencerminkan identitas mitra nasional dan memiliki bentuk yang serupa di setiap lokasi.

Contoh: 'Aisyiyah/Balai Sakinah 'Aisyiyah; PEKKA/Serikat PEKKA; Koalisi Perempuan Indonesia/Balai Perempuan.

- **Tipe B - pelibatan sub-mitra:** Mitra nasional membentuk kemitraan dengan masyarakat sipil di berbagai tingkatan yang bekerja diisu yang sama. Para sub-mitra ini kemudian membentuk atau mendukung kelompok-kelompok aksi kolektif atau kegiatan yang terkait dengan isu bersama. Identitas kelompok lebih bersifat individu, sementara peran sub-mitra lebih dominan.

Contoh: Migrant CARE melalui mitranya yaitu SARI di tingkat kabupaten melalui kelompok yang berfokus pada kegiatan pekerja migran di tingkat desa; Yasanti melalui inisiatif pekerja rumahan perempuan melalui kelompok seperti Kelompok Kreatif Bunda; Kapal Perempuan melalui KPS2K dengan kegiatan Sekolah Perempuan.

- **Tipe C - kegiatan multi-pemangku kepentingan:** Hal ini kemudian dikatalisasi oleh para mitra nasional diberbagai tingkatan. CSO-CSO yang terlibat didalam upaya ini dapat memiliki hubungan langsung ke tingkat desa maupun tidak, namun aksi kolektif pada hakikatnya adalah interaksi multi-pemangku kepentingan seperti ini.

Contoh: Permampu, melalui Forum Komunikasi Perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten, hingga kelompok perempuan di tingkat desa, dan dalam kasus ini melalui APM hingga Community Center; Komnas Perempuan melalui FPL-DPN. Di beberapa wilayah, anggota FPL-DPN memiliki akses langsung kepada aksi kolektif perempuan di tingkat desa, seperti misalnya Swara Parangpuan melalui kegiatan Posko.

## Metode pembentukan

Sebagian besar contoh aksi kolektif perempuan yang diteliti sudah ada sebelum para mitra nasional bergabung dengan MAMPU. Peningkatan sumber daya melalui MAMPU terbukti berkontribusi meningkatkan jumlah kelompok di 'Aisyiyah, PEKKA, Kapal Perempuan, dan Koalisi Perempuan Indonesia. Hubungan Migrant CARE/SARI/MUIWO juga diperbarui, dan menunjukkan cara kerja baru yang berbeda bagi Migrant CARE.

Yasanti/Pekerja Perempuan Rumahan/Kelompok Kreatif Bunda, FPL-DPN/Swara Parangpuan/Posko, dan Permampu/Aliansi Perempuan Merangin/Community Center adalah contoh-contoh perubahan didalam serta revitalisasi aksi kolektif dan hubungan yang telah ada



sebelumnya. Community Center (lihat kotak di bawah) adalah entitas yang tumbuh murni secara organik - karena tumbuh dari tingkat desa - dari contoh aksi kolektif perempuan lokal yang diteliti.

#### Evolusi hubungan: Dari tanggap bencana hingga aksi kolektif perempuan pekerja rumahan

Yasanti pertama kali memulai kerjanya di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, setelah terjadi gempa Yogyakarta pada 2006. Melalui kerjanya tersebut, mereka kemudian terhubung dengan organisasi Solidaritas Perempuan, yaitu sebuah organisasi feminis terkemuka di Yogyakarta. Ketika Solidaritas Perempuan harus menghentikan kerjanya, Yasanti meneruskan kerja mereka di wilayah tersebut. Seiring waktu, Yasanti mulai menambah fokusnya pada pekerja rumahan. Inisiatif fokus pada perempuan pekerja rumahan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan anggota, namun difokuskan pula untuk membangun pengetahuan perempuan pekerja rumahan tentang hak dan peluang mereka atas perlindungan, serta akses kepada berbagai layanan yang relevan.

Untuk para mitra nasional dengan struktur vertikal multi-tingkatan dari tingkat pusat hingga bentuk aksi kolektif lokal, mitra nasional, melalui sub-struktur ini, menjalankan proses untuk mengidentifikasi anggota dan membentuk kelompok baru. Para anggota dari tangkapan spesifik, seperti misalnya anggota Muhammadiyah (Balai Sakinah 'Aisyiyah), perempuan kepala rumah tangga (Serikat PEKKA), atau yang diundang melalui perekrutan (Balai Perempuan). Organisasi-organisasi tersebut, seperti halnya Kapal Perempuan, memiliki strategi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dikelompok lokal, termasuk melalui program pengembangan kapasitas berbasis kurikulum bertahap dan bervariasi.

Ketika hubungan dijalankan melalui pelibatan sub-mitra dan kegiatan multi-pemangku kepentingan, peran sub-mitra menjadi lebih penting dibandingkan peran mitra nasional. Pada setiap kasus jelas bahwa terdapat perhatian khusus untuk mengintegrasikan kesadaran akan hak dan advokasi kedalam pembentukan kelompok dan pendidikan bagi anggota. Hal ini antara lain terlihat pada MUIWO (pekerja migran and hak lapangan kerja), Kelompok Bunda Kreatif (hak pekerja rumahan), Community Centre (hak seksual dan kesehatan reproduksi serta kekerasan terhadap perempuan), dan Posko (kekerasan terhadap perempuan and anak).

Ketiga jenis hubungan mitra nasional dengan aksi kolektif lokal menerapkan strategi-strategi yang bernilai setara, meskipun arah perluasannya berbeda. Selain itu tampak bahwa mereka yang berada dalam struktur vertikal multi-tingkatan, berada pada posisi yang memungkinkan untuk mendorong pembentukan kelompok yang berpotensi lebih untuk berkelanjutan. Hal ini karena struktur dukungan serta metodologi mereka untuk mengembangkan kapasitas individu para anggota aksi kolektif dan kelompok. Pelibatan sub-mitra dan kegiatan multi-pemangku kepentingan memungkinkan terjadinya keberagaman karena berbagai organisasi dilibatkan di dalamnya (yang sangat berbeda, yang kebanyakan organisasi vertikal dengan struktur homogen). Para mitra

#### Aksi kolektif berkembang dari dalam: *Community Center*

Pada awal 1997, lima perempuan membentuk sebuah kelompok desa karena mereka peduli dengan isu-isu yang dihadapi perempuan di tingkat lokal, seperti kematian ibu, kekerasan terhadap perempuan, KDRT, dan kehamilan remaja tak diinginkan. Kelompok ini kemudian menjadi Kelompok Belajar Sehat Mandiri, yang berada di Desa Pulau Tujuh.

Pada 1998, cabang Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jambi memberikan dukungan pembangunan kapasitas terkait hak-hak perempuan di pedesaan, dan membangun kesadaran kelompok tersebut tentang kesehatan reproduksi dari perspektif gender. Kelompok Belajar Sehat Mandiri ini kemudian mendapatkan pelatihan dari Komnas Perempuan, dan menjadi bagian dari jaringan Komnas Perempuan dalam mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan, serta berpartisipasi dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.

Kelompok belajar ini selanjutnya menjadi '*Community Center*' pada 2001, nama yang dianggap anggotanya lebih mudah dikenali dan mencerminkan kegiatan mereka - yaitu suatu tempat dimana masyarakat dapat berkumpul, berbagi dan belajar. Saat ini terdapat 18 *Community Center* di tujuh kecamatan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.



nasional dapat menjalankan peran pembimbing (mentoring) terkait pendekatan kesetaraan gender transformatif dan feminis dalam hubungan tersebut.

MAMPU sebagai entitas tentu saja tidak terlalu tampak di tingkat desa, karena hal ini bukan merupakan hubungan langsung yang dimiliki para anggota aksi kolektif. MAMPU lebih menjalankan peran dibelakang layar dalam mendukung para mitra nasional untuk memperluas jangkauan mereka kepada lebih banyak kelompok aksi kolektif. Selain itu MAMPU juga mendukung para mitra untuk menginisiasi aksi kolektif baru maupun memperkuat kembali yang sudah ada dengan dasar kesetaraan gender dan hak yang lebih baik.

## Tujuan aksi kolektif perempuan

Salah satu contoh aksi kolektif perempuan yang diteliti, yaitu Balai Sakinah 'Aisyiyah dan Serikat PEKKA, yang menyebutkan secara khusus pengurangan kemiskinan sebagai tujuan utama mereka, yang kemungkinan mencerminkan demografi anggota mereka yang merupakan kelompok miskin di masyarakat (lihat Gambar 5).

MUIWO dan Kelompok Bunda Kreatif memiliki fokus tersirat untuk mengurangi kemiskinan ekonomi melalui fokus mereka kepada pengembangan keterampilan terkait penciptaan pendapatan. Bagi aksi kolektif lainnya seperti Balai Perempuan dan Sekolah Perempuan, terdapat fokus tersirat pula pada kemiskinan ekonomi seperti didalam aksi-aksi mereka yang mempromosikan akses kepada perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan nasional, bagi kelompok masyarakat yang memenuhi syarat.

Seluruh contoh yang diteliti menunjukkan adanya tujuan eksplisit untuk meningkatkan akses perempuan kepada sejumlah layanan, dengan strategi utama yang digunakan adalah pendampingan langsung kepada perempuan tersebut (dan dalam kasus identitas hukum, pendampingan terhadap laki-laki dan anak laki-laki) kepada layanan, serta advokasi tingkat lokal yang berusaha menciptakan peraturan dan alokasi sumber daya yang mendukung.

Tabel 3 berikut menunjukkan keselarasan antara contoh-contoh aksi kolektif perempuan lokal dengan tujuan<sup>8</sup> dari para mitra nasional yang terkait dengan mereka.

Tabel 3. Tujuan dan fokus mitra nasional MAMPU terkait dengan aksi kolektif perempuan<sup>9</sup>

Contoh	Fokus mitra MAMPU	Fokus aksi kolektif perempuan terkait
Tipe A: Struktur vertikal multi-tingkatan		
Balai Sakinah 'Aisyiyah / 'Aisyiyah	Fokus yang kuat untuk memperluas dan memperdalam pemahaman atas ajaran Islam, termasuk meningkatkan nilai dan harkat perempuan sesuai dengan ajaran Islam; meningkatkan peluang pendidikan dan ekonomi bagi perempuan; meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, hukum dan peradilan, serta lingkungan. Fokus dalam program MAMPU terkait dengan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, dengan isu prioritas terdiri dari: (i) ASI, (ii) keluarga berencana, (iii) deteksi kanker serviks dan (iv) kanker payudara, dan (v) akses kepada jaminan kesehatan nasional.	Mengikuti kebijakan nasional 'Aisyiyah, dan lima isu prioritas yang disebutkan disebelah kiri.

<sup>8</sup> Hal ini merujuk kepada fokus keseluruhan dari organisasi-organisasi tersebut, dan bukan hanya kegiatan mereka dengan MAMPU.

<sup>9</sup> Informasi di dalam tabel ini dikumpulkan dari para fasilitator survei, wawancara dengan mitra nasional, sub-mitra, fasilitator, dan anggota aksi kolektif, serta informasi dari website MAMPU dan mitra nasional.

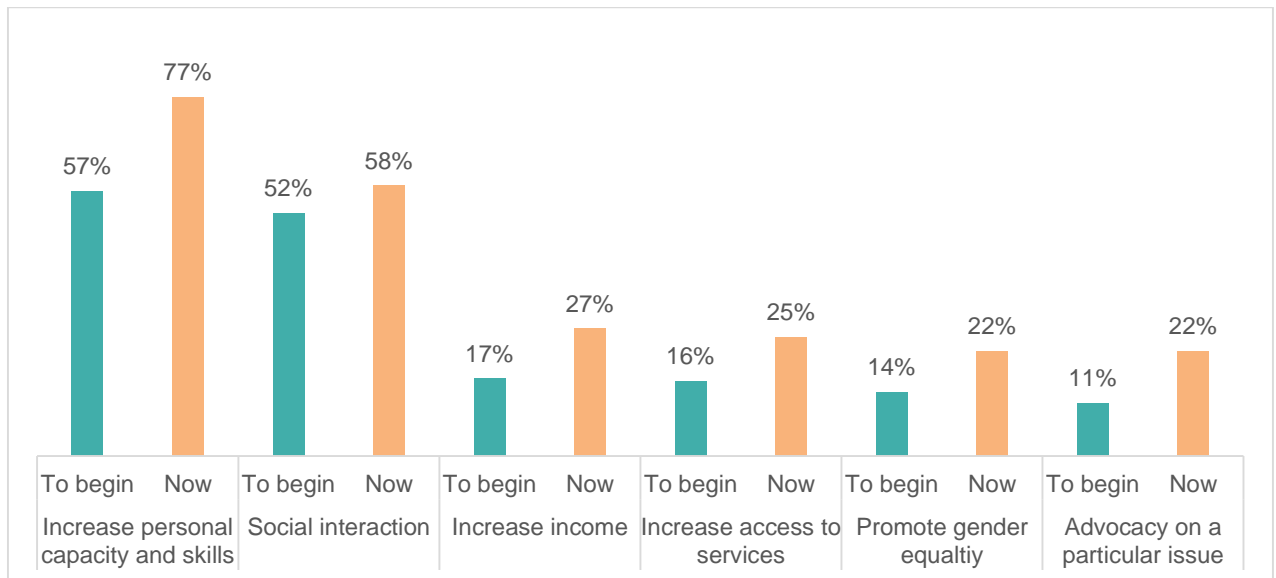
Contoh	Fokus mitra MAMPU	Fokus aksi kolektif perempuan terkait
	Selaras dengan tema 4 MAMPU: Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mencapai kesehatan reproduksi dan ibu yang lebih baik.	
<i>Koalisi Perempuan Indonesia / Balai Perempuan</i>	<p>Pemenuhan hak perempuan dibidang politik, ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan, agama, sosial dan budaya serta lingkungan.</p> <p>Memperkuat kepemimpinan perempuan, meningkatkan akses kepada skema perlindungan sosial, dan penyediaan layanan dasar untuk mengurangi kemiskinan</p> <p>Selaras dengan tema 1 MAMPU: Meningkatkan akses perempuan kepada program-program perlindungan sosial pemerintah;</p>	<p>Pembangunan kapasitas anggota berfokus pada pembangunan pengetahuan tentang hak asasi perempuan, meningkatkan percaya diri, kolegalitas, dan jaringan.</p> <p>Keterwakilan dan kepemimpinan terkait kebutuhan dan kepentingan perempuan; dukungan untuk akses kepada layanan, termasuk dalam kasus kekerasan terhadap perempuan; dan akses kepada perlindungan sosial.</p>
PEKKA/Serik at PEKKA	<p>Meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga; membuka berbagai pilihan pencaharian; membangun kesadaran kritis menuju kesetaraan peran, posisi dan status, dan partisipasi perempuan di kehidupan sosial dan politik; mempromosikan peran perempuan kepala rumah tangga, dari tingkat rumah tangga hingga negara.</p> <p>Selaras dengan tema 1 MAMPU: Meningkatkan akses perempuan kepada program-program perlindungan sosial pemerintah.</p>	<p>Memulai dengan simpan pinjam, dan melangkah lebih lanjut dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan (khususnya bagi perempuan kepala rumah tangga) dalam berbagai area keorganisasian dan teknis.</p> <p>Membangun keterampilan advokasi dan representasi, serta meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Fokus spesifik pada dukungan untuk meningkatkan skema dokumen identitas hukum dan perlindungan sosial.</p>
<b>Tipe B: Pelibatan sub-mitra</b>		
Kapal Perempuan / KPS2K / Sekolah Perempuan Hebat	<p>Empat kegiatan saling terkait: (i) pengembangan pengetahuan; (ii) penguatan kepemimpinan perempuan; (iii) advokasi berbasis data; dan (iv) pengembangan kelembagaan.</p> <p>Dalam MAMPU fokusnya adalah pada pendidikan kritis feminis dan advokasi berbasis bukti diberbagai sektor.</p> <p>Selaras dengan tema 1 MAMPU: Meningkatkan akses perempuan kepada program-program perlindungan sosial pemerintah.</p>	<p>Kelompok belajar tingkat desa yang berfokus pada pendidikan kritis dan kesadaran gender di wilayah miskin.</p> <p>Melalui KPS2K, advokasi untuk meningkatkan ketersediaan dan akses kepada layanan.</p>
Migrant CARE / SARI / MUIWO	<p>Memperkuat perlindungan negara atas hak pekerja migran; meningkatkan kapasitas dan jaringan organisasi; dan mengadvokasi layanan terkait pekerja migran.</p> <p>Selaras dengan tema 3 MAMPU: Meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri</p>	<p>Pelatihan dan pengembangan keterampilan terkait kegiatan yang berpotensi menciptakan pendapatan.</p> <p>Melalui SARI, mendorong pengembangan peraturan dan layanan lokal untuk mendukung migrasi aman dan integrasi pekerja migran yang telah pulang.</p>
Permampu / APM / Community Center	<p>Mengadvokasi hak seksual dan kesehatan reproduksi perempuan; mengembangkan kepemimpinan dan bekerja untuk memberdayakan perempuan akar rumput khususnya di Sumatera, termasuk dengan: memberikan pendidikan seks yang komprehensif yang mencakup pemberdayaan politik dan ekonomi perempuan; mendukung mentoring perempuan dan layanan informasi hak seksual dan kesehatan reproduksi perempuan; meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama; mengadvokasi kebijakan dan alokasi sumber</p>	<p>Menyediakan pelatihan bagi perempuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi dengan kerangka feminis..</p> <p>Melalui APM, mengadvokasi perubahan kebijakan lokal dan alokasi sumber daya.</p>

Contoh	Fokus mitra MAMPU	Fokus aksi kolektif perempuan terkait
	<p>daya lokal yang mendukung; melaksanakan penelitian dan dokumentasi; mengembangkan jaringan hak seksual dan kesehatan reproduksi.</p> <p>Selaras dengan tema 4 MAMPU: Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mencapai kesehatan reproduksi dan ibu yang lebih baik.</p>	
Yasanti / Perempuan Pekerja Rumahan / Kelompok Bunda Kreatif	<p>Berfokus untuk: (i) memperkuat organisasi perempuan menjadi independen dan demokratis; (ii) mengembangkan kesadaran kritis bagi pekerja perempuan dengan pengorganisasian, pendidikan dan advokasi; dan (iii) memperkuat hak ekonomi perempuan.</p> <p>Selaras dengan tema 2 MAMPU: Meningkatkan akses perempuan kepada peluang kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja.</p>	<p>Memfasilitasi pengorganisasian perempuan pekerja rumahan dengan tujuan membangun pemahaman tentang hak mereka sebagai pekerja, memperluas akses kepada layanan, meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui perusahaan berbasis rumahan, dan melalui inisiatif Perempuan Pekerja Rumahan yang mempromosikan perlindungan pekerja rumahan melalui advokasi kebijakan dan informasi.</p>
Tipe C: Kegiatan multi-pemangku kepentingan:		
Komnas Perempuan-FPL DPN / Swara Perempuan / Posko	<p>Memonitor dan mempengaruhi kebijakan dan layanan terkait kekerasan terhadap perempuan; pembangunan kapasitas terkait undang-undang dan peraturan terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan.</p> <p>Dukungan langsung kepada akses terhadap layanan; meningkatkan mekanisme pencegahan kekerasan berbasis masyarakat (anggota FPL-DPN).</p> <p>Selaras dengan tema 5 MAMPU: Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.</p>	<p>Pengorganisasian masyarakat untuk membantu perempuan dan anak-anak yang terdampak kekerasan; advokasi untuk formalisasi dukungan masyarakat; rujukan ketingkat yang lebih tinggi dengan dukungan dari Swara Parangpuan; informasi dan pendidikan bagi anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi penerimaan atas kekerasan dan mencegah kekerasan.</p>
Seluruh contoh:		
	<p>Pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, yang mayoritasnya berdasarkan konsep hak.</p> <p>Koneksi antara isu lokal dengan advokasi yang menarget pemerintah lokal dari tingkat desa (seperti melalui partisipasi dalam musyawarah desa) hingga pada musyawarah perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya di tingkat kecamatan dan kabupaten.</p>	<p>Pengembangan percaya diri, keyakinan diri, pengetahuan dan keterampilan perempuan; mendorong interaksi yang lebih besar antara perempuan dan pengambil keputusan lokal dan penyedia layanan; mendorong akses kepada layanan dan meningkatkan pendapatan bagi anggota, serta seiring waktu kepada masyarakat secara luas.</p>

Menelusuri tujuan aksi kolektif berdasarkan perspektif anggota: kami bertanya motivasi mengapa mereka bergabung, lalu berpartisipasi. Dari seluruh contoh aksi kolektif selain Posko, mayoritas anggota aksi kolektif didorong oleh keinginan untuk meningkatkan interaksi sosial atau meningkatkan keterampilan dan kapasitas diri mereka. Para anggota Posko umumnya menyatakan termotivasi oleh keinginan untuk terlibat dalam advokasi isu-isu tertentu, yang dalam hal ini adalah menghapuskan dan merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.



Gambar 4. Motivasi awal para anggota yang disurvei untuk bergabung dan berpartisipasi dalam aksi kolektif perempuan



Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Jawaban boleh lebih dari satu.

## Siapa saja anggota aksi kolektif perempuan?

Tabel 4 merangkum profil anggota utama setiap kelompok yang diteliti. Secara garis besar, terdapat tiga jenis anggota:

- Aksi kolektif perempuan dengan anggota yang mencerminkan penargetan atau pemrioritasan kepada perempuan miskin atau termarginalkan (BSA, Serikat PEKKA, Perempuan Pekerja Rumahan, MUIWO). Pada contoh-contoh ini, para anggota terutama terlibat dalam inisiatif pengembangan ekonomi, pengembangan keterampilan, dan peningkatan akses kepada layanan, khususnya terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
- Anggota yang beragam dengan partisipasi lebih banyak dari kalangan elit, sementara dari kalangan miskin relatif lebih rendah (Sekolah Perempuan, Balai Perempuan). Pada contoh-contoh ini, kegiatan lebih difokuskan untuk mempromosikan partisipasi anggota dalam hal pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pengaruh.
- Perekrutan anggota yang difokuskan pada kalangan elit, dimana para anggota lebih berperan sebagai penyedia layanan, yang menjangkau kelompok perempuan miskin, rentan, atau termarginalkan (Posko, Community Center).

Tabel 4. Karakteristik anggota aksi kolektif perempuan di lokasi studi lapangan

Contoh	Anggota kelompok
Balai Sakinah 'Aisyiyah	Secara tradisional, anggota berasal dari anggota perempuan Muhammadiyah, namun beberapa anggota juga berasal dari Nahdlatul Ulama. Prioritas kegiatan secara terbuka difokuskan pada perempuan rentan, khususnya perempuan miskin.
Serikat PEKKA	Terutama terdiri dari perempuan kepala rumah tangga, khususnya janda dan janda cerai, namun juga terdiri dari perempuan menikah.
Balai Perempuan	Tidak ada kelompok spesifik. Para anggota juga berasal dari PKK, kader organisasi lain dan lembaga desa.

Contoh	Anggota kelompok
Sekolah Perempuan	Perempuan, tidak ada kelompok spesifik. Awalnya diprioritaskan untuk perempuan miskin, namun sekarang terbuka bagi semua. Keanggotaan lebih banyak berasal dari kalangan elit (anggota PKK, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat).
MUIWO	Pekerja migran perempuan yang sudah kembali
Kelompok Bunda Kreatif	Perempuan pekerja rumahan, ibu bekerja.
Posko Lestari / Posko Mentari	Tidak ada kelompok spesifik, namun di area yang dikunjungi, para pemimpin Posko adalah istri kepala desa, dan anggotanya lebih banyak dari kalangan elit (misalnya guru, tokoh agama, dan anggota PKK). Terdapat juga beberapa anggota laki-laki.
Community Center	Tidak ada kelompok spesifik, namun para anggota terdiri dari perwakilan dusun dan fasilitator yang seringkali menjalankan peran lain, seperti di PKK atau RT, dan karenanya dapat dianggap elit atau berpengaruh. Juga mengadakan forum laki-laki/suami.

Data demografi dasar dikumpulkan untuk para anggota dari delapan contoh aksi kolektif yang diteliti secara rinci. Data-data ini menunjukkan:

- Kelompok-kelompok tersebut mayoritas hanya beranggotakan perempuan
- Para anggota aksi kolektif umumnya berusia 30 dan 40-an, dengan Serikat PEKKA yang memiliki anggota yang rata-rata lebih tua (usia 50-an).
- Mayoritas anggota aksi kolektif berpendidikan, kecuali anggota Serikat PEKKA yang hampir setengahnya tidak berpendidikan. Para anggota Balai Perempuan dan Posko memiliki latar belakang pendidikan tertinggi, dengan hampir seperempatnya (Balai Perempuan) dan sepertiganya (Posko) adalah lulusan perguruan tinggi.
- Hanya lima dari 169 anggota yang disurvei memiliki anggota keluarga dengan disabilitas.
- Mayoritas sudah menikah dan tinggal dengan pasangan - kecuali Serikat PEKKA, yang anggota sasaran terutama memang perempuan kepala rumah tangga, umumnya adalah janda dan janda cerai.
- Lebih dari 80 persen anggota Serikat PEKKA, Balai Perempuan, dan Kelompok Bunda Kreatif (seluruh anggotanya) adalah pekerja penuh waktu atau paruh waktu, sementara anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah cenderung tidak bekerja yang berbayar (84 persen).

Data demografis lebih rinci dapat dilihat pada studi kasus pada Bagian 3.

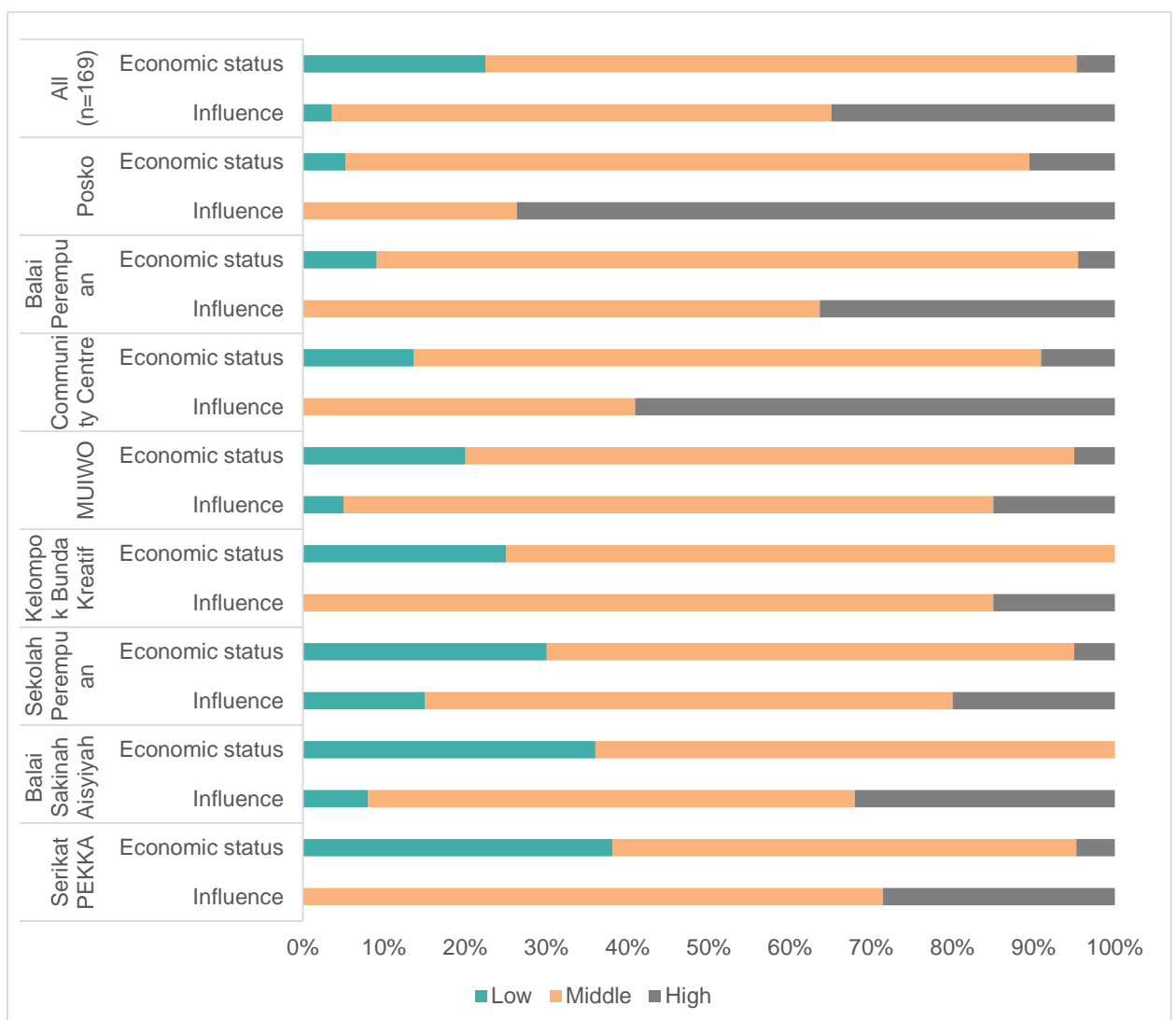
Keanggotaan aksi kolektif dipengaruhi oleh jaringan para anggota yang sudah ada (yang mengundang teman dan keluarga mereka) dan kader (yang mencari calon anggota berdasarkan kriteria tertentu). Karenanya, keterlibatan perempuan yang relatif miskin secara ekonomi dan perempuan secara umum cenderung bercampur, yang diperlihatkan pada Gambar 5.

Gambar 5 menunjukkan jawaban terhadap dua pertanyaan yang ditanyakan didalam survei anggota kolektif: (i) terkait status ekonomi, apakah anggota merasa bahwa status ekonomi keluarga mereka dibawah, diatas, atau rata-rata desa, dan (2) apakah anggota merasa keluarga mereka termasuk didalam kelompok pengambil keputusan di desa (berpengaruh tinggi), dikelompok 'biasa' (menengah), atau dikelompok marjinal atau minoritas (berpengaruh rendah). Beberapa contoh, khususnya Posko, Community Center, dan Balai Perempuan jelas melibatkan lebih banyak perempuan yang berpengaruh atau berkondisi ekonomi lebih baik daripada rata-rata masyarakat di desa mereka. Serikat PEKKA dan BSA sengaja menarget perempuan miskin atau

termarginalkan. Menariknya, tidak tampak hubungan yang jelas antara persepsi diri mereka atas status ekonomi mereka dengan pengaruh yang dimiliki.

Juga tidak ada hubungan yang jelas antara persepsi diri tentang status pendapatan rendah, dengan pengakuan formal status kemiskinan yang ditunjukkan pada kartu perlindungan sosial.<sup>10</sup> Sejumlah 58 persen anggota Posko dan 50 persen anggota Community Center yang disurvei melaporkan memiliki kartu perlindungan sosial, dibandingkan dengan hanya 32 persen anggota BSA dan 33 persen anggota Serikat PEKKA. Salah satu penjelasan yang mungkin atas tidak konsistennya hubungan keduanya adalah anggota kelompok ini memiliki koneksi yang lebih baik, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan. Rumah tangga yang memandang diri mereka miskin lebih mungkin memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa, yang menunjukkan SKTM lebih mudah untuk diperoleh.

Gambar 5. Persepsi anggota yang disurvei tentang status rumah tangga mereka dibandingkan dengan rumah tangga lain di desa lokasi studi lapangan



Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (N=169).

<sup>10</sup>Kartu perlindungan sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada rumah tangga yang diidentifikasi masuk ke dalam kategori kemiskinan membuat rumah tangga tersebut dapat menerima berbagai bentuk bantuan sosial, seperti Raskin, bantuan tunai bersyarat (PKH) dan bantuan tunai tanpa syarat, serta asuransi kesehatan bagi kelompok miskin. Karenanya, kartu perlindungan sosial menunjukkan bukti bahwa suatu rumah tangga diakui secara formal sebagai rumah tangga miskin.

## Modus operasi

### KEPEMIMPINAN DAN TATA KELOLA

Seluruh proses pengumpulan data menunjukkan temuan yang konsisten - yaitu bahwa aksi kolektif terkait para mitra MAMPU hampir selalu beroperasi di dalam suatu struktur kelompok formal. Tim peneliti mengamati adanya tingkat formalitas dan fluiditas anggota yang beragam, yang didalam beberapa kasus menunjukkan pendekatan yang cenderung 'bagaimana nanti'.

Survei dan wawancara terhadap fasilitator menunjukkan bahwa umumnya, tata kelola di tingkat internal terdiri dari struktur seperti koordinator atau kepala, sekretaris atau deputy, dan bendahara. Bercermin pada tipologi yang dijelaskan pada halaman 11, responden survei fasilitator dari PEKKA, 'Aisyiyah dan Koalisi Perempuan Indonesia menyoroti struktur bertahap ketingkat daerah. Beberapa mitra nasional juga disebutkan memiliki koordinator divisi atau seksi sesuai dengan area tematik atau teknis (Koalisi Perempuan Indonesia, PEKKA, Permampu, Yasanti, Migrant CARE).

Terdapat beberapa contoh, meskipun sedikit, tentang bagaimana kelompok aksi kolektif diformalisasi melalui pendaftaran di tingkat desa, serta proses lainnya, yang memudahkan mereka mengakses program pemerintah. Misalnya, Posko di Desa Arakan (Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, terkait dengan FPL-DPN/Komnas Perempuan) diformalisasi ke dalam struktur pemerintah desa melalui Peraturan Desa pada Oktober 2015 (lihat kotak di kanan). Para pemimpin Kelompok Bunda Kreatif melaporkan bahwa pertemuan dan interaksi mereka dengan MAMPU membuat mereka menyadari bahwa mengakses dana pemerintah adalah sesuatu yang mungkin, dan melaporkan bahwa '*sekarang kami sudah berani memformalkan kelompok kami sehingga kami bisa mengakses program-program pemerintah*'.<sup>11</sup> KPS2K di Gresik, Jawa Timur, mendiskusikan tentang dibutuhkannya Peraturan Desa agar dapat mendanai Sekolah Perempuan Hebat, namun 'Sekolah Perempuan Hebat tidak bisa diformalisasi sebagai lembaga desa karena adanya PKK'.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan adanya persepsi bahwa ada hambatan regulasi dalam mengakses pendanaan.<sup>13</sup>

Meskipun struktur tata kelola kelompok di daerah cenderung mengikuti mitra nasional, penelitian lapangan menunjukkan adanya berbagai model dan gaya kepemimpinan diantara para kelompok

#### Pendekatan terstruktur dalam pembentukan kelompok: Serikat PEKKA

Kelompok Serikat PEKKA memiliki struktur kepala, bendahara, dan sekretaris administratif standar disetiap tingkatan, dan mayoritas kelompok mereka memiliki daftar anggota.

Para staf administratif umumnya dilatih oleh Sekretariat Nasional PEKKA terkait area-area inti seperti keterampilan paralegal dan hukum, serta pembukuan. Mereka juga dapat berpartisipasi didalam pelatihan tematik seperti tentang kesehatan reproduksi maupun permakultur. Para staf administratif ini kemudian menyebarkan isi pelatihan yang mereka dapatkan kepada para anggota Serikat PEKKA lain dalam pertemuan kelompok.

#### Memformalkan keanggotaan aksi kolektif untuk legitimasi dan perlindungan: Posko, Sulawesi Selatan

Posko dengan dukungan Swara Parangpuan yang merupakan salah satu anggota Forum Pengada Layanan - Komnas Perempuan, mengintervensi dan memberikan bantuan layanan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terdapat dua Posko dalam penelitian ini yang telah diformalkan melalui Peraturan Desa. Posko Mentari nama-nama anggota inti telah diformalkan oleh Peraturan Desa, sementara anggota-anggota Posko Lestari diberikan kartu anggota resmi. Dalam kedua kasus tersebut, formalisasi dimaksudkan untuk menguatkan dan menegaskan kewenangan para anggotanya untuk bertindak pada saat situasi yang kadang bersifat konfrontatif dan sensitif.

<sup>11</sup>Sekretaris Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>12</sup>Perwakilan manajemen KPS2K, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016

<sup>13</sup>Hal ini memerlukan analisis lebih lanjut dan lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang Desa (No 6 of 2014), dana untuk kegiatan seperti di atas boleh menggunakan dana desa. Kesalahpahaman/misinformasi pada peraturan kabupaten atau desa kadang menyebabkan kelonggaran ini tidak dipahami.

ini. Bahkan pada beberapa organisasi yang terhubung dengan mitra nasional yang sama, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang digambarkan bersifat sangat langsung. Sebagai contoh adalah '*Pemimpin BSA memutuskan (apa fokus kelompok)*'. Misalnya, bulan ini fokusnya pada pelatihan keterampilan, bulan depan pengajian'.<sup>14</sup> Sedangkan Posko, Community Center, dan Balai Perempuan merekrut perempuan yang lebih berpengalaman dan dari kalangan elit. Hubungan orang-orang ini dengan struktur lain, seperti RT/RW, masyarakat sipil lokal, birokrat dan perwakilan politik menjadi bagian dari strategi pelaksanaannya. Hanya satu kasus dalam studi lapangan yang menunjukkan adanya *elite capture* (kooptasi oleh elit), yaitu dominasi satu pemimpin perempuan yang menempatkan anggota keluarganya pada posisi-posisi penting.

## APA YANG DILAKUKAN KELOMPOK AKSI KOLEKTIF?

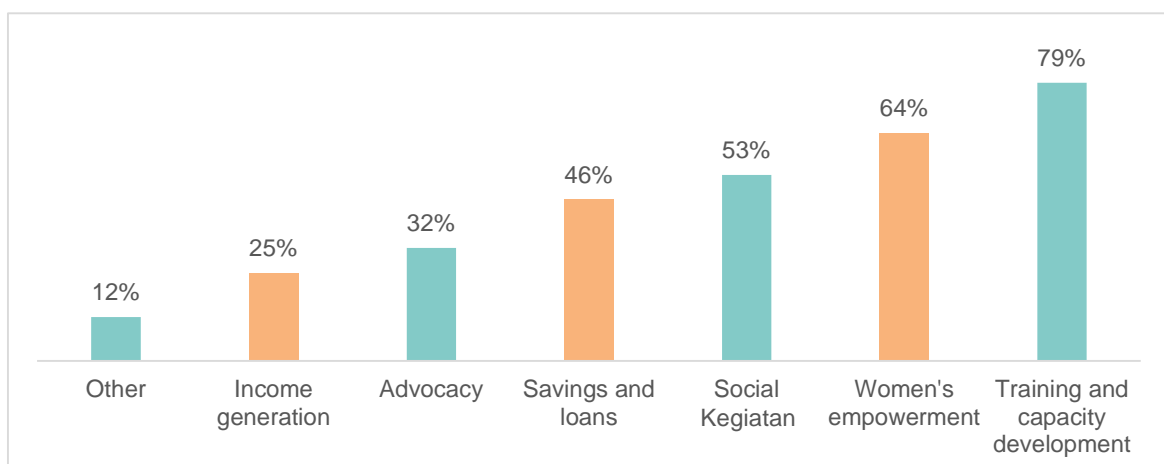
Kelompok aksi kolektif menjadi lokus dari berbagai kegiatan. Mayoritas anggota yang disurvei melaporkan bahwa mereka rata-rata berpartisipasi dalam satu kegiatan setiap bulannya, dalam beberapa kasus bahkan mereka aktif lebih dari satu kegiatan. Sejalan dengan motivasi yang dinyatakan oleh para anggota kelompok, kegiatan pelatihan dan pembangunan kapasitas tampak sebagai kegiatan yang paling umum diikuti para anggota (lihat Gambar 6). Selain itu, terdapat juga berbagai kegiatan terkait pelaksanaan pemberdayaan perempuan diberbagai contoh yang ditemukan.

### Apa yang dilakukan kelompok aksi kolektif? Contoh pada Balai Sakinah 'Aisyiyah

Kelompok-kelompok BSA mengadakan pertemuan rutin per bulan, dimana anggota diharapkan menyumbang ide topik yang akan didiskusikan. Selain itu terdapat pula kegiatan pelatihan, kegiatan deteksi kanker, kegiatan sosial, acara keagamaan seperti pengajian, serta acara-acara peringatan.

Para anggota juga melakukan pelayanan sosial, termasuk kunjungan ke penjara, rumah sakit, panti asuhan, dan pesantren. Pengembangan keterampilan terkait penciptaan pendapatan juga diberikan oleh Bina Usaha Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA). Produk-produk yang dihasilkan oleh anggota BSA dijual melalui Sekretariat BUEKA, kantor 'Aisyiyah, warung, bazar, dan pameran, serta dipromosikan melalui halaman Facebook 'Aisyiyah.

Gambar 6. Proporsi anggota aksi kolektif yang disurvei yang melaporkan berpartisipasi di dalam berbagai jenis kegiatan pada tiga bulan terakhir



Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Jawaban boleh lebih dari satu.

<sup>14</sup>Perwakilan manajemen Departemen 'Aisyiyah untuk perekonomian keluarga (*Bina Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA)*), wawancara mendalam, Pangkep, September 2016



## PENDEKATAN PELIBATAN

Kami menelusuri apakah modus operasi untuk setiap contoh aksi kolektif bersifat lebih kolaboratif atau kombatif dalam hal interaksinya dengan pemangku kepentingan secara luas, seperti para pemimpin desa, masyarakat sipil, penyedia layanan, dan lembaga pemerintah. Seluruh contoh yang ditemukan menunjukkan bahwa mayoritas menerapkan pendekatan kolaboratif. Namun tentu saja terdapat spektrum yang luas dari pendekatan yang dilakukan, dari bekerja erat dengan bidang keagamaan dan budaya (seperti Balai Sakinah 'Aisyiyah) hingga pendekatan yang lebih berorientasi kepemimpinan feminis atau hak asasi manusia perempuan (Balai Perempuan dan lainnya).

Kolaborasi dengan pihak lain dipandang sebagai pendekatan yang diperlukan, karena 'kita tidak bisa melakukannya sendiri'.<sup>15</sup> *Kelompok-kelompok tersebut juga mengakui bahwa dukungan tambahan selalu bermanfaat, khususnya ketika bekerja untuk isu-isu sensitif, seperti kesehatan seksual dan reproduksi:*

Secara logis, kita perlu mendekati para tokoh agama, polisi, dinas pendidikan... Saya mengumpulkan mereka semua untuk duduk bersama... Kemudian kami menjelaskan masalah, kebutuhan, dan tantangan yang kami hadapi. Akhirnya mereka semua bersedia untuk membantu. Jadi, guru dan masyarakat juga mendukung kami, karena para pemimpin mereka pun juga sudah mendukung kami.<sup>16</sup>

Menanggapi kasus kekerasan:

Terkadang kami melakukan mediasi dengan pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan di desa.... sehingga ketika mereka (pelaku kekerasan) membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, biasanya mereka benar-benar menepatinya, karena mereka membuat pernyataan tersebut di depan kepala desa dengan disaksikan oleh kami.<sup>17</sup>

Seluruh contoh aksi kolektif menggunakan birokrasi, sementara yang lain (khususnya Balai Perempuan dan Posko) menggunakan jalur pelibatan politik di luar desa sebagai strategi mereka. Contoh ini dapat dilihat dari Swara Parangpuan, yang berperan sebagai perantara bagi Posko, yang menjelaskan evolusi mereka sebagai berikut:

Meskipun kami tetap berfokus membantu perempuan, kami berpikir perlu mengubah kebijakan... Kami bukan lagi seperti pemadam kebakaran, namun kami sekarang berusaha mencari akar masalah, yang ternyata adalah kebijakannya. Jadi kami mendekati [para pembuat kebijakan] untuk mengakomodasi dan memasukkan

### Anggota aksi kolektif yang berada di posisi berpengaruh: Balai Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia

Balai Perempuan menarik perempuan yang tertarik membangun hubungan dengan pihak lain dan mempromosikan kesetaraan gender. Para anggota yang disurvei berasal dari latar pendidikan relatif tinggi, khususnya dibandingkan dengan para anggota aksi kolektif lain yang diteliti. Sepertiga dari mereka menyatakan keluarga mereka cukup berpengaruh di masyarakat mereka.

Koalisi Perempuan Indonesia bertujuan untuk bekerja dengan orang-orang berpengaruh dan mendorong atau mendukung terciptanya lingkungan yang akomodatif terhadap kesetaraan gender yang lebih besar. Salah satu kader KPI senior menyatakan:

Sekarang saya telah menjadi bagian dari pemerintah lokal, [dan terlibat dalam] menyusun kebijakan anggaran... Ketika saya menjadi pejabat, saya juga tetap menjadi kader KPI, dan [mindset] ini tidak bisa dipisahkan...

Keberhasilan para kader Balai Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia bergantung pada hubungan dan jaringan mereka. Beberapa diantaranya sejak awal merupakan, atau belakangan terpilih menjadi ketua RT dan dusun. Sementara lainnya menjadi staf dan manajemen di berbagai organisasi masyarakat sipil atau lembaga pemerintah terkait, dan terlibat di dalam kelompok konstituen atau lembaga profesional di Kota Parepare. Banyak juga yang terlibat di dalam berbagai kegiatan.

<sup>15</sup> Fasilitator KPI, wawancara kelompok, Parepare, September 2016

<sup>16</sup> Manajer Program, APM Permampu, wawancara mendalam, Jambi, Oktober 2016

<sup>17</sup> Mantan anggota, Posko Lestari - Desa Arakan, wawancara mendalam, Pungkol, Minahasa Selatan, Oktober 2016

pemberdayaan perempuan kedalam kebijakan-kebijakan daerah... Kami memposisikan orang-orang kami untuk siap berhadapan dengan para pembuat kebijakan. Kami melakukan hal tersebut pada masa kampanye [pemilu], dan tidak hanya kepada para anggota DPR, tapi juga kepada panitia Pemilu, sehingga kami menempatkan orang-orang kami, yaitu perempuan yang telah kami siapkan di Komisi Pemilihan Umum di tingkat kabupaten, kota dan provinsi... Yang menarik adalah, sekarang justru kami selalu direkomendasikan oleh banyak partai. Jika Anda ingin mencari kandidat perempuan yang potensial, maka Anda bisa mencarinya di Swara Parangpuan.

Gerakan ini juga merupakan gerakan yang resmi. Kepala desa merasa bahwa isu-isu perempuan dapat ditangani oleh Posko. Terkait perubahan kebijakan, dulu perjuangannya belum berjalan bersama-sama dengan pemerintah. Kami selalu mengkritik mereka, dan tidak ada perubahan apapun. Kemudian, kami mencoba pendekatan yang berbeda, dan menemukan bahwa pemerintah memang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena itu kami memberikan mereka informasi dan masukan yang relevan terkait kebijakan apa yang harus diubah.<sup>18</sup>

Poin terakhir yaitu penyediaan informasi, yang secara lebih khusus adalah pengumpulan dan penggunaan data, dinyatakan sebagai modus operasi yang penting dalam berbagai bentuk aksi kolektif lainnya. Hal ini mencakup berbagai hal, mulai dari mendapatkan data yang lebih baik untuk mengidentifikasi populasi sasaran dan kebutuhan mereka, hingga calon anggota kelompok potensial (MUIWO - pekerja migran, dan Kelompok Bunda Kreatif - pekerja rumahan), untuk memetakan isu-isu yang relevan (insiden kekerasan - Posko); kebutuhan layanan, seperti identitas hukum atau perlindungan sosial dan kartu jaminan kesehatan (Sekolah Perempuan, Serikat PEKKA, Balai Perempuan), dan kondisi umum (Sekolah Perempuan, Serikat PEKKA):

Para staf kantor desa, khususnya saya, sangat bangga dengan teman-teman dari Sekolah Perempuan karena mereka menjalankan kegiatan-kegiatan desa...terdapat kegiatan pemetaan partisipatif - dalam istilah mereka - untuk mengembangkan profil desa... mengambil data langsung dari masyarakat, dan tidak berdasarkan rumor... Para pihak yang diundang saat itu adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), pemerintah desa dan pejabat desa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Perwakilan manajemen Swara Perempuan, Program Mampu, wawancara kelompok, Minahasa Selatan, Oktober 2016

<sup>19</sup> Kepala Urusan Desa (Kaur Umum Desa), wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

## PERAN PERANTARA - PENDUKUNG, DAN SEBAGAI BAGIAN DARI AKSI KOLEKTIF

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah peran penting yang dimainkan oleh para perantara dalam membentuk, mendukung, dan mengangkat suara dari aksi kolektif perempuan lokal. Kami mendefinisikan perantara sebagai entitas yang beroperasi diantara kelompok aksi kolektif tingkat desa dengan mitra nasional.

Siapa atau apa yang memainkan peranan sebagai perantara ditentukan terutama oleh jenis hubungan antara mitra nasional dan kelompok aksi kolektif sebagaimana digambarkan pada halaman 14 dan juga kebijakan anggaran mitra nasional.<sup>20</sup> Untuk organisasi-organisasi dengan struktur vertikal multi-tingkatan (hubungan Tipe A), perantara utama adalah entitas di tingkat atas hierarki, dimana para anggotanya memiliki pengalaman dan pelatihan yang tinggi dan ditugaskan untuk menjalankan peran pengawasan dan pendukung. Dalam contoh-contoh ini, para perantara membuat penahapan pendekatan dan filosofi mitra nasional melalui tingkat desa, misalnya:

- Serikat PEKKA Desa mendukung kelompok dusun; Serikat PEKKA Kecamatan mendukung kelompok desa, dan seterusnya. Dukungan teknis lain, seperti pelatihan disediakan oleh fasilitator lapangan PEKKA yang berbasis di kabupaten, maupun melalui Sekretariat Nasional PEKKA.
- Balai Perempuan didukung oleh struktur Koalisi Perempuan Indonesia, termasuk oleh perwakilan yang dipilih dari pusat di sekretariat cabang kabupaten. Perwakilan ini memberikan pembangunan kapasitas bertahap untuk para kader Balai Perempuan, yang membantu dengan manajemen program, menjembatani komunikasi antara lokal dan pusat, dan memberikan masukan dalam diskusi kebijakan yang dapat diinisiasi ditingkat lokal maupun nasional. Mereka juga berhubungan

### Ketika kepentingan tidak sejalan: Tantangan bagi perantara

Social Analysis Research Institute (SARI) adalah bagian dari jaringan Migrant Care yang mengadvokasi peraturan untuk perlindungan pekerja migran. SARI juga mendukung kelompok pekerja migran yang sudah kembali maupun calon pekerja migran lokal di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. SARI bertindak sebagai perantara antara kelompok-kelompok tersebut dengan Migrant Care.

SARI melakukan pertemuan mentoring bulanan dengan kelompok pekerja migran, termasuk Migrant United Indonesia Wonosobo (MUIWO), yang menjadi salah satu studi kasus dalam penelitian ini. Pertemuan-pertemuan ini digunakan untuk mendiskusikan pengembangan peraturan pekerja migran lokal, dan membangun kesadaran peraturan lokal dan migrasi aman, agen, dan berbagai prosedur lainnya. SARI mengorganisasi advokasi dan masyarakat dalam bentuk pemberian pelatihan dan lokakarya, dan juga jaringan dengan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas dukungan dan perlindungan untuk pekerja migran.

MUIWO juga menyoroti adanya potensi tantangan ketika seluruh bagian rantai nilai aksi kolektif lokal, sub-mitra perantara, dan mitra nasional tidak sepenuhnya sejalan.

Contohnya, sempat terjadi ketegangan ketika para pemimpin dan anggota MUIWO menginginkan fokus yang lebih besar pada pemenuhan kebutuhan pendapatan mereka, dan bukan pada advokasi perubahan dalam lingkungan peraturan terkait pekerja migran dan penyedia layanan yang menjadi prioritas SARI dan Migrant Care.

SARI harus mengakui dan mendukung keinginan untuk mengadakan kegiatan untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan peluang ekonomi lainnya. Di saat yang sama, SARI juga bekerja untuk membuat kelompoknya lebih terbuka dan memperkenalkan ideologi gerakan perempuan ke dalam cara operasional kelompok, sebagaimana dinyatakan oleh Manajer Program SARI:

“Saya ingin kelompok ini menjadi kelompok penekan, yaitu kelompok pekerja migran yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, yang mampu secara aktif membantu sosialisasi, koordinasi migrasi aman, dan membantu kelompok bermasalah. Saya masih mencoba mempertahankan ideologi saya, namun [saya] tidak menutup fakta bahwa pencaharian juga dibutuhkan.”

SARI menjalankan peranan penting dalam membangun hubungan antara akar rumput dengan kebijakan tingkat tinggi. Meskipun anggota kelompoknya lebih berfokus pada keberlangsungan hidup sehari-hari, SARI tetap menjalankan advokasi atas nama mereka.

Contoh ini menunjukkan bahwa bagi sebagian perempuan, stabilitas ekonomi adalah prasyarat untuk menciptakan aksi kolektif yang lebih bersifat politis.

<sup>20</sup>Analisis anggaran program mitra nasional MAMPU menunjukkan organisasi-organisasi perantara tersebut.

dengan lembaga pemerintah terkait, atas nama, atau dengan kader Balai Perempuan.

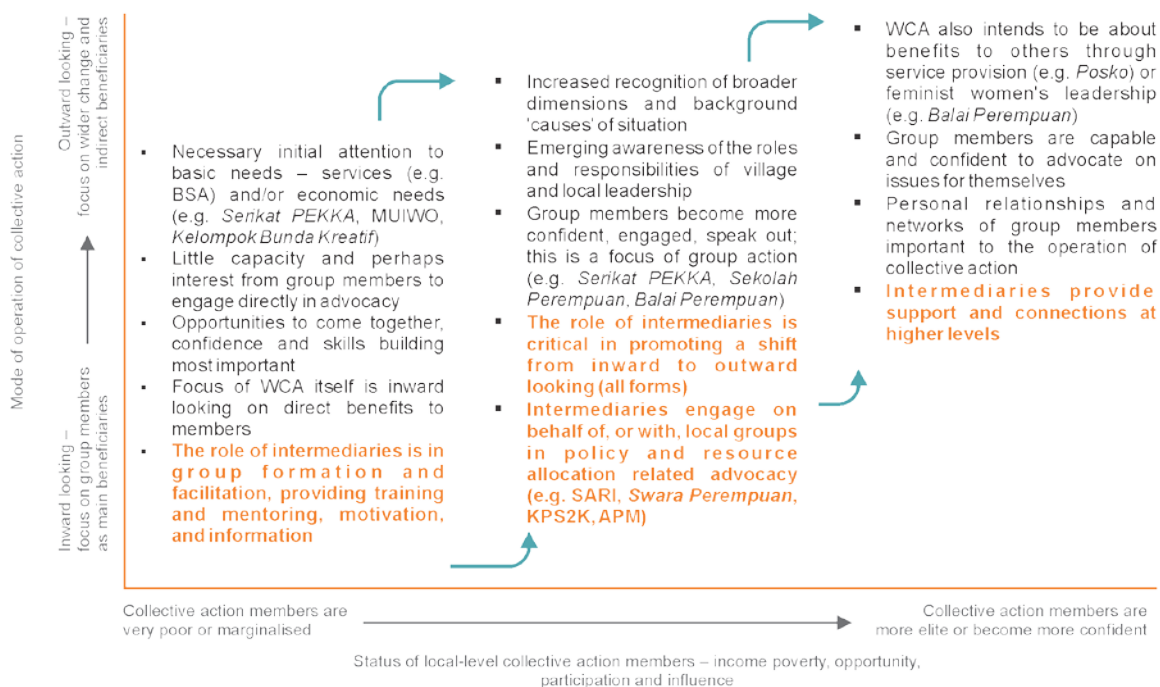
- 'Aisyiyah memiliki struktur dukungan serupa melalui Balai Sakinah 'Aisyiyah, namun bersifat lebih instruktif terhadap apa yang harus dilakukan kelompok, karena memang harus sejalan dengan program internal 'Aisyiyah.

Pada hubungan Tipe B (pelibatan sub-mitra) dan C (kegiatan multi-pemangku kepentingan), CSO lokal atau regional berperan sebagai perantara, dan cara-cara pelaksanaannya beragam disetiap sub-mitra. Dalam beberapa kasus, perantara menerapkan suatu metodologi atas nama mitra nasional. Misalnya Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) adalah anggota aliansi Kapal Perempuan, dan mengorganisasi pelaksanaan metodologi Sekolah Perempuan dari Kapal Perempuan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. KPS2K menerima dana dari dan melapor kepada Kapal Perempuan terkait kegiatan-kegiatan ini. KPS2K menjembatani komunikasi antara kelompok Kapal Perempuan dan Sekolah Perempuan, dan juga memfasilitasi hubungan antara kegiatan Sekolah Perempuan dengan desa, pemerintah kabupaten dan lembaga sektoral.

Dalam kasus lain, sub-mitra dan mitra nasional diselaraskan sesuai dengan kepentingan bersama, namun perantara menunjukkan independensi lebih besar dalam cara kerja mereka dengan aksi kolektif lokal (lihat contoh di dalam kotak tentang SARI dan MUIWO).

Tingkat dan sifat pelibatan perantara juga sangat dipengaruhi karakteristik para anggota aksi kolektif, meskipun karakteristik tersebut berubah dari waktu ke waktu, dan juga seiring dengan pengaruh dari aksi kolektif sendiri. Ketika aksi kolektif melibatkan perempuan yang memiliki sedikit keterlibatan dengan pemegang kekuasaan di desa dan di luar desa, perantara akan menjalankan peran ini dan mengadvokasi atas nama para anggota aksi kolektif, sambil berfokus pada bagaimana partisipasi didalam proses aksi kolektif atau kelompok dapat memberikan manfaat langsung kepada para anggotanya. Seiring dengan peningkatan kesadaran para anggota aksi kolektif tentang berbagai dimensi situasi mereka, perantara mulai lebih banyak mendampingi, bukan memimpin. Ketika para anggota aksi kolektif sudah memiliki keterampilan, percaya diri, dan terhubung dengan struktur kekuasaan, perantara bertindak sebagai mitra setara atau pendukung dari belakang. Proses ini digambarkan pada Gambar 7 di bawah.

Gambar 7. Peran perantara pada aksi kolektif tingkat lokal



Pada bagian tengah gambar 7, garis antara perantara dan aksi kolektif, khususnya terkait advokasi terlihat sangat kabur. Seringkali terjadi tumpang tindih keanggotaan antara aksi kolektif dengan perantara, atau fasilitator tingkat perantara bisa jadi diambil dari anggota kelompok. Beberapa perantara memiliki hubungan yang erat dengan desa, dan seringkali mengadvokasi pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya yang dilakukan oleh perantara atas nama, atau bersama-sama dengan, kelompok akar rumput.

Hubungan antara perantara atau mitra nasional dengan anggota aksi kolektif dapat mengalami ketegangan, khususnya ketika kepentingan terkait kebutuhan dasar anggota kelompok berbenturan dengan sudut pandang perantara maupun mitra nasional. Ketegangan ini disadari oleh SARI dalam kasus MUIWO, dimana para anggotanya lebih tertarik dengan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan, dibandingkan advokasi yang berfokus kepada kebijakan pekerja migran (lihat kotak pada halaman sebelumnya).

## HUBUNGAN DENGAN BENTUK AKSI KOLEKTIF EKSISTING (YANG SUDAH ADA)

Kami menemukan adanya hubungan antara strategi perekrutan dan sasaran aksi kolektif yang terkait dengan para mitra MAMPU, serta aksi kolektif yang telah lama ada maupun aksi kolektif yang mawujud dalam bentuk lainnya. Misalnya, Balai Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia sengaja merekrut banyak anggota perempuan dari berbagai peran dan koneksi, seperti dari staf kantor desa, Posyandu, keluarga berencana, atau kader CSO, serta calon anggota DPRD. Demikian pula, para anggota Posko yang berasal dari kalangan lebih elit, cenderung terlibat di dalam kegiatan kelompok lainnya. Perempuan dari latar belakang sosial-ekonomi miskin seperti anggota Serikat PEKKA cenderung belum pernah terlibat dalam organisasi kelompok ataupun kegiatan rutin yang berfokus pada perempuan.

Hubungan dengan bentuk aksi kolektif lain bisa terjadi lebih karena koneksi yang dimiliki masing-masing anggota, dan bukan karena memang ada kesepakatan resmi untuk bekerja bersama. Terdapat sejumlah contoh interaksi lintas-mitra di tingkat perantara. Misalnya, KPS2K melaporkan turut berpartisipasi didalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang

dikoordinasi oleh Komnas Perempuan; Aliansi Perempuan Merangin (Community Center) dan Koalisi Perempuan Indonesia (Balai Perempuan) dihubungkan melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput Jambi.

## HUBUNGAN DENGAN PKK

Era Reformasi pada era pasca-Suharto memungkinkan munculnya banyak upaya untuk mendemokratisasi PKK. Dalam teori, para pemimpin PKK sekarang dipilih, dan kepanjangan nama PKK kini telah diubah menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Namun pengaruh sejarah menyebabkan reformasi riil masih sulit dilakukan. PKK masih sangat reaktif pada pendanaan dari pemerintah, dan tidak proaktif dalam menjalankan agendanya. Programnya juga cenderung mencerminkan cara pandang sempit tentang peran perempuan sebagai istri dan ibu. PKK menerima alokasi dana (10-15 juta rupiah) dari dana desa, dan seringkali ini adalah satu-satunya alokasi untuk kelompok atau kegiatan perempuan. Tidak banyak inovasi atau perubahan riil yang tampak dari cara operasional PKK, dan posisinya terus menjadi bahan perdebatan di kalangan gerakan feminis.

Saat ini PKK beroperasi dari tingkat nasional ke tingkat desa, yang artinya ia memiliki potensi yang luar biasa. Karena sepanjang sejarahnya, PKK merupakan contoh aksi kolektif perempuan terbesar di Indonesia, kami secara khusus menelusuri hubungan di tingkat desa antara aksi kolektif perempuan yang terkait dengan MAMPU dan PKK.

Kami menemukan bahwa seluruh contoh aksi kolektif yang diteliti memiliki hubungan dengan PKK setempat. Minimal, dalam contoh Balai Sakinah 'Aisyiyah, hubungan ini terjadi berdasarkan kepentingan bersama terkait kesehatan reproduksi perempuan karena PKK menjalankan peran pengawasan atas Posyandu. Sekolah Perempuan, Kelompok Bunda Kreatif, Posko, MUIWO, Serikat PEKKA, dan Balai Perempuan melaporkan memiliki anggota yang juga merupakan anggota PKK. Hubungan tererat yaitu dengan Posko, kedua contoh yang ada (Posko Lestari dan Posko Mentari) yang dikunjungi memiliki banyak anggota dari berbagai latar belakang, termasuk peran pemimpin.

Di beberapa lokasi, PKK mengundang para perwakilan dari contoh aksi kolektif yang diteliti untuk melakukan presentasi dan berbagi informasi tentang sejumlah topik tertentu. Misalnya: para anggota Sekolah Perempuan Hebat diundang untuk berbagi informasi tentang deteksi kanker dini, Posko untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan MUIWO mengadakan diskusi tentang isu-isu pekerja migran. PKK menyatakan berminat untuk bermitra dengan Community Center untuk pemberian layanan, meskipun rincian dari kerja sama ini selain dalam bentuk pemberian layanan dari PKK melalui Community Center masih belum jelas.

Selain itu, ditemukan pula adanya semacam ketegangan antara aksi kolektif terkait MAMPU dengan PKK. Sekolah Perempuan disarankan agar tidak memformalkan keberadaannya sebagai entitas independen, dan direkomendasikan untuk bergabung sebagai bagian program PKK, namun:

Hal ini justru menciptakan masalah bagi kami. Pertimbangan kami adalah, jika Sekolah Perempuan menjadi bagian dari program PKK, secara ideologis saja sudah pasti berbeda. Kami tidak mau menjadi bagian dari organisasi yang sejak awal memosisikan dirinya di bawah laki-laki atau yang mengakui superioritas laki-laki di dalam keluarga atau masyarakat. Ideologinya sudah sangat berbeda. Alasan mengapa kami mendirikan Sekolah Perempuan adalah karena kami ingin perempuan lebih

memiliki otonomi atas tubuh mereka sendiri. Namun ideologi yang dipegang PKK adalah perempuan sebagai Konco Wingking.<sup>21</sup>

Anggota Kelompok Bunda Kreatif juga mendiskusikan berbagai karakteristik PKK: 'PKK lebih berfokus pada urusan rumah tangga, seperti mengurus anak, memasak, dan lainnya'<sup>22</sup>. *Namun menariknya, mereka mengamati bahwa perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan pekerja rumahan yang juga anggota PKK menjadi lebih kritis. Mereka tidak lagi hanya diam saja.* Mereka menjadi lebih berani menyampaikan pikiran-pikiran mereka.<sup>23</sup>

Selain itu juga terdapat sejumlah diskusi tentang lebih besarnya peluang untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif perempuan dibandingkan di PKK, termasuk peluang untuk menghadiri acara di luar desa. Para perantara MAMPU juga menawarkan pelatihan yang lebih beragam dan maju.

APM memberikan *briefing* kepada para perempuan yang duduk di BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau KAUR (Kepala Urusan Desa) tentang Undang-Undang Desa, menyusun RPJMDes, dan Peraturan Desa. Tidak ada pelatihan sejenis di PKK.<sup>24</sup>

Kemampuan PKK jelas jauh lebih terbatas:

Posko menangani isu-isu seperti KDRT, pelecehan anak, dan kehamilan di luar nikah. PKK diperkenalkan oleh Bupati, dan perannya terbatas pada pertemuan-pertemuan terkait kompetisi desa atau kesehatan.<sup>25</sup>

Cakupan PKK hanya di dalam desa, namun jangkauan kelompok kami mencapai kabupaten.<sup>26</sup>

Secara umum, aksi kolektif terkait MAMPU dan PKK memiliki identitas masing-masing. Mempertimbangkan beberapa responden yang bias, mengakomodasi pandangan para pemimpin desa dan pihak non-anggota aksi kolektif lainnya, aksi kolektif terkait MAMPU nampak lebih dinamis. Dalam hal inisiatif-inisiatif yang lebih berorientasi keluar (Balai Perempuan, Posko, Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, Community Center), aksi kolektif terkait MAMPU juga terhubung lebih baik dengan berbagai elemen di masyarakat. Tidak ada indikasi yang menunjukkan adanya kerja sama antara PKK dan kelompok aksi kolektif terkait MAMPU untuk membangun suara yang lebih kuat atau mengadvokasi kesetaraan atau mencapai hak asasi perempuan.

<sup>21</sup>Perwakilan manajemen KPS2K, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016 Konco Wingking adalah istilah dan konsep budaya Jawa yang digunakan untuk menggambarkan perempuan, yang berarti 'pengikut', 'teman belakang', atau 'teman di dapur'.

<sup>22</sup>Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup>Para fasilitator APM, wawancara kelompok, Merangin, Oktober 2016.

<sup>25</sup>Para suami anggota Posko Lestari, wawancara kelompok, Minahasa Selatan, Oktober 2016.

<sup>26</sup> Staf lapangan SARI, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016



## Partisipasi pada Aksi Kolektif - Dampak pada Aset Individu dan Kolektif

Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan berbagai hasil yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam aksi kolektif. Hasil-hasil yang dibahas terkait dengan lima jenis aset yang dinyatakan dalam kerangka pemberdayaan MAMPU.

Di seluruh contoh organisasi aksi kolektif yang diteliti, hanya lima dari 169 anggota kelompok yang disurvei merasa bahwa tidak ada dampak yang mereka rasakan dari berpartisipasi di dalam aksi kolektif. Sejumlah 12 anggota merasa merasakan dampak positif dan negatif, sementara 152 lainnya melaporkan hanya merasakan dampak positif.

### A. Aset Manusia (Kekuatan di dalam)

Aset individu atau manusia didalam kerangka pemberdayaan MAMPU mencakup perubahan kesehatan personal dan pendidikan, keterampilan dan pengetahuan, termasuk literasi, numerasi, pendapatan dan keterampilan untuk bekerja, serta rasa keyakinan diri dan percaya diri di tingkat individu. Bagi 69 persen anggota aksi kolektif yang disurvei, ini merupakan area perubahan yang paling dirasakan. Para anggota ditanya apakah mereka merasa mendapatkan manfaat pada diri mereka, seperti peningkatan rasa percaya diri, percaya diri, keterampilan, atau status kesehatan (dalam satu pertanyaan). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 8, hampir seluruh anggota aksi kolektif di semua contoh yang diteliti melaporkan adanya perubahan dalam ranah pemberdayaan ini.

Gambar 8. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif terkait aset manusia.

Balai Sakinah 'Aisyiyah	Posko	Sekolah Perempuan	Balai Perempuan	MUIWO	Serikat PEKKA	Community Center	Kelompok Bunda Kreatif	Seluruh contoh:
96%	84%	100%	95%	80%	100%	95%	100%	94%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Percaya diri yang didapatkan merupakan langkah awal yang penting bagi perempuan, khususnya yang berasal dari elemen masyarakat yang sangat marjinal. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu anggota Serikat PEKKA:

Awalnya saya takut bergabung dengan PEKKA, karena dulu perempuan dianggap tidak mampu. Dulu perempuan tidak dipercaya, khususnya janda. Kami ragu apakah kami bisa menjadi lebih baik dengan bergabung dengan kelompok PEKKA. Perempuan dulu selalu dipinggirkan, dan kemampuan kami selalu diremehkan. Saya bahkan dulu tidak pernah keluar rumah.<sup>27</sup>

Peningkatan rasa percaya diri sering disebutkan pada seluruh contoh aksi kolektif, namun peningkatan ini terasa paling signifikan pada perempuan yang sebelumnya lebih terisolasi, lalu berpartisipasi didalam program pengembangan pribadi seperti yang difasilitasi oleh Serikat PEKKA, Balai Perempuan, dan Sekolah Perempuan. Para anggota Serikat PEKKA menyatakan bahwa mereka *'dilatih secara pikiran tentang cara berbicara di depan umum, bagaimana kami bisa berjuang sendiri, dan bagaimana cara membantu masyarakat.'*<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Kader, Serikat PEKKA Sukerede, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016

<sup>28</sup> Kader, Serikat PEKKA Sukerede, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016



Sekolah Perempuan menggunakan berbagai alat (*tools*) termasuk tarian dan nyanyian untuk membangun percaya diri dan harga diri perempuan:

Dahulu para perempuan miskin yang sudah menikah tidak dianggap di masyarakat maupun di desa. Dengan menari, mereka menunjukkan keberadaan mereka. Menari juga mengajarkan mereka tentang keberanian, disiplin dan praktik, menghafal, bekerja sama, dan tentunya bersenang-senang. Semua itu adalah hal penting bagi mereka.<sup>29</sup>

Dari contoh Serikat PEKKA, Balai Perempuan, dan Sekolah Perempuan, tampak jelas bahwa metodologi program pengembangan pribadi yang terstruktur telah membantu membuat perempuan menciptakan hubungan antara perubahan kapasitas yang mereka alami dengan tekad mereka untuk melakukan perubahan atas situasi mereka. Contoh yang paling mencolok dari hal ini adalah perempuan dari Serikat PEKKA dan Sekolah Perempuan yang mulai berubah, sebelumnya mereka hanya tinggal di rumah menjadi terlibat dalam berbagai aksi:

Jika kita melihat dari luar, (para anggota) telah berubah secara drastis. Mereka yang dulunya takut, yang hanya diam di rumah, sekarang sudah menjadi lebih berani.<sup>30</sup>

Mereka yang sebelumnya tidak berani bicara sekarang menjadi lebih berani. Mereka yang sebelumnya tidak berani ke kantor desa karena malu, sekarang karena berbagai kegiatan di PEKKA, mereka sering datang ke kantor desa.<sup>31</sup>

Kami sebenarnya sangat takjub dengan perkembangan para perempuan yang berhasil mencapai semua yang mereka capai saat ini. Mereka sekarang sudah memahami beberapa konsep dasar gender - memahami bukan hanya sekadar menghafal. Mereka juga memahami mekanisme Gender-Watch (inisiatif Kapal Perempuan), memahami hak atas perlindungan sosial sebagai perempuan, mereka juga mengetahui bahwa kesehatan mereka adalah suatu hak, pendidikan adalah hak, dan mengetahui mekanisme untuk menuntut hak tersebut melalui negosiasi atau dengan datang langsung kepada para pembuat kebijakan untuk menuntut pemenuhan hak mereka. Semua perkembangan ini sangat menggembirakan. Dan semuanya dimulai dari menguatkan kepemimpinan perempuan, seperti membangun keberanian untuk berbicara di ruang publik. Itu bukan hal yang mudah.<sup>32</sup>

Balai Perempuan juga serupa, namun kebanyakan perempuan yang bergabung sudah memiliki percaya diri sejak awal dan sejarah bergabung dengan kegiatan kemasyarakatan sebelumnya.

Bagi anggota Community Center, percaya diri dikaitkan dengan peningkatan pengetahuan:

...sejak dia memahami hukum, peraturan dan sebagainya, dia tidak lagi ragu untuk berbicara;<sup>33</sup>

#### Dari termarginalkan menjadi sosok berpengaruh (*influencer*): Serikat PEKKA

Dengan berpartisipasi di Serikat PEKKA, banyak perempuan kepala rumah tangga dapat bersatu dan membangun kekuatan kolektif, yang dimulai dengan adanya kesempatan untuk berinteraksi sosial dan mendapatkan dukungan sejawat (*peer support*).

Inisiatif lokal yang bertujuan untuk membantu perempuan memenuhi kebutuhan ekonomi dasarnya, seperti melalui simpan pinjam dan akses kepada pinjaman (kredit) yang lebih besar, menjadi pintu masuk yang dibangun melalui pemberian informasi, pelatihan, dan membantu para perempuan untuk lebih berinteraksi dengan masyarakat luas melalui pertemuan besar PEKKA maupun pertukaran lainnya.

Hal ini membuat para anggota kemudian bekerja pada isu-isu yang menjangkau masyarakat secara luas (seperti akses kepada dokumen identitas hukum) yang darinya para kader Serikat PEKKA mendapatkan status dan legitimasi. Mereka mendapatkan percaya diri untuk bicara, dan mereka dipandang berkontribusi kepada desa; reaksi-reaksi positif terhadap kegiatan mereka semakin memperlancar perubahan ini. Keberhasilan mereka juga mendorong terjadinya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap perempuan kepala rumah tangga dibandingkan sebelumnya yang hanya sebagai kelompok termarginalkan.

<sup>29</sup>Perwakilan manajemen KPS2K, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016

<sup>30</sup>Perwakilan pemerintah desa, wawancara mendalam, Lingsar, Oktober 2016

<sup>31</sup>Ketua PKK, wawancara mendalam, Lingsar, Oktober 2016

<sup>32</sup>Perwakilan manajemen KPS2K, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016

<sup>33</sup>Suami seorang anggota Community Center, wawancara kelompok, Jambi, Oktober 2016

dan pemahaman mengenai tubuh mereka sendiri:

Saya dulu tidak tahu bagaimana menjawab ketika anak perempuan saya bertanya, 'Ibu, menstruasi itu apa, dan terjadinya bagaimana?' Saya benar-benar tidak bisa menjawab. Sekarang saya sudah bisa menjawabnya.<sup>34</sup>

Para anggota Balai Perempuan dan Posko mendapatkan keterampilan terkait cara menanggapi kasus kekerasan terhadap perempuan:

Ketika kami melihat ada tetangga yang dipukul oleh suami mereka, dulu kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dan harus melapor ke mana, namun sejak KPI ada, kami jadi tahu dan bisa melakukan sesuatu jika itu terjadi;<sup>35</sup>

... dulu kami takut dan patah semangat. Tapi sekarang, banyak dari kami sudah menjadi berani.<sup>36</sup>

Inisiatif 'sekolah perempuan' Yasanti dengan Kelompok Kreatif Bunda dan Kapal Perempuan dengan sub-mitra KPS2K tampak cukup berhasil membangun kesadaran kritis perempuan tentang gender, sebagaimana diperlihatkan dalam refleksi personal dari salah seorang peserta Sekolah Perempuan Hebat di gresik berikut:

Misalnya, suami tetangga saya sempat selingkuh. Saat itu yang saya salahkan adalah pihak istri, dan saya mengatakan ini terjadi karena dia tidak merawat dirinya... Padahal, yang salah adalah suaminya, kan? Tapi saya malah menyalahkan istrinya saat itu. Tapi sekarang tidak lagi. Contoh lain adalah kasus pemerkosaan. Sebenarnya, siapa yang salah dalam hal itu? Biasanya kita menyalahkan perempuan karena mengenakan rok mini, misalnya... Menurut saya, jika Anda mau memakai jilbab atau lainnya [itu hak Anda], tapi pihak laki-lakinya dalam hal ini yang melampaui batas... Sekarang kami tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi tentang isu-isu perempuan di desa kami. Sekarang kami sudah melihatnya dari kacamata yang berbeda. Jadi, saya merasa ini yang disebut sebagai 'bersikap kritis'.<sup>37</sup>

Untuk aksi kolektif yang lebih berfokus pada pengembangan pendapatan atau peluang ekonomi, termasuk kerja MUIWO, Serikat PEKKA dan Balai Sakinah 'Aisyiyah, perubahan pada aset manusia juga terkait dengan adanya keterampilan baru yang mereka dapatkan untuk membuat barang-barang tertentu:

Kami mendapatkan manfaat seperti peningkatan keterampilan dan pengetahuan pemasaran;<sup>38</sup>

Kami tidak tahu bagaimana cara membuat makanan dari ikan, kami dulu hanya tahu ikan itu untuk digoreng atau direbus; sekarang kami bisa membuat abon ikan... (sambil tertawa). Kami sekarang juga bisa membuat keripik pisang....nugget, dari tahu, jadi nugget tahu.

Perubahan dalam pendapatan yang disebabkan oleh keterampilan-keterampilan ini dibahas pada bagian berikut.

## B. Aset Keuangan dan Sumber Daya (Kendali)

Domain pemberdayaan ini di MAMPU merujuk pada peningkatan pendapatan dan tabungan, kemampuan untuk meminjam, mengakses pasar, meningkatkan masukan (*input*) produksi, termasuk peralatan dan perlengkapan. Namun tidak banyak mitra MAMPU yang berinvestasi di

<sup>34</sup>Guru bimbingan dan konseling, wawancara mendalam, Jambi, Oktober 2016

<sup>35</sup>Anggota, Balai Perempuan Labukkang, wawancara kelompok, Parepare, September 2016.

<sup>36</sup>Non-anggota, Posko Lestari - Desa Arakan, wawancara mendalam, Pungkol, Minahasa Selatan, Oktober 2016

<sup>37</sup>Koordinator Desa, *Sekolah Perempuan Hebat* Kesamben Kulon, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016

<sup>38</sup>Pemimpin Buruh Migran Indonesia, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016

dalam bidang ini, yang tercermin dari relatif sedikitnya para anggota aksi kolektif yang melaporkan adanya perubahan di area ini (Gambar 9). Para anggota ditanya apakah mereka merasa telah menerima manfaat keuangan seperti peningkatan pendapatan, kemampuan untuk menabung dan meminjam, peningkatan akses kepada pasar, atau pendampingan terkait masukan dan aset produktif (di dalam satu pertanyaan).

Gambar 9. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif terkait aset keuangan dan sumber daya.

Balai Sakinah 'Aisyiyah	Posko	Sekolah Perempuan	Balai Perempuan	MUIWO	Serikat PEKKA	Community Center	Kelompok Bunda Kreatif	Seluruh contoh:
12%	5%	5%	27%	25%	100%	0%	50%	28%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Dari sekian banyak kelompok yang disurvei, sangat sedikit yang dapat mengakses dukungan keuangan dari desa, misalnya terkait pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja untuk para anggota Kelompok Kreatif Bunda,<sup>39</sup> anggaran untuk peralatan kantor maupun kebutuhan organisasional lainnya bagi MUIWO.<sup>40</sup> Namun sebagian besar kelompok tersebut tetap optimis bahwa mereka akan mendapatkan dukungan yang lebih nyata. Posko dan MUIWO berharap mendapatkan dana dari dana desa 2017.

MUIWO, Sekolah Perempuan, dan Balai Sakinah 'Aisyiyah cukup memiliki perhatian pada pengembangan keterampilan terkait pendapatan, dan Kelompok Kreatif Bunda dan MUIWO juga turut berupaya menciptakan peluang kerja, namun hanya Serikat PEKKA yang memiliki perhatian pada pembangunan aset keuangan dan sumber daya sebagai strategi inti mereka. PEKKA menyadari bahwa prioritas utama para calon anggota kelompok seringkali adalah status ekonomi mereka, sehingga memulai dengan menjalankan kegiatan simpan pinjam sebagai pintu masuk. Kegiatan simpan pinjam memotivasi dan menarik banyak anggota kelompok, baik melalui dimensi produktif maupun protektif. Setiap anggota datang untuk menabung uang mereka, dan kelompok tersebut memutar tabungan tersebut sebagai pinjaman bagi para anggotanya untuk mengembangkan kegiatan produktif. Kelompok tersebut juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi para anggotanya, untuk membantu mereka menghadapi krisis seperti kematian atau penyakit:

Selain tabungan wajib, tabungan inti dan tabungan sukarela, terdapat juga tunjangan kesehatan dan tunjangan kesehatan. Para anggota dapat berkontribusi sebesar 25.000 rupiah per tahun untuk tunjangan kesehatan, 5.000 rupiah per tahun untuk tunjangan kematian. Jika terdapat anggota yang sakit, kami memberikan tunjangan kesehatan, separuh dari kelompok, separuh dari koperasi. Untuk tunjangan kematian, jika terdapat anggota yang meninggal dunia, kami memberikan 300.000 rupiah.<sup>41</sup>

Di masing-masing dari tiga wawancara kelompok dengan anggota Serikat PEKKA, perubahan yang dilaporkan terjadi adalah dalam hal inklusi keuangan, khususnya akses kredit:

Kami dulu takut meminjam uang, dan tidak ada juga yang percaya pada kami, khususnya karena kami janda. "Siapa yang nanti akan membayar hutangnya?" Tapi sebagai kelompok, kami bisa meminjam... Awalnya kami meminjam 100.000 rupiah, lalu 200.000. Kemudian setelahnya kami bergabung dengan koperasi, lalu kami bisa

<sup>39</sup>Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016.

<sup>40</sup>Pendiri Buruh Migran Indonesia, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016. Salah satu anggota kelompok melaporkan bahwa proposalnya berisi permohonan dana sebesar 10 juta rupiah untuk bahan membuat batik, tapi yang diberikan hanya 500.000 rupiah untuk peralatan kantor (wawancara kelompok, Wonosobo, Oktober 2016).

<sup>41</sup>Kader, Serikat PEKKA Kecamatan Lingsar, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016

meminjam 500.000. Seiring waktu, kami bisa meminjam lima sampai enam juta rupiah. Kami menggunakan uangnya untuk beternak ikan, membeli bibit, dan pakan.<sup>42</sup>

Kekuatan kelompok sengaja ditegaskan pada kutipan diatas, karena ia menunjukkan terjadinya pemberdayaan kolektif dan bukan sekadar pribadi. Ini merupakan salah satu contoh yang jelas tentang pemberdayaan kolektif yang diidentifikasi penelitian ini. Selain itu, terdapat pula berbagai contoh kecil tentang pemberdayaan keuangan kolektif yang ditemukan dalam penelitian ini:

- Kelompok Kreatif Bunda juga menerapkan inisiatif simpan pinjam;
- Balai Perempuan menerapkan sistem iuran anggota, dengan tabungan bersama yang bisa digunakan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan keuangan;
- Para anggota MUIWO juga menggunakan uang saku dan tunjangan transportasi mereka untuk menghadiri pertemuan atau pelatihan di luar desa untuk membentuk inisiatif simpan pinjam, yang ingin mereka lanjutkan jika berjalan lancar.

Tanpa penyelidikan lebih mendalam, sulit mengidentifikasi secara akurat dimana perubahan nyata dalam aset keuangan dan sumber daya terjadi, khususnya dalam bentuk peningkatan pendapatan, dan kenapa anggota dapat bersikap optimis. Misalnya, para anggota Sekolah Perempuan melaporkan bahwa *'kami juga sekarang belajar cara mengelola uang, kami membuat bank sampah bersama-sama, ya walaupun masih kecil, tapi siapa tahu di masa depan dia bisa menjadi tabungan kami untuk membuka usaha kecil-kecilan...'*<sup>43</sup> tapi manfaatnya masih belum tampak saat ini.

Berkaitan dengan Yasanti juga dikaitkan dengan pembukaan peluang pasar baru untuk para anggota Kelompok Bunda Kreatif.

Saat ini omzetnya sudah lebih besar... dan pasar kami bahkan telah mencapai Solo. Dulu kami hanya memasarkannya ke Prambanan, Malioboro, Beringharjo, dan tujuan wisata lainnya di Yogya.<sup>44</sup>

Namun peningkatan pendapatan tidak menjadi bagian yang diwawancarai dengan para anggota Kelompok Bunda Kreatif. Salah satu anggota menyatakan bahwa pelatihan wirausaha dibutuhkan karena mereka memerlukan kemampuan menetapkan harga penjualan yang menguntungkan.

Para anggota MUIWO dan pasangan mereka telah berpartisipasi diberbagai pelatihan keterampilan terkait penciptaan pendapatan, namun hasilnya beragam:

Dari batik kami belum mendapatkan pendapatan apapun. Kami hanya terus memproduksi, tapi belum ada yang laku terjual... Sejujurnya kami sudah kehabisan modal, dan kami butuh suntikan dana.<sup>45</sup>

Sebagaimana diakui oleh staf lapangan SARI, 'kalau hanya dengan pelatihan tidak akan efektif'<sup>46</sup>; hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengubah *'mindset'* agar tidak hanya berpikir tentang tunjangan, namun juga tindak lanjut seperti pemasaran...<sup>47</sup>

Infrastruktur 'Aisyiyah yang sudah ada, termasuk BUEKA (Badan Usaha Ekonomi Keluarga 'Aisyiyah) mendorong agar para anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah mendapatkan akses ke pasar untuk memasarkan kerajinan dan makanan olahan mereka, dan BUEKA melaporkan bahwa

<sup>42</sup> Kader, Serikat PEKKA Sukerede, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016.

<sup>43</sup> Anggota, Sekolah Perempuan Hebat, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016.

<sup>44</sup> Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016.

<sup>45</sup> Anggota, Buruh Migran Indonesia, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016.

<sup>46</sup> Staf lapangan SARI #1, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016

<sup>47</sup> Ibid.

terdapat beberapa anggota mereka sudah mendapatkan keuntungan dari kerajinan mereka,<sup>48</sup> namun dari para anggota lainnya tampak bahwa keuntungan ini masih terbatas.

Contoh-contoh ini sejalan dengan pengalaman internasional terkait program-program pemberdayaan ekonomi perempuan skala kecil, yang seringkali gagal memberikan keuntungan keuangan yang signifikan. Ada berbagai alasan yang menjadi penyebab hal ini, namun seringkali yang terjadi adalah, dalam menanggapi permintaan para perempuan, proyek-proyek tersebut hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan yang terkait peran tradisional perempuan (menjahit, memasak, kerajinan) yang sering kali bersifat padat karya dengan margin keuntungan yang rendah (atau bahkan tidak ada), serta di sektor ekonomi yang rentan.<sup>49</sup> Proyek-proyek tersebut cenderung dimulai dengan pelatihan keterampilan, bukan pasar, dan tidak terlalu memperhatikan keragaman, kualitas, maupun permintaan produk. Tidak mungkin kita mengharapkan terjadi perubahan besar pada situasi ekonomi perempuan yang terlibat di dalam aksi kolektif skala kecil, tanpa melaksanakan pendekatan yang lebih komprehensif.

### C. Aset Kapasitas (Kemampuan untuk)

Dalam kerangka MAMPU, 'aset kapasitas (*agency*)' mencakup peningkatan partisipasi dan pengaruh perempuan di dalam keluarga dan masyarakat, serta akses yang lebih baik bagi perempuan kepada pekerjaan, layanan, serta program-program pemerintah.

Meskipun perubahan yang dilaporkan dalam aset kapasitas ini beragam (Gambar 10) diseluruh contoh aksi kolektif yang diteliti, terdapat beberapa contoh perubahan positif pada domain ini. Pada survei anggota, para anggota ditanya apakah partisipasi atau pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan di keluarga atau masyarakat meningkat, apakah mereka dapat mengakses lapangan kerja yang lebih baik, atau mengakses layanan pemerintah sebagai hasil dari partisipasi mereka dalam aksi kolektif. Data kualitatif menunjukkan bahwa area dimana terjadi perubahan terbesar adalah yang terkait dengan partisipasi pada diskusi masyarakat dan forum pengambilan keputusan, khususnya ditingkat Musrenbang.

Gambar 10. Proporsi anggota kelompok aksi kolektif perempuan yang disurvei melaporkan adanya perubahan positif terkait aset kapasitas

Balai Sakinah 'Aisyiyah	Posko	Sekolah Perempuan	Balai Perempuan	MUIWO	Serikat PEKKA	Community Center	Kelompok Bunda Kreatif	Seluruh bentuk:
28%	74%	25%	82%	5%	62%	45%	30%	44%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Para anggota aksi kolektif telah menceritakan tentang akses kepada perlindungan sosial (Balai Perempuan, Serikat PEKKA), kesetaraan gender (Sekolah Perempuan), perlindungan pekerja rumahan (MUIWO) dan pengakuan pekerja rumahan (Kelompok Kreatif Bunda), akses kepada layanan kesehatan seksual dan reproduksi (Community Center, Balai Sakinah 'Aisyiyah), perlindungan perempuan dan anak-anak yang terdampak kekerasan (Posko, Balai Perempuan, Community Center), dan akses kepada identitas hukum (Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, MUIWO, dan Balai Perempuan).

<sup>48</sup> Manajemen BUEKA, wawancara kelompok, Pangkep, September 2016.

<sup>49</sup> Lihat Leach (1996). Women in the informal sector. *Development in Practice*, 6(1), 25-36; Mayoux L (1998).

Pemberdayaan perempuan dan program micro-finance: strategi untuk meningkatkan dampak. *Development in Practice*, 8(2), 235 — 241; Vargas-Lundius (2007). Polishing the stone: A journey through the promotion of gender equality in development projects. Rome: IFAD.

Fokus pada pemberian layanan di Community Center, Balai Sakinah 'Aisyiyah, dan Posko telah meningkatkan akses kepada layanan-layanan tersebut. Dalam kasus Balai Sakinah 'Aisyiyah, kelompok ini berfungsi sebagai pusat informasi dan para anggotanya mengikuti arahan mereka misalnya untuk deteksi kanker dini. Dalam kasus Community Center dan Posko, layanan yang ada diberikan untuk kelompok sasaran yang lebih luas.

Pengakuan atas bermanfaatnya peran yang dijalankan oleh kelompok-kelompok tersebut ditunjukkan dengan adanya para pemimpin desa yang mengundang kelompok-kelompok untuk memberikan atau menyerahkan proposal kepada Musrenbang di beberapa lokasi, dalam contoh ini terkait dengan Balai Sakinah 'Aisyiyah:

Pada saat Musrenbang di kelurahan (desa), kami sengaja mengundang perwakilan BSA untuk berbicara tentang rencana program mereka, dan ternyata mendapatkan tanggapan baik dari para staf kelurahan. Setelahnya, usulan tersebut diteruskan ke pemerintah kabupaten, dan sekarang kami sedang menunggu hasilnya. Ada tiga hal yang mereka usulkan... Kami mendukung mereka di tingkat provinsi dan nasional...<sup>50</sup>

Contoh lain dari peningkatan kapasitas anggota kelompok aksi kolektif adalah peran yang saat ini dimainkan beberapa anggotanya dalam mendukung anggota lain untuk mengakses layanan:

Saya sekarang dipercaya warga untuk berurusan dengan kantor desa. Jika ada tetangga yang mengalami masalah dalam pembuatan KTP, atau mengakses layanan dasar lainnya, saya bisa membantu... Yang saya bantu khususnya adalah di tingkat desa dan kecamatan... Saya juga sudah mendampingi teman saya ke rumah sakit atas nama Sekolah Perempuan. Saya merasa dihargai dan diakui oleh orang-orang di rumah sakit. Saya dapat mengungkapkan atau menyampaikan keluhan saya. Ketika saya diundang ke Musrenbang, atau diundang untuk berkomunikasi dengan kepala desa, saya sudah lebih berani untuk berbicara. Saya menjadi lebih berani untuk keluar dari lingkungan saya, dan mengatasi kekhawatiran dan ketakutan saya. Ketakutan atas kondisi fisik saya sendiri, orang tua kami, atau suami kami yang selalu melarang kami, dan takut terpisahkan dari anak-anak kami. Saya lawan semua ketakutan itu.<sup>51</sup>

Peran pendukung ini meningkatkan pengakuan terhadap individu maupun kelompok tersebut. Hal ini khususnya tampak jelas dalam kasus peran yang dijalankan PEKKA/Serikat PEKKA dan Koalisi Perempuan Indonesia/Balai Perempuan dalam mendampingi anggota masyarakat untuk mendapatkan dokumen identitas hukum seperti akta pernikahan dan akta lahir. Sebagaimana didiskusikan pada bagian 1, bekerja secara kolaboratif dengan para pemimpin desa mayoritasnya dilaksanakan dengan pendekatan pragmatis. Ketika kelompok mampu menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang berguna bagi masyarakat, hal itu menguatkan modal

#### **Mempengaruhi pelaksanaan dan akuntabilitas pembangunan desa: Sekolah Perempuan Hebat**

Sekolah Perempuan Hebat terlibat dalam penyusunan proposal dana desa untuk membangun fasilitas air bersih. Dengan keberhasilan proposal tersebut, kepala desa kemudian menugasi Sekolah Perempuan Hebat untuk membantu melaksanakan program dengan dana senilai 300 juta rupiah.

Para anggota Sekolah Perempuan Hebat juga terlibat dalam pendistribusian kartu kesehatan dan pendidikan untuk bantuan sosial serta meningkatkan akuntabilitas program-program tersebut.

Salah satu perwakilan KPS2K, perantara CSO yang membantu kegiatan Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menyatakan bahwa program-program bantuan sosial dulu cenderung mendiskriminasi, dan bukan memprioritaskan orang miskin: 'tapi sekarang, [para staf desa] mengetahui bahwa para perempuan di Sekolah Perempuan Hebat dapat langsung [menyampaikan keluhan] ke kabupaten, dan sejak itu perilaku mereka berubah. Mereka sekarang mau lebih teliti dalam melihat [daftar calon penerima bantuan sosial] dan memberikan layanan kepada perempuan miskin.'

Sumber: Wawancara mendalam, Koordinator Sekolah Perempuan Hebat Desa, Mondoluku, dan perwakilan manajemen KPS2K, Gresik, Agustus 2016

<sup>50</sup>Perwakilan pemerintah desa, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016

<sup>51</sup>Koordinator Desa Sekolah Perempuan Hebat - Mondoluku, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016

sosial mereka, dan dapat membuka pintu diskusi tentang isu-isu yang lebih sensitif seperti kesetaraan gender dan hak perempuan.

Meskipun sudah terdapat banyak indikasi kuat dan luas diseluruh contoh aksi kolektif bahwa para anggota semakin percaya diri untuk bicara dan berpartisipasi dalam diskusi masyarakat, ada negosiasi-negosiasi yang masih harus dijalankan di tingkat rumah tangga. Ketika aksi kolektif mencakup penciptaan pendapatan, aksi kolektif tersebut lebih mudah diterima oleh para anggota kelompok, sebagaimana dinyatakan salah satu suami anggota, *'Saya pribadi mau mempertimbangkannya karena kegiatan itu bisa membantu perekonomian keluarga. Misalnya, menjahit bisa menambah pendapatan saya. Menurut saya itu sangat bagus dan jelas.'*<sup>52</sup>

Bagi perempuan yang terlibat dalam aksi kolektif yang mengalami masalah dengan izin dari suami mereka, proses negosiasi seringkali harus menggunakan satu atau dua strategi, yaitu meyakinkan pihak suami bahwa kegiatan tersebut akan bermanfaat bagi keluarga, serta membangun pemahaman mereka tentang kegiatan tersebut, sebagaimana disarankan oleh Community Center:

Kami menyarankan anggota agar menjelaskan kepada para suami tentang apa yang kita diskusikan disini, sehingga suami mereka dapat memahami dan mendukung mereka, karena tujuannya adalah memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jika mereka tidak memberi tahu suami mereka, maka suami mereka nanti akan menganggap bahwa para perempuan ini hanya mengikuti semacam kumpul-kumpul rutin yang tidak ada hasilnya.<sup>53</sup>

Jika manfaatnya tidak jelas, atau kegiatannya tidak dipahami, maka beberapa anggota tidak akan mau lagi berpartisipasi:

Ada (sebagian anggota) yang dilarang oleh suami mereka...karena katanya bergabung (dengan aksi kolektif) tidak menghasilkan uang seperti harapan mereka.<sup>54</sup>

Ketika suami saya tidak mengizinkan saya, ia bertanya kepada saya, ikut kegiatan itu buat apa? Kenapa kamu mau ikut? Suami saya melarang saya karena dia belum mengerti.<sup>55</sup>

Namun, ada beberapa contoh dimana para anggota melaporkan bahwa mereka berhasil mempengaruhi perilaku suami mereka di rumah, termasuk dalam hal berbagi tugas rumah tangga dan mendukung partisipasi mereka dalam kegiatan di luar rumah tangga.

## D. Aset Sosial (Kemampuan dengan)

Aset sosial mencakup teman, saudara, dan jaringan sosial, inspirasi dari orang lain maupun membantu orang lain, serta akses kepada orang-orang berpengaruh. Keinginan untuk meningkatkan interaksi sosial selalu menjadi pendorong utama bagi perempuan untuk bergabung dan berpartisipasi didalam aksi kolektif. Dalam survei terhadap anggota, para anggota ditanya apakah mereka mengalami peningkatan aset sosial, yang diartikan sebagai mendapatkan jaringan pertemanan dan sosial baru, inspirasi dari pihak lain, fasilitasi, serta akses kepada tokoh berpengaruh di masyarakat atau pemerintah. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 11.

<sup>52</sup>Suami seorang anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara kelompok, Bantul, Oktober 2016.

<sup>53</sup>Direktur APM, wawancara mendalam, Jambi, Oktober 2017

<sup>54</sup>Anggota, Sekolah Perempuan Hebat, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016.

<sup>55</sup>Anggota, Balai Perempuan dan PKK, wawancara mendalam #1, Parepare, September 2016

Gambar 11. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang melaporkan perubahan positif terkait aset sosial mereka.

<i>Balai Sakinah 'Aisyiyah</i>	<i>Posko</i>	<i>Sekolah Perempuan</i>	<i>Balai Perempuan</i>	MUIWO	<i>Serikat PEKKA</i>	Community Center	<i>Kelompok Bunda Kreatif</i>	Seluruh contoh:
60%	74%	60%	73%	45%	86%	9%	85%	61%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Pengalaman interaksi kelompok juga merupakan aspek penting dari contoh-contoh aksi kolektif yang diteliti, sekaligus merupakan faktor yang membangun percaya diri pada perempuan.

Saya pribadi merasa bahwa setelah saya bergabung... Saya bisa bilang bahwa sekarang saya sudah bisa berbicara di depan banyak orang. Dulu saya malu sekali, dan hanya mau menjadi pendengar. Sekarang saya sudah bisa menyampaikan pemikiran saya. Kegiatan ini sangat mempengaruhi kami... sekarang di setiap pertemuan, kami bisa berbagi cerita dengan teman-teman yang dulunya saya tidak kenal.<sup>56</sup>

Tentu saja, menjadi anggota di kelompok tersebut membantu para perempuan ini untuk membangun jaringan, termasuk melalui penyedia layanan maupun pejabat pemerintah - 'di samping belajar pengetahuan baru, saya juga mendapatkan banyak teman dan hubungan. Kami sekarang sudah berani untuk bicara dengan Kapolres.<sup>57</sup> *Kelompok lain yang relatif lebih homogen yang terdiri dari anggota-anggota dengan karakteristik yang sama seperti Balai Sakinah 'Aisyiyah, Serikat PEKKA, dan kelompok pekerja rumahan dan pekerja migran yang sudah pulang (MUIWO) dan Kelompok Bunda Kreatif mendorong dukungan bersama kepada para perempuan yang dulunya terisolasi. Jaringan ini melebar ke desa-desa lain melalui penjangkauan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh perantara maupun mitra nasional:*

Kami juga memiliki banyak teman... Terkadang kami merayakan hari-hari besar seperti hari perempuan internasional. Di acara perayaan tersebut, para perempuan itu dapat menunjukkan bakat mereka dengan mendukung suatu kampanye. Ada tarian dan drama. Kami juga berpartisipasi dalam kegiatan di luar kota. Acara-acara yang diadakan sangat menarik.<sup>58</sup>

Kami punya banyak teman. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Jika kami tetap menjadi ibu rumah tangga, kami akan tetap diam di rumah. Tapi karena kami adalah anggota, kami bisa ke mana-mana, misalnya ke Makassar. Tidak mungkin kami bisa ke Makassar kalau kami bukan anggota...Betul. Ada nomor telepon, kami bertukar kontak... (kami) jadi punya teman, dari enam desa, bahkan dari Minahasa Utara.<sup>59</sup>

Melalui pertemuan rutin, fasilitasi kelompok, dan interaksi lainnya, terbangunlah saling percaya dan ideologi bersama. Para perantara adalah mentor-mentor utama dari anggota kelompok dan juga langkah pertama mereka menuju ke jaringan yang lebih luas, dan berperan memperkenalkan

#### **Peningkatan akses kepada layanan: Balai Sakinah 'Aisyiyah**

Organisasi dan struktur multi-tingkatan 'Aisyiyah ditambah dengan bantuan sektoral jelas sangat membantu dalam menghubungkan para anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah kepada layanan kesehatan dan pemerintah. Advokasi ini telah membuat para perempuan lebih mudah mengakses layanan deteksi kanker, serta dukungan keuangan bagi perempuan miskin.

Tampak pula bahwa BSA akan terus berjalan bahkan setelah periode bantuan MAMPU berakhir, karena kelompok tersebut diperkuat dengan struktur yang lebih besar, dan terhubung dengan berbagai tingkatan pemerintahan. Kelompok-kelompok tersebut juga terbantu dengan beragamnya usia anggota, khususnya perempuan muda.

<sup>56</sup> Anggota, Balai Perempuan Labukkang, wawancara kelompok, Parepare, September 2016.

<sup>57</sup> Anggota, Balai Perempuan Soreang, wawancara kelompok, Parepare, September 2016.

<sup>58</sup> Anggota, Forum Perempuan Muda, APM Permampu, wawancara mendalam, Jambi 21 Oktober 2016.

<sup>59</sup> Anggota, Posko Lestari, wawancara kelompok, Minahasa Selatan, Oktober 2016.



kelompok kepada para pemimpin, lembaga pemerintah, dan lembaga lain di desa hingga kabupaten, bahkan terkadang tingkat nasional. Sebagaimana dinyatakan di awal, sulit menentukan di mana kelompok aksi kolektif berakhir dan perantara dimulai

## E. Aset Pendukung

Aset pendukung mencakup akses kepada dokumen administratif atau hukum, perlindungan hukum, dan seterusnya. Namun, proporsi anggota aksi kolektif yang melaporkan perubahan diranah pemberdayaan ini justru adalah yang terkecil. Dalam survei anggota, para anggota ditanyakan apakah mereka mengalami perubahan dalam hal kepemilikan dokumen identitas hukum, atau dalam hal perlindungan hukum melalui undang-undang dan kebijakan.

Gambar 12. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif dalam hal aset pendukung mereka

<i>Balai Sakinah 'Aisyiyah</i>	<i>Posko</i>	<i>Sekolah Perempuan</i>	<i>Balai Perempuan</i>	MUIWO	<i>Serikat PEKKA</i>	Community Center	<i>Kelompok Bunda Kreatif</i>	Seluruh contoh:
0%	42%	25%	27%	0%	43%	0%	15%	18%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Beberapa contoh aksi kolektif, khususnya MUIWO dan Kelompok Kreatif Bunda, ditandai dengan adanya fokus pada aset pendukung, seperti status hukum, akses kepada informasi, serta perlindungan hak tenaga kerja. Mayoritas contoh menunjukkan adanya berbagai tingkatan kesadaran tentang peraturan yang sangat potensial untuk mendorong terciptanya tindakan dan manfaat yang lebih luas, sebagaimana diperlihatkan pada contoh-contoh berikut.

MUIWO telah bekerja sama dengan SARI untuk mengadvokasi peraturan tingkat lokal di tingkat kabupaten (yang sekarang sudah selesai) dan tingkat desa tentang perlindungan pekerja migran, memulai pertemuan konsultasi dan berkontribusi untuk menyusun draf peraturan.<sup>60</sup> Selain itu mereka juga sudah mendirikan sebuah pusat layanan informasi yang bertujuan memberi informasi kepada calon pekerja migran tentang ciri majikan yang baik, bagaimana menjadi pekerja migran yang independen dan aman, dan bagaimana menghindari agen atau broker yang tidak perlu. MUIWO dan SARI telah berhasil mencegah para agen TKI yang tidak baik memasuki Desa Mergosari dan Kuripan, dengan memerintahkan mereka untuk menghadap kepala desa dahulu dan menunjukkan dokumen resmi mereka.<sup>61</sup> Kelompok Kreatif Bunda telah menggunakan proses pengumpulan data tentang pekerja rumahan untuk mengadvokasi pengakuan atas keberadaan mereka, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan gratis dan mendaftarkan diri ke asuransi kesehatan:

Baru-baru ini kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Pertama-tama, kami datang [ke kantor provinsi], dan kami belum punya data apapun atau bukti apapun. Alhamdulillah, baru-baru ini kami menyerahkan proposal berisi nama dan alamat anggota kelompok sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan gratis... Saat itu terdapat 30 orang dari kelompok kami yang dapat mengakses program tersebut. Selanjutnya kami mengunjungi dinas tenaga kerja provinsi. Kami membawa datanya, dan kami diminta menyerahkan data tersebut... Kami sudah membawa data yang berisi nama, alamat, nomor KTP, dan usia, dan datanya sangat detil.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Staf lapangan SARI, wawancara mendalam #1, Wonosobo, Oktober 2016

<sup>61</sup> Staf lapangan SARI, wawancara mendalam #2, Wonosobo, Oktober 2016

<sup>62</sup> Sekretaris Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, kelompok-kelompok ini telah mengadvokasi atau membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen identitas hukum. Para anggota Serikat PEKKA dapat mengakses dokumen identitas termasuk akta lahir dan akta nikah secara gratis, dan beberapa kader juga terlibat membantu orang mengakses layanan ini.<sup>63</sup> *Sekolah Perempuan dan Balai Perempuan sama-sama bekerja di sektor transparansi dan eligibilitas dalam perlindungan sosial:*

Menurut kami, masih ada orang-orang yang sebenarnya berhak mendapatkan Raskin (Beras subsidi untuk keluarga miskin) namun tidak mendapatkannya karena nama mereka belum terdaftar. Daftar nama yang saat itu digunakan didapat dari pusat, dan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami berusaha memasukkan nama-nama orang yang berhak mendapatkan Raskin, tapi belum dimasukkan ke daftar.<sup>64</sup>

Community Center melalui Aliansi Perempuan Merangin juga telah mengadvokasi penyusunan peraturan lokal untuk mengurangi pernikahan dini, dan juga bekerja menyusun Nota Kesepahaman (MoU) lintas-lembaga untuk membuat layanan kesehatan seksual dan reproduksi ramah perempuan, karena *'sejauh ini, dalam layanan kesehatan dasar, perlakuan terhadap perempuan itu berbeda. Kualitas layanan ditentukan dengan melihat penampilan fisik perempuan, siapa dia, dan status ekonominya. Kalau dia tidak kaya, dia tidak akan segera mendapatkan perawatan'*.<sup>65</sup> Kerja Posko didukung oleh peraturan desa yang memformalkan perannya dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,<sup>66</sup> dan Posko Mentari juga memiliki perjanjian kerja sama dengan Dinas Sosial untuk kasus pengabaian anak, dinas pendidikan dan sekolah untuk menyosialisasikan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, dan Polres (kabupaten) (melalui kepala desa) untuk isu-isu terkait hukum.<sup>67</sup>

Salah satu ciri menonjol dalam studi kasus Posko adalah frekuensi kekerasan di kedua lokasi Posko dilaporkan telah berkurang. Hal ini dikatakan disebabkan oleh ketakutan atas peningkatan pengetahuan perempuan tentang hukum, dan juga ancaman bahwa perempuan sekarang memiliki tempat untuk mengadukan kasusnya:

Misalnya, ketika ada orang tua yang ingin memukul anaknya, kami jadi agak takut melakukannya, karena sekarang orang tahu sudah ada Posko disini, dan Posko tidak akan membiarkan itu, karena sudah ada aturannya... KDRT? Ya, memang sudah berkurang... Di masa lalu, ada yang sampai terluka, tapi sekarang tidak terjadi lagi.<sup>68</sup>

Sejak Posko ada di sini, suami saya jarang memukul saya... dulu sering, sebelum Posko ini dibentuk, dulu sering sekali terjadi... Tapi sekarang jauh lebih jarang; mereka takut sekarang.<sup>69</sup>

Pihak laki-laki juga menyatakan adanya rasa takut atas hukuman yang bisa terjadi jika mereka melakukan kekerasan. Pengaruh ini juga dilaporkan telah meluas ke desa-desa lainnya dimana Posko beroperasi.<sup>70</sup>

Jika aksi kolektif memiliki pengaruh pada aset pendukung, seperti lingkungan kebijakan, keamanan pribadi dan kebebasan dari kekerasan, serta akses kepada layanan, maka aksi kolektif tersebut telah memperluas manfaatnya kepada mereka yang langsung terlibat dalam kegiatan maupun mereka yang mencari bantuan. Hal tersebut juga menunjukkan perubahan sifat aksi

<sup>63</sup>Fasilitator lapangan PEKKA, wawancara mendalam, Lingsar, Oktober 2016

<sup>64</sup>Anggota, Balai Perempuan Soreang, wawancara kelompok, Parepare, September 2016.

<sup>65</sup> Anggota, Aliansi Perempuan Merangin, wawancara kelompok, Minahasa Selatan, Oktober 2016

<sup>66</sup>Anggota, Posko Lestari, wawancara kelompok, Minahasa Selatan, Oktober 2016

<sup>67</sup> Anggota, Posko Mentari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>68</sup>Perwakilan PKK dan kepala dusun, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>69</sup>Perwakilan PKK #2, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>70</sup>Para anggota Posko Lestari, para pemimpin laki-laki/suami anggota, Posko Lestari dan Posko Mentari, wawancara kelompok; non-anggota, Posko Lestari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

kolektif, dari kegiatan kelompok kecil yang berfokus pada anggotanya sendiri, menjadi berorientasi keluar ke masyarakat luas, serta menjadi bagian dari transformasi yang lebih luas.



## Konsekuensi Negatif dari Aksi Kolektif Perempuan

Melacak dampak atau reaksi negatif dari kegiatan ini merupakan aspek penting penelitian dan evaluasi feminis. Adanya konsekuensi-konsekuensi negatif dapat menjadi indikator bahwa ada pesan yang sensitif yang sedang disampaikan, dan bahwa para pemilik kepentingan mendalam (*vested interest*) yang sedang menjaga status quo yang tidak seimbang merasa tidak nyaman dengan posisi mereka. Mengidentifikasi hasil dan reaksi negatif juga penting untuk memastikan bahwa para aktivis hak perempuan cukup terlindungi dan aman. Karenanya, kami menanyakan secara khusus tentang apa saja konsekuensi negatif yang terkait dengan aksi kolektif di dalam wawancara dan survei di berbagai tingkatan.

Meskipun hanya ada sedikit jumlah anggota kelompok, dan tidak ada fasilitator yang disurvei, karena telah terjadi dampak negatif dari partisipasi di dalam aksi kolektif, wawancara dengan para anggota kelompok memunculkan beberapa temuan. Mayoritas dampak tersebut dirasakan di tingkat individu.

Para anggota aksi kolektif umumnya menyatakan adanya kesulitan meminta izin suami mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut, khususnya ditengah adanya norma gender yang kaku yang mewajibkan perempuan mengurus keluarga sebagai tanggung jawab utama, dan adanya persepsi bahwa berpartisipasi dalam kegiatan di luar akan membuat perempuan menelantarkan kewajiban ini. Ada beberapa anggota yang menghadapi kritik langsung:

Ada beberapa suami yang melarang istri mereka untuk bergabung (aksi kolektif), lalu mendatangi tempat acara dan menyuruh istri mereka untuk pulang. Perempuan-perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan tidak baik karena meninggalkan anaknya di rumah... padahal kami pergi untuk belajar, yang kadang di luar kota dan di hotel. Itu yang membuat sebagian suami bertanya-tanya: kenapa harus dilakukan di hotel? Hotel itu tempat untuk perempuan nakal;<sup>71</sup>

Ibu X sempat mencoba mengundurkan diri, karena ia mendengar perkataan orang tentang dirinya - 'wah, dia selalu pergi ke sana sini, dan tidak mengurus keluarganya';<sup>72</sup>

Untuk perempuan yang memiliki anak, waktu untuk bersama keluarga menjadi berkurang... mereka harus meninggalkan keluarga agar mereka dapat bergabung';<sup>73</sup>

Kadang-kadang suami kami berpikir bahwa kalau kami berkumpul, kami meninggalkan kewajiban kami di rumah, atau kami tidak mengurus anak kami'.<sup>74</sup>

Sebagian perempuan lain melaporkan merasa tertekan karena harus menjalankan semua ekspektasi terhadap mereka:

(Perempuan yang bergabung) harus bisa mengatur waktu dengan baik... sebelum pergi, harus menyelesaikan pekerjaan rumah dulu;<sup>75</sup>

Pekerjaan rumah harus saya selesaikan hari ini sampai jam dua pagi supaya saya bisa bergabung dengan acara keesokan harinya;<sup>76</sup>

Perihal tanggung jawab ini juga disebutkan dalam wawancara dengan responden laki-laki:

<sup>71</sup>Anggota Sekolah Perempuan Hebat, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016

<sup>72</sup>Kepala Puskesmas, wawancara mendalam, Jambi, Oktober 2016

<sup>73</sup>Kepala Dusun, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

<sup>74</sup>Anggota, Buruh Migran Indonesia, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016.

<sup>75</sup>Bendahara PKK, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016

<sup>76</sup>Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

Sebagai suami, tugas saya adalah mengarahkan istri saya. Yang terpenting adalah menjaga kesehatannya. Kedua, (menurut saya) kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumahmu sebelum kamu berangkat.<sup>77</sup>

Ada beberapa yang melaporkan takut melihat perempuan nanti akan memandangi diri mereka terlalu kuat karena terlibat di dalam aksi kolektif, dan dapat mengakibatkan hal-hal negatif:

...jika masih ada suatu kelompok yang tidak setuju (dengan aksi kolektif), itu umumnya disebabkan oleh tindakan perempuan-perempuan tersebut, yang berjuang untuk keadilan gender... kalau setara saja tidak masalah, tapi kalau jadi lebih tinggi...<sup>78</sup>

Masih banyak orang yang tidak memahami tentang gender, dan juga ada yang salah paham dan menganggap bahwa (aksi kolektif) mengajarkan perempuan menentang suami mereka...<sup>79</sup>

Selama mereka tetap berada di posisi mereka sebagai ibu rumah tangga... Jika mereka bergabung dengan kegiatan-kegiatan tersebut pun tidak masalah selama mereka tidak melanggar batas. Maksud saya adalah, selama mereka tidak meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai ibu dari anak-anak mereka dan istri dari suami mereka... tapi kalau mereka melanggar itu, maka otomatis akan menjadi masalah.<sup>80</sup>

Satu-satunya konsekuensi negatif terkait keselamatan dan keamanan bagi anggota aksi kolektif perempuan adalah ketika mereka menanggapi kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada hal yang umum muncul di dalam wawancara-wawancara dengan anggota Posko dan Community Center:

Orang-orang yang tidak setuju dengan kegiatan kami biasanya adalah suami korban. Mereka biasanya mengatakan kami ikut campur dalam urusan mereka... ada anggota Posko yang juga diancam kekerasan fisik... pernah suatu kali seorang anggota Posko dikejar oleh (orang) yang mencoba memukulnya.<sup>81</sup>

Sebagai konselor, saya diancam... Kadang-kadang teman kita sendiri, teman dari perempuan, mereka tidak senang, dan tokoh agama pun kadang tidak senang.<sup>82</sup>

Kami masih kurang percaya diri dalam menangani kasus yang melibatkan tokoh penting, anggota kepolisian maupun militer. Kami cenderung sungkan menangani kasus-kasus tersebut, karena kami takut jadi korban juga jika kasusnya ternyata melibatkan penjahat atau pecandu narkoba. Itu pernah terjadi ke salah satu rekan kami.<sup>83</sup>

Hal-hal ini memang kontroversial, khususnya ketika pelaku juga tinggal di desa. Itu adalah salah satu tantangan terbesar yang saya tekankan (kepada para anggota aksi kolektif), bahwa mereka adalah pejuang hak asasi dan sangat rentan, sehingga harus hati-hati... Sejauh ini baru ada satu kasus yang betul-betul memakan korban luka. Tidak semua orang senang dengan keberadaan Posko.<sup>84</sup>

Ada sedikit contoh tentang terjadinya gesekan antara aksi kolektif yang terkait dengan mitra MAMPU dengan contoh pengorganisasian masyarakat dan ketegangan yang muncul di dalam kelompok, namun jumlah kasus-kasus ini tidak signifikan.

<sup>77</sup>Suami anggota Buruh Migran Indonesia, wawancara kelompok, Wonosobo, Oktober 2016.

<sup>78</sup> Suami seorang anggota Community Center, wawancara kelompok, Jambi, Oktober 2016

<sup>79</sup>Koordinator Desa Sekolah Perempuan Hebat - Sooko, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016

<sup>80</sup>Kepala dusun, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>81</sup>Anggota, Posko Lestari, wawancara kelompok, Minahasa Selatan, Oktober 2016

<sup>82</sup>Kepala Community Center, wawancara mendalam, Jambi, Oktober 2016

<sup>83</sup>Anggota, Community Center Mentari Sehat, wawancara kelompok, Merangin, Oktober 2016

<sup>84</sup>Perwakilan manajemen Swara Perempuan, Program Mampu, wawancara kelompok, Minahasa Selatan, Oktober 2016

## Temuan Utama dan Langkah ke Depan

Saat ini MAMPU berada pada fase kedua dan berencana untuk semakin mendorong aksi kolektif di tingkat desa, kabupaten dan nasional dengan lebih terfokus kepada kebijakan.<sup>85</sup> **Bagian ini berisi rangkuman dari temuan utama dari penelitian ini, serta menyoroti beberapa pilihan langkah ke depan bagi MAMPU yang diselaraskan dengan fokus fase kedua.**

**Ciri utama dari setiap contoh aksi kolektif dipengaruhi oleh sifat hubungan antara kelompok lokal dengan nasional.** Sebagaimana diduga, hal ini turut mempengaruhi fokus kegiatan kelompok maupun keanggotaan, identitas kelompok, model keterlibatan, serta struktur pendukung atau fasilitasi. MAMPU perlu terus mengakui dan menghargai keberagaman yang ditemukan di kedelapan kasus aksi kolektif yang diteliti.

**Pelibatan dengan MAMPU telah mendukung perluasan dan pengembangan aksi kolektif perempuan di tingkat lokal melalui tiga mekanisme utama:** (i) perluasan model eksisting ke wilayah geografis baru; (ii) pembentukan kelompok baru dan cara baru bagi para mitra nasional untuk berhubungan dengan akar rumput; dan (iii) menyegarkan dan menyusun kembali hubungan yang sudah ada menjadi tindakan nyata yang berfokus pada kesetaraan gender atau pemberdayaan perempuan.

**Terdapat kombinasi pendekatan dalam hal pelibatan kelompok miskin.** Kami mengamati adanya upaya penargetan yang sengaja kepada kelompok yang miskin secara ekonomi (Serikat PEKKA dan Balai Sakinah 'Aisyiyah), yang difokuskan pada kelompok kepentingan yang mungkin termarginalkan secara sosial dan politik, namun tidak selalu yang termiskin secara ekonomi (Kelompok Kreatif Bunda, MUIWO). Kami juga mengamati adanya upaya sengaja untuk mencampur perempuan dari berbagai latar belakang (Sekolah Perempuan, Community Center) dengan pelibatan kelompok yang lebih 'elit' yang dapat bermanfaat bagi kelompok miskin sebagai pengguna layanan atau melalui perubahan sosial yang lebih luas (Balai Perempuan, Posko).

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika melibatkan perempuan ke dalam aksi kolektif, atau ketika memulai suatu kelompok baru, **hal pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan situasi ekonomi anggota.** Bagi kelompok miskin, motivasi untuk berpartisipasi - dan persetujuan keluarga untuk terlibat dalam kegiatan - didorong oleh potensi manfaat ekonomi dari keterampilan baru serta potensi membangun usaha bersama kelompok. Namun, tampak bahwa dengan MAMPU, saat ini belum terlihat adanya dukungan teknis yang cukup maupun upaya lain untuk mengembangkan usaha yang layak yang terhubung dengan pasar secara berkelanjutan. Meskipun telah diadakan pelatihan, manfaatnya masih belum terasa. Ini adalah potensi ketegangan yang dapat ditemukan didalam model aksi kolektif - jika calon anggota kelompok ingin menikmati pengembangan ekonomi melalui pengembangan usaha kecil, namun para mitranya dan perantara lebih berfokus pada lingkungan kebijakan, siapa yang akan menang? **MAMPU perlu mempertimbangkan untuk membangun kapasitas internal untuk mendorong kegiatan pembangunan ekonomi yang lebih layak.**

Di sisi lain, jika anggota kelompok berasal dari kalangan elit masyarakat, mereka cenderung lebih mampu terlibat aktif secara politik sebagai individu maupun jaringan kelompok. Dengan demikian, fokus aksi kolektif menjadi berorientasi keluar. Penelitian ini menunjukkan bahwa **melibatkan para elit dan perempuan berpengaruh yang berorientasi pembangunan ke dalam aksi kolektif, khususnya pada isu-isu yang sensitif merupakan strategi yang efektif untuk membawa**

<sup>85</sup> MAMPU (2016) Forward Plan July 2016 – June 2020. p.6-2.

**perubahan.** Namun penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan peluang yang tepat serta program pengembangan yang terstruktur, **perempuan dari kelompok paling marjinal pun dapat menjadi pendorong perubahan yang kuat dan berpengaruh.** Ada ruang bagi semua orang untuk berpartisipasi.

**Bukti yang sangat terbatas dari pelibatan perempuan muda sebagai kelompok terpisah** di delapan kasus yang diteliti, meskipun beberapa anggota dari kelompok-kelompok tersebut memang masih muda. MAMPU dan mitra sepertinya melewatkan kesempatan untuk memperluas jaringan dengan kalangan generasi perempuan muda yang lebih terdidik, melek teknologi, namun tidak terlibat di dalam politik. **MAMPU dapat menelusuri apakah ada asosiasi atau organisasi perempuan muda yang berminat dan sesuai untuk menjadi bagian dari gerakan.**

Selain itu, perlu juga diberikan **perhatian khusus pada kelayakan (viabilitas) ekonomi kelompok** jika aksi kolektif dilaksanakan melalui struktur kelompok (seperti ditunjukkan kedelapan contoh ini). Para mitra nasional dan perantara dapat mempertimbangkan bagaimana caranya agar kelompok-kelompok tersebut dapat menjaga keberlanjutan kegiatan mereka, seperti melalui iuran anggota, dana dari pemerintah, maupun sumber lainnya. Terkait dengan hal ini, MAMPU dan para mitranya perlu menggunakan **analisis terhadap undang-undang desa dan peluang untuk mengakses dana desa** serta strategi-strategi yang tepat untuk melaksanakannya. Selain itu saat ini juga tampak terjadi misinformasi - seperti anggapan bahwa hanya PKK yang bisa diberikan dana bergulir.

Dari sejak pembentukan kelompok, hingga terlibat di dalam berbagai kegiatan, **peran perantara sangat penting**, dan ini merupakan area di mana perlu dilakukan investasi lebih serius. Perantara, baik sebagai individu maupun CSO, mendukung, memotivasi, melatih, dan mendorong kelompok lokal. Mereka membangun hubungan dengan kebijakan maupun area pengaruh lainnya. Seringkali peran perantara tidak dapat dipisahkan dari aksi kelompok.

Penelitian ini menawarkan justifikasi **untuk meningkatkan investasi kepada perantara**, sebagai pelengkap, atau terkadang sebagai pengganti, model-model aksi kolektif berbasis kelompok lokal. Hal ini didasarkan pada peran penghubung dan pendukung yang dijalankan oleh SARI, KP2SK, Yasanti dan APM, maupun pada mitra-mitra nasional.

**Dalam hal pengembangan aset manusia, khususnya rasa percaya diri, keyakinan diri, dan - sebagaimana istilah para responden - 'keberanian', tampak menjadi prasyarat sebelum mereka dapat mengalami bentuk pemberdayaan lainnya.** Para anggota dari setiap contoh aksi kolektif yang diteliti melaporkan adanya reaksi beruntun dari peningkatan rasa percaya diri dan pengetahuan (perubahan dalam aset manusia atau individu), menjadi kemampuan untuk berbicara dan berpartisipasi di dalam maupun kepada forum komunitas seperti Musrenbang - sebagai aset kapasitas. Selain itu mereka berharap bahwa hal ini akan membantu mereka mengembangkan aset keuangan dan sumber daya maupun aset pendukung, yang nantinya akan saling melengkapi. Perubahan di dalam aset sosial, khususnya dalam hal mendapatkan teman baru dan munculnya berbagai kesempatan baru merupakan aset yang bersifat lintas sektoral.

Namun, terkadang **sulit membedakan antara pemberdayaan individu dan kolektif.** Di sejumlah area, seperti kelompok simpan pinjam, dimensi kolektif ini terlihat jelas; sementara di kelompok lain, manfaat lebih menonjol pada tingkat individu. Selain itu tampak bahwa status sebagai kelompok membuat isu-isu yang diperjuangkan lebih muncul ke permukaan, serta membuka peluang untuk berpartisipasi di dalam diskusi dan pengambilan keputusan di tingkat desa, seperti melalui Musrenbang, meskipun hanya satu atau dua individu yang benar-benar terberdayakan yang mampu bicara mewakili kelompok.

Pada seluruh kasus tersebut, **dimensi advokasi atau mempengaruhi kebijakan cenderung terlokalisasi** - dalam artian hanya menarget desa, atau maksimal kabupaten. Kami tidak menemukan adanya hubungan yang jelas antara kebijakan nasional atau gerakan perempuan

nasional di luar hubungan langsung dengan mitra nasional, kecuali pada kelompok-kelompok yang berpartisipasi dalam 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan.

Memang terdapat pengalaman baik di kalangan mitra nasional MAMPU ketika melaksanakan berbagai pendekatan pembangunan kapasitas untuk para anggota aksi kolektif tersebut. Pendekatan terstruktur dari PEKKA, KPI, Kapal Perempuan, dan Yasanti tampak berpengaruh pada perubahan rasa percaya diri dan keyakinan diri perempuan yang kemudian juga meningkatkan aset pemberdayaan mereka. **MAMPU dan para mitranya dapat menelusuri berbagai peluang untuk berbagi pendekatan pembangunan kapasitas pengembangan**, serta mengidentifikasi bagaimana semua hal tersebut dapat diperluas baik di dalam maupun di luar jaringan MAMPU. Kami menyarankan agar dilakukan **investasi lebih lanjut dengan pendekatan terstruktur untuk membangun kapasitas dan motivasi para anggota aksi kolektif**, yang dikembangkan berdasarkan metodologi setiap mitra yang sudah teruji.

Terdapat kesempatan untuk **memfasilitasi proses saling belajar** terkait berbagai pendekatan yang menghubungkan perempuan dengan berbagai layanan, seperti Balai Sakinah 'Aisyiyah dan Community Center.



## Referensi

- Agarwal, B. (2000). Conceptualising environmental collective action: why gender matters. *Cambridge Journal of Economics*, 24, 283–310
- Batliwala, S. (1993). *Empowerment of Women in South Asia: Concepts and Practices*. Mumbai: Asian- South Pacific Bureau of Adult Education.
- Evans, A., & Nambiar, D. (2013). *Collective action and women's agency: A background paper*. Washington DC: World Bank.
- Eyben, R., Kabeer, N., & Cornwall, A. (2008). *Conceptualising empowerment and the implications for pro poor growth*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Fleming, F., & Davis, P. (2015). Mid-term review of Empowering Indonesian women for poverty reduction: Verification of the Performance Story and Forward Plan. Jakarta: MAMPU/Australian Aid.
- Leach, F. (1996). Women in the informal sector. *Development in Practice*, 6(1), 25-36.
- MAMPU. (2015). The MAMPU Performance Story for the period 2012 - 2015. Jakarta: Australian Aid, MAMPU.
- MAMPU (2016) Forward Plan July 2016 – June 2020. Jakarta: MAMPU.
- Mayoux, L. (1998). Pemberdayaan perempuan dan program micro-finance: strategi untuk meningkatkan dampak. *Development in Practice*, 8(2), 235 — 241.
- Pandolfelli, L., Meinzen-Dick, R., & Dohrn, S. (2007). Gender and Aksi Kolektif: Kerangka Konseptual dan Analisis CAPRI Working Paper No. 64.
- Sen, G. (1997). *Empowerment as an Approach to Poverty*. New York: UNDP.
- Suryakusuma, J. (2015). *State Ibuism*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Syamsiyatun (2007) A Daughter in the Indonesian Muhammadiyah: Nasyiatul Aisyiyah Negotiates a New Status and Image. *Journal of Islamic Studies* 18:1, pp 69–94.
- Vargas-Lundius, R. (2007). *Polishing the stone: A journey through the promotion of gender equality in development projects*. Rome: IFAD.



## Bagian 3

# Studi Kasus Masing-Masing Contoh Aksi Kolektif

---

# 1. Balai Sakinah 'Aisyiyah

Fokus studi kasus:

**Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan**

Mitra MAMPU terkait:

**'Aisyiyah**

## FOKUS DAN ASAL AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN

'Aisyiyah sebagai organisasi payung Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) adalah sebuah organisasi otonom perempuan di bawah Muhammadiyah, <sup>86</sup> salah satu dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. 'Aisyiyah didirikan pada 1917, dan berfokus pada pengembangan agama, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan untuk mencapai keluarga sakinah (keluarga penuh kedamaian) di dalam suatu masyarakat madani (*qaryah thayyibah*). 'Aisyiyah selanjutnya memperluas fokusnya dari yang awalnya hanya terkait isu agama menjadi ke sektor pencaharian, dan saat ini juga mengadvokasi peningkatan akses kepada asuransi dan layanan kesehatan.<sup>87</sup>

Balai Sakinah 'Aisyiyah adalah salah satu contoh aksi kolektif perempuan yang telah ada (sebelum MAMPU) yang diinisiasi oleh 'Aisyiyah sebagai sebuah program nasional. BSA telah diperluas dan dikembangkan dengan dukungan dan dana dari MAMPU, termasuk untuk tiga cabangnya di lima kecamatan di Kabupaten Pangkep. Kecamatan tersebut di antaranya adalah Kecamatan Minasatene, yaitu lokasi yang dipilih untuk studi kasus ini. Staf 'Aisyiyah melihat adanya dua manfaat dari situasi ini:

Jika Program MAMPU berakhir, para motivator (fasilitator kelompok) akan terus bertahan karena mereka memang anggota 'Aisyiyah; kader adalah bagian dari ranting. Jadi, sebenarnya hal ini menguntungkan kedua pihak, yaitu Program MAMPU maupun 'Aisyiyah sendiri, karena Program MAMPU dapat membantu kita mempercepat penguatan organisasi hingga tingkat ranting.<sup>88</sup>

Studi kasus ini berfokus pada masyarakat kota Biraeng, yang memiliki lima kelompok BSA di tingkat kampung atau dusun, yaitu BSA Bonto Punca, Bontotajoro, Penas, Griya Citra Mas dan Belae. Kelompok-kelompok ini berfokus pada lima isu, yaitu keluarga berencana, ASI eksklusif, akses kepada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akses kepada perlindungan sosial, dan kesehatan reproduksi perempuan dengan fokus khusus pada deteksi dini atau pencegahan kanker. <sup>89</sup>Dua fokus terakhir ditegaskan di dalam diskusi kelompok dengan anggota BSA dan kader yang membenarkan bahwa keduanya memang menjadi isu prioritas.

<sup>86</sup>Operasional 'Aisyiyah ini tidak dapat dipisahkan dari fokus dan kepentingan organisasi payungnya, Muhammadiyah.

<sup>87</sup>Untuk informasi lebih lanjut tentang 'Aisyiyah dan sejarahnya, lihat Syamsiyatun (2007) A Daughter in the Indonesian Muhammadiyah: Nasyiatul Aisyiyah Negotiates a New Status and Image. *Journal of Islamic Studies* 18:1, pp 69–94.

<sup>88</sup>Tim Koordinasi 'Aisyiyah/MAMPU, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016.

<sup>89</sup>BSA dan 'Aisyiyah berfokus pada deteksi dini kanker payudara, akses ke tes pap-smears dan pemeriksaan visual dengan tes asam asetik (IVA) untuk kanker serviks.

## CIRI-CIRI AKSI KOLEKTIF

'Aisyiyah memiliki struktur manajemen hierarkis dari tingkat pusat (nasional), lokal (provinsi), teritorial (kabupaten), cabang (kecamatan), hingga ranting (desa). Terdapat 22 pimpinan wilayah<sup>90</sup> di Provinsi Sulawesi Selatan; pimpinan wilayah di Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memiliki manajer cabang di lima kecamatan. Pimpinan-pimpinan wilayah inilah yang kemudian membentuk kelompok berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang diberikan oleh pemimpin pusat 'Aisyiyah. Kelompok-kelompok ini kemudian menjadi mekanisme untuk menyebarluaskan berbagai informasi termasuk tentang kesehatan reproduksi.<sup>91</sup> *Di Pangkep terdapat 28 kelompok BSA yang mencakup dua desa dan empat masyarakat perkotaan dan terdiri dari lebih dari 600 anggota.*<sup>92</sup>

BSA tingkat dusun dikoordinasi oleh seorang kader 'Aisyiyah. Terdapat dua relawan tingkat desa, yang disebut sebagai motivator yang memfasilitasi beberapa kegiatan, yaitu motivator bidan dan motivator dari ranting 'Aisyiyah. BSA memiliki struktur organisasi standar yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Struktur dasar BSA adalah sebuah organisasi sosial berbasis agama. Pendorong utama pembentukannya adalah solidaritas para anggotanya sebagai bagian dari Muhammadiyah. Struktur organisasi ini dibentuk untuk menghadapi isu-isu sehari-hari perempuan. Kegiatan-kegiatan dalam struktur dasar ini berkisar di seputar pertemuan keagamaan dan pengajian, serta kegiatan luar struktur yang terkait dengan isu-isu pragmatis seperti pelatihan dan layanan kesehatan reproduksi (deteksi kanker). Kelompok-kelompok BSA mengadakan pertemuan rutin bulanan, di mana anggota diharapkan menyumbang ide topik yang akan didiskusikan. Para anggota juga melakukan pelayanan sosial, termasuk kunjungan ke penjara, rumah sakit, panti asuhan, dan pesantren.<sup>93</sup> *Pengembangan keterampilan terkait penciptaan pendapatan juga diberikan oleh Bina Usaha Keluarga 'Aisyiyah (BUEKA). Produk-produk yang dihasilkan oleh anggota BSA dijual melalui Sekretariat BUEKA dan kantor 'Aisyiyah, warung, bazaar, dan pameran, dan dipromosikan melalui halaman Facebook 'Aisyiyah.*

## ANGGOTA KELOMPOK

Kriteria anggota adalah berusia reproduksi, miskin, dan mengalami keterbatasan akses kepada informasi dan pengetahuan. Para anggota tidak disyaratkan untuk menjadi anggota 'Aisyiyah dan Muhammadiyah, tapi *'ketika mereka bergabung dengan BSA dan bukan anggota 'Aisyiyah, setelah mereka tahu tentang kegiatan di 'Aisyiyah, mereka menjadi tertarik dan ingin menjadi anggota 'Aisyiyah.*<sup>94</sup>

Para kepala desa menyatakan bahwa dengan bersikap terbuka (kepada orang-orang non-Muhammadiyah) terbukti memperkuat kesatuan sosial. 'Sekarang dengan BSA, masyarakat yang tadinya tertutup menjadi lebih terbuka. Sebelum ada pilihan seperti ini, 'Aisyiyah adalah organisasi tertutup yang kegiatannya hanya untuk Muhammadiyah. Sekarang, dengan BSA, orang-orang yang tadinya tertutup terhadap 'Aisyiyah menjadi lebih terbuka... perbedaan antara Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah menjadi semakin berkurang.'<sup>95</sup>

<sup>90</sup>Menurut anggaran rumah tangga 'Aisyiyah, anggota pengurus dipilih oleh anggota melalui kongres yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Secara umum, anggota pengurus terdiri dari pemimpin dan akademisi perempuan lokal.

<sup>91</sup> Staf program 'Aisyiyah, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016.

<sup>92</sup> Tim Koordinasi 'Aisyiyah/MAMPU, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016.

<sup>93</sup>Para anggota BSA, staf program 'Aisyiyah, kader BSA, wawancara kelompok, Pangkep, September 2016.

<sup>94</sup> Tim Koordinasi 'Aisyiyah/MAMPU, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016.

<sup>95</sup>Perwakilan pemerintah desa, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016.

Tabel berikut berisi data tentang karakteristik demografis utama anggota BSA di lokasi studi lapangan. Dibandingkan dengan contoh-contoh lain yang diteliti, para anggota BSA biasanya memandang diri mereka miskin, dan berpeluang lebih rendah untuk menjadi pekerja formal.

Tabel 5. Karakteristik demografis anggota BSA Pangkep yang disurvei

Usia rata-rata	37 tahun, berkisar antara 26-58 tahun
Status pernikahan	24 menikah, 1 cerai
Kepala rumah tangga	2 responden
Rata-rata ukuran rumah tangga	5, berkisar antara 2-11 anggota keluarga
Pendidikan	Sekolah Dasar (20%), Sekolah Menengah Pertama (20%), Sekolah Menengah Atas (56%), Paket A/B/C (4% - satu responden) <sup>96</sup>
Anggota atau anggota keluarga dengan disabilitas	Ya, 1 responden memiliki anak dengan disabilitas
Status sosio-ekonomi	64% memandang diri mereka berada di tingkat ekonomi menengah, tidak ada yang memandang diri mereka di atas rata-rata dan 36% memandang diri mereka di bawah rata-rata. 60% memandang rumah tangga mereka memiliki pengaruh rata-rata, 32% memandang mereka berada di posisi pengambilan keputusan atau di kelompok berpengaruh, dan 8% merasa berada di dalam kelompok marjinal di masyarakat.
Lapangan kerja dan pendapatan	Tugas domestik (72%); kerja rumahan berbayar (16% penuh waktu); kerja di luar rumah berbayar 8% paruh waktu, 4% penuh waktu). 12% memiliki pendapatan tetap, 16% pendapatan tidak tetap, dan 72% tidak memiliki pendapatan
Identitas hukum dan perlindungan sosial	Semuanya memiliki KTP 4 dari 9 anggota keluarga (44%) menganggap rumah tangga mereka lebih miskin dibandingkan pemegang KPS (kartu perlindungan sosial) lainnya, dan 2 orang (22%) memiliki SKTM. Secara keseluruhan, 32% memiliki KPS dan 36% memiliki SKTM. 28% memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). 40% responden melaporkan menerima Raskin pada tahun sebelumnya, dan 24% adalah penerima Jamkesmas, sementara 24% menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=25)

Seluruh anggota yang disurvei telah berpartisipasi di dalam dua kegiatan atau lebih pada tiga bulan terakhir, khususnya kegiatan sosial (88 persen) dan pelatihan (84 persen). Motivasi awal mereka berpartisipasi adalah untuk pengembangan kapasitas dan keterampilan (80 persen) dan interaksi sosial (72 persen). Kedua motivasi ini masih menjadi motivasi utama, walaupun dalam urutan terbalik - pengembangan kapasitas dan keterampilan (76 persen) dan interaksi sosial (80 persen). Kegiatan yang paling disukai dan paling banyak diikuti adalah pembangunan kapasitas (untuk 56 persen responden), diikuti oleh kegiatan sosial (24 persen responden).

<sup>96</sup>Paket A/B/C adalah paket pendidikan luar sekolah yang setara dengan sekolah dasar (A), sekolah menengah pertama (B), dan sekolah menengah atas (C).



## HASIL AKSI KOLEKTIF

Semua kecuali satu dari 25 anggota yang disurvei merasa bahwa partisipasi mereka di BSA telah membawa hasil positif; satu di antara mereka merasa telah mengalami dampak negatif. Satu orang merasa tidak ada dampak sama sekali. Satu orang merasa mengalami dampak positif dan negatif. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6, manfaat yang paling banyak dilaporkan adalah manfaat di tingkat individu.

Tabel 6. Perubahan pada aset pemberdayaan sejak terlibat di dalam aksi kolektif, sebagaimana dilaporkan oleh anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah yang disurvei

Manfaat individu (aset manusia (kekuatan di dalam))	100%
Aset keuangan dan sumber daya (kontrol)	12%
Peningkatan partisipasi (aset kapasitas (kekuatan untuk))	29%
Aset sosial (kekuatan dengan)	62%
Aset pendukung	0%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=25)

Tes IVA (deteksi kanker serviks) diberikan gratis hanya pada acara-acara khusus, tapi sekarang sudah gratis sepenuhnya. Awalnya, tidak ada layanan tersebut karena anggarannya tidak ada. Setelah dilakukan advokasi dan dukungan dari para bidan, akhirnya pimpinan Puskesmas mengalokasikan anggaran khusus. Jadi, sekarang di Puskesmas Bowong Cidea, Puskesmas Bungaro, Puskesmas Minasatene, dan Puskesmas Pembantu Pangkajene memberikan tes IVA gratis sebagai hasil dari advokasi oleh BSA 'Aisyiyah.

(Staf program 'Aisyiyah, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016)

Pada saat wawancara dengan pemimpin desa dan non-anggota lainnya, sempat dinyatakan adanya peningkatan percaya diri yang signifikan - *'Anggota perempuan menjadi lebih percaya diri dan berani untuk bicara. Saya bisa mengatakan ini karena saya mengenal hampir semua anggota BSA'*,<sup>97</sup> tapi hal ini tidak selalu dinyatakan oleh para anggota BSA sendiri. Ada yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan keterampilan baru - *'Dulu kami tidak tahu bagaimana cara membuat makanan dari ikan, kami dulu hanya tahu ikan itu untuk digoreng atau direbus; sekarang kami bisa membuat abon ikan... (sambil tertawa). Kami sekarang juga bisa membuat keripik pisang....nugget, dari tahu, jadi nugget tahu'*.<sup>98</sup> Tapi, perubahan yang paling tampak nyata adalah perubahan dalam hal akses kepada layanan kesehatan reproduksi.

Beberapa responden berbicara panjang lebar tentang pengaruh BSA dan 'Aisyiyah dalam membangun pengetahuan kesehatan reproduksi perempuan dan akses kepada layanan kesehatan, khususnya yang terkait dengan kanker perempuan.<sup>99</sup> Layanan ini menjadi daya tarik bagi para anggota BSA, dan BSA telah berkontribusi dalam mematahkan tabu-tabu yang secara tradisional membuat perempuan tidak memahami tentang tubuh mereka sendiri:

Meskipun wilayah ini dekat dengan pusat kota, namun dalam beberapa kasus ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih kurang mendapatkan informasi, khususnya tentang kesehatan reproduksi, karena mereka masih malu bahkan untuk sekadar bertanya tentang kesehatan reproduksi.<sup>100</sup>

Pada wawancara kelompok anggota BSA, diperkirakan bahwa sekitar 70 persen anggota telah dapat mengakses layanan-layanan ini. 'Aisyiyah dan BSA telah berhasil mengadvokasi

<sup>97</sup>Perwakilan pemerintah desa, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016.

<sup>98</sup>Anggota BSA, wawancara kelompok, Pangkep, September 2016.

<sup>99</sup>Sebagaimana seluruh wawancara dengan para staf 'Aisyiyah, ini merupakan hal yang menonjol dari wawancara-wawancara yang dilakukan dengan para pasangan anggota BSA; Kader BSA; Bidan Desa/Kepala Puskesmas; perwakilan pemerintah desa; dan Camat, Kecamatan Minasatene (semua diwawancara bulan September 2016).

<sup>100</sup> Tim Koordinasi 'Aisyiyah/MAMPU, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016.

peningkatan layanan di Puskesmas di Biraeng, serta mendorong tenaga kesehatan untuk menjangkau dan memberikan informasi kepada perempuan:

(Layanan tersebut) gratis. Awalnya kami takut, tapi kemudian kami diundang, lagi dan lagi, dan akhirnya kami terpengaruh [untuk mendatangi layanan tersebut]!... "Lebih baik mencegah [kanker] daripada terlambat"... kami mendapatkan pengetahuan, tapi pertama kami kami [datang ke pertemuan], kami takut dan malu. Tapi alhamdulillah, ibu bidan datang langsung ke masyarakat (melalui BSA) dan menjelaskan [tentang layanan tersebut], sehingga akhirnya membuka pikiran kami.<sup>101</sup>

Melalui BSA, pengetahuan dan informasi yang mereka dapatkan bisa ditingkatkan... mereka jadi lebih tahu tentang kesehatan reproduksi... 'Aisyiyah telah membuat terobosan dengan memfasilitasi tes IVA gratis. Pengalaman menunjukkan bahwa para perempuan tidak sungkan lagi untuk diperiksa jika mereka datang bersama-sama. Kemarin, sekitar 100 perempuan diperiksa, yang 50 di antaranya menggunakan JKN.<sup>102</sup>

Dengan keberhasilan meningkatkan akses ke tes deteksi dini, 'Aisyiyah dan BSA mulai memperluas fokus ke masalah lainnya - yaitu perawatan medis bagi mereka yang hasil tesnya positif. Hal ini mendorong lahirnya Gerakan Infaq Sayang Ibu (GISI). Gerakan ini bertujuan untuk melengkapi bantuan yang sudah ada melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang akan membayar biaya perawatan, yang berisi dana untuk transportasi, akomodasi, dan makanan bagi pasien dan pendampingnya. Dana tersebut awalnya dikumpulkan dari iuran anggota BSA. Kemudian 'Aisyiyah mengangkat GISI hingga mendapatkan pengakuan pemerintah, dan pada hari kanker sedunia (23 Oktober), Gubernur Sulawesi Selatan mengumumkan '*Melalui momentum hari kanker sedunia yang dikenal juga sebagai pink day ini, kami berencana menjadikan Kabupaten Pangkep sebagai kabupaten yang menegakkan Gerakan Infaq Sayang Ibu (GISI). Sumbangan Anda dapat menyelamatkan nyawa seorang ibu*'.<sup>103</sup>

Kerja ini mendapatkan pengakuan pada kelompok 'Aisyiyah, sehingga pimpinan desa akhirnya mendatangi BSA:

Pada saat Musrenbang (pertemuan perencanaan pembangunan desa), kami sengaja mengundang perwakilan BSA untuk berbicara tentang rencana program mereka. Ternyata para pejabat desa menanggapi secara positif, dan setelahnya usulan tersebut diteruskan ke pemerintah kabupaten, dan sekarang kami sedang menunggu hasilnya. Ada tiga hal yang mereka usulkan; salah satunya adalah bantuan modal... Kami membantu mereka di tingkat provinsi dan nasional dengan bantuan ('Aisyiyah) di tingkat nasional dan provinsi untuk mendapatkan persetujuan.<sup>104</sup>

## KESIMPULAN

BSA memiliki landasan keagamaan dalam keanggotaan maupun kegiatan intinya, dan telah memperluas keanggotaan tersebut untuk menanggapi kebutuhan praktis perempuan, khususnya akses kepada layanan kesehatan reproduksi. Ini kemudian mendorong terciptanya berbagai manfaat lain. Manfaat tersebut di antaranya adalah peningkatan koneksi dan lintas-keanggotaan dengan kelompok masyarakat lain, termasuk dengan anggota organisasi Islam Indonesia besar lainnya, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), serta peningkatan partisipasi dalam urusan desa - atau setidaknya pengakuan lebih luas atas kesehatan reproduksi perempuan sebagai area perhatian.

Organisasi dan struktur multi-tingkatan 'Aisyiyah ditambah dengan bantuan sektoral (seperti motivator bidan dan BUEKA) jelas sangat membantu dalam menghubungkan para anggota Balai

<sup>101</sup>Anggota BSA, wawancara kelompok, Pangkep, September 2016.

<sup>102</sup>Bidan Desa dan Kepala Puskesmas Pangkep, wawancara mendalam, September 2016.

<sup>103</sup>Lihat <http://www.aktualita.co/pink-day-'Aisyiyah-pangkep-launching-program-gisi/11522/>

<sup>104</sup>Perwakilan pemerintah desa, wawancara mendalam, Pangkep, September 2016.

Sakinah 'Aisyiyah kepada layanan kesehatan dan pemerintah. Advokasi ini telah membuat para perempuan lebih mudah mengakses layanan deteksi kanker, sementara saat ini GISI mulai memberikan bantuan bagi perempuan miskin. Tampak pula bahwa BSA akan terus berjalan bahkan setelah periode bantuan MAMPU berakhir, karena kelompok tersebut diperkuat dengan struktur yang lebih besar, dan terhubung dengan berbagai tingkatan pemerintahan, serta terbantu dengan anggotanya yang berasal dari berbagai usia, yang juga terdiri dari banyak perempuan muda. 'Aisyiyah Pangkep berkomitmen untuk melanjutkan bantuan dan strategi mereka untuk meningkatkan jumlah anggota dengan cara membuka diri terhadap perempuan yang bukan anggota 'Aisyiyah.

Pendekatan terhadap kesehatan reproduksi perempuan terfokus pada aspek klinis - artinya, pendekatan ini terkait bagaimana menciptakan akses kepada prosedur spesifik dan tidak kontroversial, dan bagaimana membuat para anggota lebih banyak berpartisipasi di dalam layanan daripada 'aksi' kolektif. 'Aisyiyah dapat memanfaatkan pintu masuk dari sisi kesehatan reproduksi ini, dan memasukkan pembahasan hak, berbagai jenis pengetahuan, serta kekuatan pengambilan keputusan. Hal ini merupakan isu yang penting dan juga tantangan bagi organisasi berbasis keagamaan, namun di MAMPU, hal seperti ini harus diupayakan. Tanpa upaya ini, risikonya adalah BSA akan terus memfokuskan kesehatan reproduksi sebagai isu perempuan, dan tidak akan menanganinya sebagai prioritas, dibandingkan jika mendekatinya dengan analisis gender dan kemiskinan holistik di dalam rumah tangga, komunitas dan masyarakat luas.

## LAMPIRAN: RANGKUMAN KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan ini dilaksanakan pada September 2016 dan terdiri dari diskusi kelompok dan wawancara mendalam, serta pelaksanaan survei anggota dan fasilitator. Studi lapangan ini dilengkapi dengan wawancara awal dengan koordinator program MAMPU 'Aisyiyah, staf pengembangan masyarakat, dan staf pengembangan organisasi yang dilakukan pada bulan Juli 2016 di Yogyakarta, serta kajian (*review*) dokumen.

Tabel 7. Peserta studi lapangan: Balai Sakinah 'Aisyiyah, Pangkep

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Diskusi kelompok		
Anggota BSA, desa Biraeng	8	
Perwakilan pasangan anggota		6
Organisator masyarakat (kader BSA di tingkat desa)	7	
Tim Manajemen 'Aisyiyah	5	
Informan utama		
Koordinator bidan dan Kepala Puskesmas Minasatene	2	
Kepala dan staf Desa Biraeng		2
Camat, Kecamatan Minasatene		1
Administrator BUEKA/anggota BSA	1	
Staf BSA kabupaten	1	
Tim koordinasi kabupaten 'Aisyiyah-MAMPU	4	
Survei		
Anggota aksi kolektif - sampel acak sehingga setiap BSA terwakili oleh kelima	25	



anggotanya

---

Fasilitator/staf

---

14



## 2. Serikat PEKKA

**Fokus studi kasus:** Kecamatan Lingsar, Sukerede, Krisna Loka, kelompok dan kelompok gabungan dari Desa Batu Kumbung yang terdiri dari anggota dari Embun Pagi, Pondok Indah, dan kelompok Pondok Harapan, Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB

**Mitra MAMPU terkait** Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) (Sekretariat Nasional PEKKA)

### FOKUS DAN ASAL AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN

PEKKA didirikan pada tahun 2000, didasari ide awal dari Komnas Perempuan, untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di kawasan konflik Aceh, dan niat Program Pembangunan Kecamatan untuk membantu mereka untuk mengakses sumber daya untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan trauma yang mereka hadapi.<sup>105</sup> Saat ini PEKKA telah berkembang menjadi organisasi terbesar yang bergerak di bidang rumah tangga dikepalai perempuan di Indonesia, yang hadir di 20 provinsi, 65 kabupaten, 229 kecamatan dan 855 desa.

Tulang punggung PEKKA adalah jaringan kadernya di tingkat kecamatan. Kader-kader ini membentuk kelompok di tingkat desa, yang dikenal sebagai Serikat PEKKA. Para kader PEKKA mendorong para kepala desa atau dusun, pemimpin perempuan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pengembangan rumah tangga yang dikepalai perempuan. PEKKA bekerja keras untuk mengatasi hambatan dan stereotipe terkait janda atau perempuan tidak menikah, bercerai, atau berpisah. Di banyak daerah di Indonesia, budaya setempat mengatur bahwa perempuan-perempuan seperti ini tidak boleh memiliki kehidupan sosial atau muncul di hadapan umum.

Pintu masuk PEKKA untuk para anggota Serikat PEKKA adalah kegiatan simpan pinjam yang bertujuan meningkatkan peluang ekonomi dan keamanan sosial para anggota, yang dilanjutkan dengan pengembangan kapasitas dan area pengetahuan lainnya. Dukungan dari MAMPU digunakan untuk membantu perluasan kelompok Serikat PEKKA, termasuk untuk pelatihan, administrasi, kunjungan lapangan dan mentoring, serta upaya advokasi lainnya.<sup>106</sup>

Sebelum hadirnya MAMPU, PEKKA memiliki sekitar 10 kelompok di kecamatan Lingsar, yang menjadi fokus penelitian ini, yang sekarang telah berkembang menjadi 13 kelompok, dengan perluasan lebih lanjut di kecamatan lainnya. Dari kelompok-kelompok yang dimasukkan ke dalam studi kasus ini, kelompok Sukerede adalah yang paling tua yang dibentuk pada 2005. Krisna Loka dibentuk pada 2014 sebagai bagian dari perluasan di bawah MAMPU. Pondok Indah, Pondok Harapan, dan Embun Pagi dibentuk pada 2003, 2006 dan 2011.

### CIRI-CIRI AKSI KOLEKTIF

Serikat PEKKA bergerak di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Visi dan misi PEKKA dan fokus programnya dijalankan secara berlapis di setiap tingkatan, dan fokus PEKKA yang jelas untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan perempuan kepala rumah tangga menjadi panduan dalam segala kegiatan/interaksinya.

<sup>105</sup> Dikutip dari <http://www.pekka.or.id/index.php/en/about-us.html>

<sup>106</sup> Fasilitator Lapangan PEKKA, wawancara mendalam, Lingsar, Oktober 2016.

Kelompok-kelompok tersebut memiliki struktur standar yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris untuk setiap kelompok, dan mayoritasnya juga memiliki daftar anggota. Para staf administratif umumnya dilatih oleh Sekretariat Nasional PEKKA terkait area-area inti seperti keterampilan paralegal dan hukum, serta pembukuan. Mereka juga dapat berpartisipasi di dalam pelatihan tematik seperti tentang kesehatan reproduksi, permakultur, dan seterusnya. Para staf administratif ini kemudian menyebarkan isi pelatihan yang mereka dapatkan kepada para anggota Serikat PEKKA lain di dalam pertemuan kelompok.

Kegiatan kelompok Serikat PEKKA di desa terdiri dari acara kumpul sosial, pertemuan bulanan, dan simpan pinjam yang dilakukan melalui arisan. Seiring dengan perkembangan kelompok, mereka mulai terlibat di dalam advokasi yang bertujuan menciptakan akses lebih besar kepada layanan publik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang berbagai isu. Pada beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok tersebut juga mulai berfokus menyebarkan informasi tentang pentingnya dokumen identitas hukum, termasuk KTP, kartu keluarga, akta nikah, dan akta lahir, serta mengadvokasi layanan identitas hukum yang lebih aksesibel dan gratis atau murah, serta akses kepada bantuan sosial dan asuransi seperti asuransi kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN).

Untuk anggota dari latar belakang pendidikan rendah, beberapa kelompok menyediakan kegiatan untuk belajar membaca, menulis, dan mendapatkan informasi melalui program Kelompok Belajar Paket A (pendidikan setara SD). Para kader juga dapat terus mengikuti program-program pendidikan tersebut yang mencakup hukum, pembukuan, gender, *public speaking*, advokasi, dan penyelenggaraan organisasi.<sup>107</sup> Misalnya, para anggota kelompok Krisna Loka belajar tentang cara mengakses modal usaha, dan juga kesadaran gender maupun identitas hukum; kelompok Pondok Harapan, Embun Pagi dan Pondok Indah berfokus pada simpan pinjam, namun seiring waktu mulai memperluas fokusnya pada akses kepada informasi dan layanan publik. Serikat PEKKA Sukerede bergabung dengan koperasi Nur Falah, yang dilanjutkan dengan pembentukan badan hukum berbasis simpan pinjam di NTB.<sup>108</sup>

Kelompok PEKKA memiliki hubungan erat dengan berbagai tingkatan pemerintah dan kelompok non-pemerintah; 'kegiatan-kegiatan kami membuat kami bertemu dengan Bupati dan stafnya, serta CSO lain seperti KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), BaKTI, LPA (Lembaga Perlindungan Anak), akademisi, maupun PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita)'.<sup>109</sup>

## ANGGOTA KELOMPOK

Secara tradisi, anggota Serikat PEKKA adalah perempuan kepala keluarga; situasi yang biasanya terjadi karena suami meninggal, bercerai atau berpisah, maupun karena ditinggalkan suami. Anggota PEKKA kebanyakan berasal dari kelompok miskin dan rentan di masyarakat.

Kelompok Krisna Loka dibentuk oleh perempuan kepala keluarga dari minoritas Hindu di masyarakat mayoritas Muslim. Sebagian besar dari mereka tidak lulus SD, dan buta huruf. Mereka mencari penghidupan dengan membuka warung kecil, atau sebagai buruh, PRT, maupun pemulung. Sebagaimana di daerah-daerah lain, para anggota awalnya menghadapi hambatan budaya untuk berpartisipasi karena adanya tabu yang mengakar yang melarang perempuan bergabung dengan kelompok atau organisasi.

<sup>107</sup>Fasilitator Lapangan PEKKA, Ketua PKK, wawancara mendalam, Lingsar, Oktober 2016.

<sup>108</sup>Agar dapat bergabung, suatu kelompok harus dapat menunjukkan adanya kekuatan organisasi yang mencukupi, termasuk misalnya adanya kegiatan rutin, atau memiliki program simpan pinjam yang sudah berjalan setidaknya dua tahun. Koperasi Nur Falah mengembangkan modalnya hingga sekitar empat miliar rupiah yang digunakan untuk memberikn pinjaman kepada para anggotanya.

<sup>109</sup>Fasilitator Lapangan PEKKA, wawancara mendalam, Lingsar, Oktober 2016.



Serikat PEKKA Pondok Harapan, Embun Pagi dan Pondok Indah menunjukkan adanya perubahan dasar pembentukan kelompok, dengan membuka keanggotaan kepada perempuan yang masih menikah dan tinggal bersama suami mereka; meskipun perempuan menikah hanya sekitar sepertiga dari anggota kelompok. Serikat PEKKA Sukerede lebih besar dengan anggota 35 orang, yang semuanya adalah perempuan kepala keluarga, dan umumnya belum memiliki pengalaman berorganisasi atau berpartisipasi di dalam kelompok. Serikat PEKKA Kecamatan Lingsar mencakup administrator di kelompok tingkat desa. Para anggotanya adalah kader-kader yang sudah mendapatkan pelatihan, keterampilan dan pengembangan diri yang lebih maju yang diberikan oleh Sekretariat Nasional/Yayasan. Perwakilan kecamatan berasal dari kelompok desa, dan karenanya memiliki latar belakang, pendidikan formal, dan pengalaman termarjinalisasi yang sama seperti para perempuan kepala keluarga. Para administrator memiliki peran inti di dalam model aksi kolektif PEKKA, yaitu *'sebagai orang-orang yang memiliki kapasitas, waktu, dan komitmen'*.<sup>110</sup>

Survei kuantitatif yang dilakukan kepada anggota kelompok menunjukkan bahwa dibandingkan dengan contoh aksi kolektif lain yang diteliti, anggota Serikat PEKKA lebih mungkin berlatar pendidikan rendah, serta memandang rumah tangga mereka lebih miskin dibandingkan rata-rata rumah tangga lain di tempat mereka tinggal (lihat Tabel 8).

Tabel 7. Karakteristik demografis anggota Serikat PEKKA yang disurvei

Usia rata-rata	52 tahun, berkisar antara 32-77 tahun
Status pernikahan	4 menikah, 6 berpisah, 2 belum menikah, 9 bercerai
Kepala rumah tangga	171 (81 persen)
Rata-rata ukuran rumah tangga	3, berkisar antara 1-5 anggota keluarga
Pendidikan	Tidak sekolah (43%), Sekolah Dasar (28%), Sekolah Menengah Pertama (19%), Sekolah Menengah Atas (5% - 1 responden), Paket A/B/C (5% - 1 responden)
Anggota atau anggota keluarga dengan disabilitas	Ya, 1 orang tua responden
Status sosio-ekonomi	57% memandang diri mereka berada di tingkat ekonomi menengah, 5% memandang diri mereka di atas rata-rata dan 38% memandang diri mereka di bawah rata-rata. 71% memandang rumah tangga mereka memiliki pengaruh rata-rata, 29% memandang mereka berada di posisi pengambilan keputusan atau di kelompok berpengaruh, dan tidak ada yang merasa berada di dalam kelompok marjinal di masyarakat.
Lapangan kerja dan pendapatan	Tugas domestik (14%); kerja rumahan berbayar (48% penuh waktu); kerja di luar rumah berbayar (10% paruh waktu, 29% penuh waktu). Tidak ada responden yang memiliki pendapatan tetap, 86% pendapatan tidak tetap, dan 14% tidak memiliki pendapatan
Identitas hukum dan perlindungan sosial	Semuanya memiliki KTP 7 (33%) memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seluruh responden (3 responden) (14%) memiliki SKTM, dan 7 orang (33%) memiliki KPS. 33% memiliki kartu jaminan kesehatan nasional. Tidak ada dari ke-8 perempuan tersebut yang memandang rumah tangga mereka lebih miskin dibandingkan dengan rata-rata yang memiliki KPS, dan 1 memiliki SKTM.

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=21)

<sup>110</sup> Ibid.

Motivasi awal para anggota yang disurvei untuk bergabung dengan Serikat PEKKA adalah untuk interaksi sosial (43 persen), meningkatkan pendapatan (29 persen), dan meningkatkan kapasitas dan keterampilan pribadi (33 persen). Sementara itu motivasi untuk terus bergabung telah berubah. Seluruh anggota yang disurvei mengatakan motivasi mereka adalah mendapatkan interaksi sosial dan meningkatkan keterampilan dan kapasitas pribadi, dan 90 persen mengatakan untuk meningkatkan pendapatan.

Mayoritas (86 persen) anggota yang disurvei telah berpartisipasi di tiga kegiatan pada tiga bulan sebelumnya, sementara sebagian lainnya berpartisipasi di enam kegiatan. Kegiatan yang diikuti mayoritas anggota adalah simpan pinjam (seluruh responden), kegiatan sosial (95 persen), dan advokasi (48 persen). Simpan pinjam adalah yang paling banyak dinikmati anggota, yaitu 81 persen responden.

Keinginan yang kuat untuk melakukan interaksi sosial mungkin terkait erat dengan rendahnya kepercayaan masyarakat dan stigma terhadap janda, yang dilaporkan oleh para perempuan di ketiga diskusi kelompok mereka alami sebelum bergabung dengan kelompok:

Masyarakat berpikir kalau seorang janda keluar rumah, dia akan menggoda suami orang. Kami dilecehkan, direndahkan dan dimarjinalkan. Ketika kami bicara, kami tidak pernah didengar atau dihargai.<sup>111</sup>

Ada yang mentertawakan kami, dan kami betul-betul diremehkan dan dihina.

Sebelum ada PEKKA, ada pandangan bahwa janda tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh pergi ke mana pun. Jika kami keluar, maka dianggap kami akan mengganggu suami perempuan lain. Jadi sangat negatif.<sup>112</sup>

## HASIL AKSI KOLEKTIF

Seluruh responden survei anggota melaporkan bahwa partisipasi mereka membawa dampak positif, dan tidak ada yang melaporkan dampak negatif maupun campuran. Sebagaimana ditunjukkan pada **Error! Reference source not found.**, seluruh responden merasa bahwa mereka telah mendapat manfaat dalam hal peningkatan keyakinan diri, percaya diri dan keterampilan, serta dalam hal situasi keuangan. Dua per tiga responden merasa manfaat yang paling besar yang didapatkan adalah peningkatan aset keuangan dan sumber daya mereka.

Tabel 8. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota Serikat PEKKA yang disurvei

Manfaat individu (aset manusia (kekuatan di dalam))	100%
Aset keuangan dan sumber daya (Kekuatan di atas)	100%
Peningkatan partisipasi (aset kapasitas (kekuatan untuk))	62%
Aset sosial (kekuatan dengan)	86%
Aset pendukung	43%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=21)

Para anggota Serikat PEKKA awalnya melaporkan adanya peningkatan percaya diri karena merasa menjadi bagian dari sebuah organisasi, khususnya karena 'mereka tidak pernah bergabung dengan organisasi perempuan sebelumnya... Kelompok tersebut memungkinkan para anggotanya mengekspresikan diri dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat'.<sup>113</sup>Interaksi

<sup>111</sup> Kader, Serikat PEKKA Sukerede, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016.

<sup>112</sup> Kader, Serikat PEKKA Kecamatan Lingsar, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016.

<sup>113</sup>Fasilitator Lapangan PEKKA, wawancara mendalam, Lingsar, Oktober 2016.

sosial, khususnya dengan perempuan kepala keluarga lain, memberikan mereka perasaan senasib - 'ketika bertemu teman, kami bisa tertawa, bercanda, dan berpikir. Ada informasi yang diberikan. (Sekarang saya) punya banyak teman'.<sup>114</sup>

Di setiap kelompok, juga disebutkan adanya perubahan dalam peluang ekonomi, khususnya dalam hal akses kepada kredit, dan pada beberapa kasus lainnya, kepada kemandirian ekonomi.

Kami dulu takut meminjam uang, dan tidak ada juga yang percaya pada kami, khususnya karena kami janda. "Siapa yang nanti akan membayar hutangnya?" Tapi sebagai kelompok, kami bisa meminjam... Awalnya kami meminjam 100.000 rupiah, lalu 200.000. Kemudian setelahnya kami bergabung dengan koperasi, lalu kami bisa meminjam 500.000. Seiring waktu, kami bisa meminjam lima sampai enam juta rupiah. Kami menggunakan uangnya untuk beternak ikan, membeli bibit, dan pakan.<sup>115</sup>

Sebelumnya saya tidak punya warung, sekarang saya punya. Sebagai anggota (PEKKA), saya bisa meminjam uang untuk warung... sekarang saya punya pendapatan sendiri. Sebelumnya, kalau saya ingin membeli sesuatu, saya tidak berani [membelinya] karena saya harus memintanya kepada suami saya. Sekarang ketika saya ingin membeli sesuatu, saya bisa membelinya dengan uang saya sendiri.<sup>116</sup>

Sekarang saya jadi pedagang buah, saya punya tiga anak, dan suami saya sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Semua teman saya belum menikah; mereka bekerja serabutan. Untuk kebutuhan sehari-hari, saya biasa dibantu anak-anak saya... Saya senang sekali bisa bergabung dengan kelompok ini karena saya bisa meminjam uang. Saya meminjam sampai 2 juta sebagai modal untuk berjualan buah-buahan. Meminjam uang di kelompok usaha ini sangat menguntungkan, karena bunganya rendah. Dulu saya meminjam dari lintah darat, bunganya sangat tinggi; tapi dengan adanya kelompok ini, saya tidak akan pinjam dari lintah darat (Bank Rontok) lagi.<sup>117</sup>

Dengan meningkatnya percaya diri dan pengetahuan, kader Serikat PEKKA terus meningkatkan kemampuan mereka untuk berbicara di depan umum (*public speaking*), yang juga disadari oleh kepala desa: '*Sebelum bergabung dengan PEKKA, ibu-ibu ini malu dan tidak berani bicara di depan umum. Tapi sekarang saya bisa melihat... bahkan di forum pun mereka berani bicara... dan bagus sekali. Ibu-ibu ini berbeda dari warga lain yang kurang berpendidikan dan pengalaman*'.<sup>118</sup>

Terkadang kader menjalankan peran lain di masyarakat dan memfasilitasi akses kepada layanan; administrator kelompok Krisna Loka juga merupakan kader posyandu dan menjadi bagian dari kelompok kerja kesehatan PKK. Salah satu kader kelompok Embun Pagi juga adalah kader posyandu dan terlibat dalam menyebarkan informasi tentang dokumen identitas hukum. Kader PEKKA terlibat dalam mendampingi perempuan korban kekerasan, berpartisipasi di dalam forum perencanaan pembangunan, termasuk memberikan informasi untuk penyusunan anggaran desa, mengadvokasi peningkatan akses kepada identitas hukum dan perlindungan sosial bagi

Setelah kami bergabung dengan kelompok, orang-orang mulai memandang kami, tapi mereka curiga. Jika kami diundang untuk menghadiri pertemuan di hotel, tetangga-tetangga mengatakan kami mau diperdagangkan, dijual ke Jakarta, atau 'dibuat jadi pupuk'. Tapi sekarang semuanya berbeda. Pelatihan hukum, misalnya, memberikan banyak manfaat...

Kami mendapatkan pelatihan, kami mengetahui manfaatnya, lalu kami berbagi baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok, kepada tetangga-tetangga... mereka melihat buktinya. Sejak itu, banyak orang meminta saran dari kami, bukan hanya anggota saja.

Kader, Serikat PEKKA Sukerede, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016.

<sup>114</sup> Kader, Serikat PEKKA Sukerede, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016.

<sup>115</sup> ibid.

<sup>116</sup> Kader, Serikat PEKKA Kecamatan Lingsar, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016.

<sup>117</sup> Kader, Serikat PEKKA Krisna Loka, wawancara kelompok, Lingsar, Oktober 2016

<sup>118</sup> Kepala desa, wawancara mendalam, Lingsar, Oktober 2016

perempuan miskin, dan menyediakan data dari pemetaan kemiskinan masyarakat yang telah dilakukan.

Peran luas para kader di masyarakat ini membuat para kader Serikat PEKKA dipandang membawa manfaat bagi masyarakat, dan menjadi bagian solusi dari berbagai masalah di masyarakat. Proses ini meruntuhkan sejumlah stigma yang sebelumnya mereka alami karena tidak memiliki suami, dan pandangan bahwa janda dan janda cerai adalah beban.

## KESIMPULAN

Dengan berpartisipasi di Serikat PEKKA, banyak perempuan kepala rumah tangga dapat bersatu dan membangun kekuatan kolektif untuk mengatasi hambatan budaya dan mendapatkan akses dan peluang politik dan ekonomi. Metodologi ini dimulai dengan interaksi sosial dan dukungan sejawat, lalu dilanjutkan dengan membantu perempuan memenuhi kebutuhan ekonomi dasar mereka, seperti melalui simpan pinjam dan akses kepada kredit yang lebih besar. Seluruh pintu masuk ini dibangun melalui informasi, pelatihan, dan paparan kepada masyarakat luas melalui pertemuan besar di PEKKA maupun pertukaran lainnya. Hal ini membuat para anggota kemudian bekerja pada isu-isu yang menjangkau masyarakat secara luas (seperti akses kepada dokumen identitas hukum). Dari hal tersebut, anggota Serikat PEKKA mendapatkan status dan legitimasi. Mereka mendapatkan percaya diri untuk bicara, dan mereka dipandang berkontribusi kepada desa; reaksi-reaksi positif terhadap kegiatan mereka semakin memperlancar perubahan ini.

Selain nilai solidaritas, keberlanjutan kelompok-kelompok ini, khususnya motivasi anggota untuk terus bergabung, tampak didasarkan pada potensi manfaat ekonomi melalui kegiatan simpan pinjam, serta interaksi sosial yang tanpa bergabung akan sulit mereka nikmati. Penyediaan pelatihan dan informasi yang bertahap dan beragam, yang mencakup fokus pada pengembangan keterampilan advokasi, telah membekali Serikat PEKKA dengan semangat relawan, dan alat dan motivasi untuk terlibat dengan berbagai layanan maupun pemegang kekuasaan tradisional untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan maupun masyarakat. Keberhasilan mereka juga mendorong terjadinya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap perempuan kepala rumah tangga dibandingkan sebelumnya yang hanya sebagai kelompok termarjinalkan.

## LAMPIRAN: RANGKUMAN KERJA LAPANGAN - SERIKAT PEKKA

Kerja lapangan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 dan terdiri dari diskusi kelompok dan wawancara mendalam yang dilakukan di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Para peneliti juga mengamati kehidupan sehari-hari dan interaksi di desa tersebut. Studi lapangan ini dilengkapi dengan wawancara awal dengan Koordinator Nasional PEKKA dan staf PEKKA yang dilakukan pada bulan Juli 2016 di Yogyakarta, serta kajian (*review*) dokumen.

Tabel 9. Peserta studi lapangan: Serikat PEKKA, Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Diskusi kelompok		
Kader tingkat kabupaten	10	
Anggota tanpa suami	11	
Anggota dengan suami	11	
Suami anggota		10
Kelompok baru	11	

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
<b>Informan utama</b>		
Kepala Dusun Batu Kumbang		1
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Batu Kumbang.		1
Kepala Dusun Pemangkalan		1
Kepala Desa Batu Mekar		1
Kepala PKK	1	
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		1
Bidan	1	
Staf lapangan PEKKA	1	
Kepala bagian pemberdayaan masyarakat desa		1
<b>Survei</b>		
Survei anggota	21	
Survei fasilitator (Nasional = 4, Provinsi = 15, Kabupaten = 1)	20	



### 3. Sekolah Perempuan

Fokus studi kasus:	<b>Sekolah Perempuan Hebat, 119Desa Kesamben Kulon, Kabupaten Gresik, Jawa Timur</b>
Mitra MAMPU terkait	<b>Kapal Perempuan dengan sub-mitra Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KP2SK)</b>

#### FOKUS DAN ASAL AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN

Sekolah Perempuan Hebat adalah kelompok belajar tingkat desa yang dibentuk untuk memberikan pendidikan umum serta melakukan advokasi bagi kelompok miskin. Pembentukannya difasilitasi oleh Kapal Perempuan sebagai bagian dari kegiatan yang didukung MAMPU dengan bermitra dengan KPS2K di Gresik. KPS2K telah membentuk empat Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik, dan berfokus pada wilayah miskin (zona merah), berdasarkan penetapan dari Pemerintah Kabupaten Gresik.

KPS2K membentuk dua Sekolah Perempuan pertama di Kesamben Kulon (fokus studi kasus ini) dan Desa Sooko, lalu diperluas ke Desa Mondoluku dan Desa Sumbergede.

Karena mayoritas anggota Sekolah Perempuan adalah buruh tani miskin, topik dan jadwalnya dikembangkan berdasarkan lingkungan kerja para petani tersebut.

Untuk menyusun kegiatan Sekolah Perempuan, staf lapangan KPS2K yang sudah dikenal dan dihormati di lingkungan setempat mulai mengidentifikasi perempuan miskin di Desa Kesamben Kulon dan Sooko pada 2013. Staf lapangan tersebut kemudian membangun kepercayaan dan minat para perempuan di masyarakat untuk bergabung, dan inisiatif tersebut diluncurkan di Desa Kesamben Kulon pada 2014, dengan dihadiri oleh camat dan perwakilan pemerintah kabupaten. Hari ini, Sekolah Perempuan Hebat memiliki berbagai kegiatan:

Kaim berpartisipasi di forum komunitas MAMPU, di pertemuan perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kecamatan, Car Free Day di Gresik, Jambore, acara radio, peluncuran buku di Jember, parade budaya, seminar parenting dari Pemerintah Kabupaten, 'Minggu Aksi Pendidikan' di Unair Surabaya, Pemerintah Kabupaten Remo, menari, (memfasilitasi akses kepada) tes IVA (deteksi kanker), membantu pembuatan Surat Pernyataan Miskin dan KTP, mengelola pertanian kolektif, dan sekarang mengelola bank sampah.<sup>120</sup>

#### CIRI-CIRI AKSI KOLEKTIF

Kelompok Sekolah Perempuan Hebat memiliki badan administrasi harian yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Tim Pemantauan Komunitas atau TP-Kom yang menangani empat desa di mana kelompok Sekolah Perempuan dibentuk, dan menjadi '*jembatan antar masyarakat dengan kabupaten untuk hal-hal seperti informasi, data, dan pemantauan kegiatan*'.<sup>121</sup>TP-Kom terlibat dalam memantau pelaksanaan program pemerintah, seperti keberhakan dan penerimaan

<sup>119</sup> Sekolah Perempuan Hebat diterjemahkan sebagai 'School for Strong Women' dalam Bahasa Inggris. Kami tetap menggunakan nama Indonesianya di sepanjang laporan ini.

<sup>120</sup> Anggota, Sekolah Perempuan Hebat, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016.

<sup>121</sup> Perwakilan manajemen KPS2K, wawancara mendalam, Gresik, September 2016.

perlindungan sosial oleh keluarga miskin. Tim tersebut terdiri dari anggota aktif Sekolah Perempuan, yang berusaha mengidentifikasi perempuan miskin.

Forum multi-pihak dilaksanakan di tingkat desa dan kabupaten dengan tujuan untuk mendorong pengembangan jaringan ke luar, memfasilitasi akses kepada data sekunder yang dibutuhkan oleh Sekolah Perempuan dan TP-Kom, serta mendorong pembagian sumber daya seperti anggaran dan fasilitas. Forum-forum ini memiliki tingkat partisipasi yang lebih luas dan sengaja melibatkan anggota masyarakat elit di desa dan kabupaten yang memiliki pengaruh untuk mendukung atau menindaklanjuti temuan dari tim pemantau kabupaten.

Anggota Sekolah Perempuan menyoroti pentingnya perantara dari KPS2K, yang terlibat pada saat awal pembentukan kelompok tersebut. Ia dapat mengelola seluruh kelompok dan dihormati oleh seluruh anggota. Mereka khawatir tentang yang akan terjadi jika staf tersebut diganti.

## ANGGOTA KELOMPOK

Anggota Sekolah Perempuan Hebat dipilih dengan tujuan memilah antara perempuan miskin (sekitar 80 persen) dan perempuan kelas menengah (20 persen). Anggota kelompok yang lebih berpengaruh seringkali memiliki peran lain seperti sebagai anggota PKK dan terlibat dengan posyandu. KPS2K melaporkan bahwa ini merupakan strategi yang disengaja untuk mendorong dinamika dan membuat kelompok tidak lagi eksklusif. Tabel 11 menunjukkan bahwa sifat keanggotaan kelompok yang campuran ini, dengan berbagai persepsi yang ada pada berbagai tingkatan pengaruh dan status ekonomi.

Tabel 10. Karakteristik demografis anggota Sekolah Perempuan Hebat yang disurvei

Usia rata-rata	33 tahun, berkisar antara 20-48 tahun
Status pernikahan	17 menikah, 1 belum menikah, 2 cerai
Kepala rumah tangga	1
Rata-rata ukuran rumah tangga	4 anggota, berkisar antara 1-7 anggota
Pendidikan	Tidak sekolah (5% - 1 responde), Sekolah Dasar (45%), Sekolah Menengah Pertama (45%), Paket A/B/C (5%)
Anggota atau anggota keluarga dengan disabilitas	No
Status sosio-ekonomi	65% memandang diri mereka berada di tingkat ekonomi menengah, 5% memandang diri mereka di atas rata-rata dan 30% memandang diri mereka di bawah rata-rata. 65% memandang rumah tangga mereka memiliki pengaruh rata-rata, 20% memandang mereka berada di posisi pengambilan keputusan atau di kelompok berpengaruh, dan 15% merasa berada di dalam kelompok marginal di masyarakat.
Lapangan kerja dan pendapatan	Tugas domestik (35%); kerja rumahan berbayar (25% paruh waktu; 20% penuh waktu); kerja di luar rumah berbayar (20% paruh waktu). 45% memiliki pendapatan tetap, 20% pendapatan tidak tetap, dan 35% tidak memiliki pendapatan
Identitas hukum dan perlindungan sosial	Semuanya memiliki KTP Ke-6 anggota menganggap rumah tangga mereka lebih miskin dibandingkan pemegang KPS (kartu perlindungan sosial) lainnya, dan 1 orang (17%) memiliki SKTM. Secara keseluruhan, 65% memiliki KPS dan 20% memiliki SKTM. 28% memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). 95% responden melaporkan menerima Raskin pada tahun sebelumnya, dan 75% adalah penerima Jamkesmas, sementara

## 25% menerima Program Keluarga Harapan

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=20)

Para anggota tampak aktif, dengan 75 persennya melaporkan bahwa mereka telah berpartisipasi di enam kegiatan atau lebih pada tiga bulan sebelumnya. Namun tingkat partisipasi menurun seiring dengan musim tani. Dua motivasi awal utama bagi perempuan untuk bergabung dengan Sekolah Perempuan Hebat adalah pembangunan kapasitas (sekitar dua per tiga anggota yang disurvei) dan beresialisasi (setengah anggota yang disurvei). Hal ini terus menjadi motivasi utama bagi para perempuan untuk terus aktif di dalam organisasi. 95 persen responden telah mengikuti keterampilan pembangunan kapasitas, dan dari seluruh kegiatan, yang manfaatnya paling dirasakan adalah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan (45 persen) dan pelatihan umum dan pengembangan keterampilan (30 persen).

## HASIL AKSI KOLEKTIF

Seluruh responden survei merasa bahwa partisipasi mereka di Sekolah Perempuan Hebat telah membawa dampak positif - 85 persen. 15 persen merasa bahwa selain mengalami dampak positif, mereka juga mengalami dampak negatif, khususnya dalam hal komitmen waktu yang mengganggu waktu mereka mencari nafkah.

Tabel 11. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota Sekolah Perempuan Hebat yang disurvei

Manfaat individu (aset manusia (kekuatan di dalam))	100%
Aset keuangan dan sumber daya (Kekuatan di atas)	5%
Peningkatan partisipasi (aset kapasitas (kekuatan untuk))	25%
Aset sosial (kekuatan dengan)	60%
Aset pendukung	25%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=20)

Perubahan pada aset pemberdayaan bersumber dari peningkatan percaya diri - '*sudut pandang akan hidup berubah, percaya diri meningkat*',<sup>122</sup> semua hal ini mendorong perempuan berani berbicara dan berpartisipasi lebih luas:

Saya belum pernah diundang ke Musrenbang sebelumnya, lalu saya diundang... sebelumnya saya tidak pernah berani berbicara di depan banyak orang, tapi sekarang saya malah menjadi MC acara tersebut.<sup>123</sup>

Peningkatan percaya diri ini juga dibenarkan oleh para pengamat di kelompok:

Manfaat bergabung dengan kegiatan-kegiatan ini adalah para anggota perempuan sekarang bisa menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan berani untuk tampil. Selain itu, kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, misalnya berkat adanya bank sampah, input data, dan juga data tentang perempuan hamil atau orang tua.<sup>124</sup>

Sekolah Perempuan Hebat membangkitkan keberanian saya untuk keluar dari lingkungan saya, mengatasi ketakutan dan kekhawatiran saya, baik ketakutan atas kondisi fisik saya sendiri, orang tua kami, atau suami kami yang selalu melarang kami, dan rasa takut terpisahkan dari anak-anak kami. Saya lawan semua ketakutan itu... dan sekarang saya dapat mengungkapkan atau menyampaikan keluhan saya. Ketika saya diundang ke Musrenbang, atau diundang untuk berkomunikasi dengan kepala desa, saya sudah lebih berani untuk berbicara.

(Anggota Sekolah Perempuan Hebat dan TP-Kom, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016)

<sup>122</sup> Koordinator Desa, Sekolah Perempuan Hebat - Kesamben Kulon, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016

<sup>123</sup> Anggota, Sekolah Perempuan Hebat, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016.

<sup>124</sup> Bendahara PKK, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016

Dulu, mereka jarang keluar rumah dan terlalu malu untuk bicara. Sekarang, setelah menjadi anggota, mereka lebih percaya diri. Banyak dari mereka kemudian terlibat di dalam berbagai acara di desa, seperti Musrenbangdes.<sup>125</sup>

Kaum laki-laki juga melihat bahwa 'dulu perempuan selalu duduk di belakang. Tapi sekarang tidak lagi. Perempuan telah berani untuk duduk di depan dan bicara'.<sup>126</sup>

Sekolah Perempuan Hebat telah berkontribusi dalam meningkatkan akses kepada layanan, termasuk fasilitas air bersih:

Sekolah Perempuan memainkan peranan dalam mengembangkan fasilitas air bersih yang berharga lebih dari 300 juta rupiah. Proses penulisan proposal untuk tujuan tersebut dibantu oleh Sekolah Perempuan. Kepala desa juga menugaskan mereka untuk membantu melaksanakan program tersebut.<sup>127</sup>

Para anggota Sekolah Perempuan Hebat juga terlibat dalam pendistribusian kartu kesehatan dan pendidikan untuk bantuan sosial serta meningkatkan akuntabilitas program-program tersebut:

Sekolah Perempuan Hebat membuat saya berani menghapus nama warga yang tidak berhak mendapatkan Raskin atau bantuan lainnya dari daftar penerima bantuan;<sup>128</sup>

dan juga layanan kesehatan:

Mereka dulu mendiskriminasi orang miskin, tapi sekarang mereka tahu para perempuan dari Sekolah Perempuan Hebat bisa mengakses langsung layanan ke kabupaten. Sekarang mereka sudah mengubah sikap mereka, dan bersedia mengecek dan memberikan layanan kepada perempuan miskin.<sup>129</sup>

Meskipun tampak terdapat peningkatan partisipasi yang signifikan di dalam diskusi komunitas, hal ini belum menghasilkan dukungan nyata yang signifikan dari pemerintah desa. Misalnya, di dalam Musrenbangdes terakhir, Sekolah Perempuan Hebat memasukkan 10 usulan yang tidak satupun dimasukkan ke dalam rencana dan anggaran final '*karena biayanya terlalu tinggi*'.<sup>130</sup>

Ada beberapa contoh perubahan terbatas dalam hal aset keuangan dan sumber daya (sebagaimana diperlihatkan juga pada survei anggota, lihat Tabel 12), namun hal ini menciptakan cukup optimisme:

...kami juga sekarang belajar cara mengelola uang, kami membuat bank sampah bersama-sama, ya walaupun masih kecil, tapi siapa tahu di masa depan dia bisa menjadi tabungan kami untuk membuka usaha kecil-kecilan...<sup>131</sup> tapi manfaatnya masih belum tampak saat ini.

Mereka berpikir jauh ke depan; dulu mereka hanya tahu menyelesaikan pekerjaan lalu pulang... Dulu mereka terjebak dalam cara pikir seperti itu. Sekarang mereka mengeluarkan uang untuk membeli sapi, kambing, dan bebek, hingga akhirnya menjadi peternak kecil.<sup>132</sup>

Terdapat sejumlah bukti bahwa kegiatan Sekolah Perempuan Hebat mulai mengubah norma gender:

<sup>125</sup>Bidan desa, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016

<sup>126</sup>Suami seorang anggota Sekolah Perempuan Hebat, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016.

<sup>127</sup>Kepala Urusan Umum Desa, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

<sup>128</sup>Koordinator Desa Sekolah Perempuan Hebat - Mondoluku, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016

<sup>129</sup>Perwakilan manajemen KPS2K, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016

<sup>130</sup>Koordinator Desa Sekolah Perempuan Hebat - Soko, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

<sup>131</sup>Anggota, Sekolah Perempuan Hebat, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016.

<sup>132</sup>Anggota BPD, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

Awalnya, ketika saya belum tahu apapun, saya tidak suka dengan (Sekolah Perempuan Hebat). Tapi setelah mereka mengadakan berbagai acara, saya mulai menyadari bahwa perempuan memiliki peran penting dalam hidup kita... Sekarang saya pribadi justru mendorong perempuan untuk bergabung dengan Sekolah Perempuan karena pengetahuannya akan sangat berguna dan akan meningkatkan status mereka.<sup>133</sup>

Para anggota, koordinator dan pengamat luar yang diwawancarai juga melaporkan adanya sejumlah tantangan bagi kegiatan Sekolah Perempuan Hebat, karena diskusi tentang gender masih belum umum bagi banyak orang di desa. Hal ini bisa menyebabkan salah paham dan reaksi atau konsekuensi negatif dari partisipasi yang dilakukan.

Masih banyak orang yang tidak memahami tentang gender, dan juga ada yang salah paham dan menganggap bahwa (aksi kolektif) mengajarkan perempuan menentang suami mereka.... Ada juga yang tidak paham mengapa kami harus mengadakan acara di luar kota<sup>134</sup>

Sampai sekarang, masih ada orang yang bertanya: kenapa harus menginap di hotel kalau kamu belajar di sekolah?... Bagaimana mungkin perempuan Mondoloku menentang suaminya?<sup>135</sup>

Dua orang laki-laki yang diwawancarai menyatakan bahwa kegiatan kelompok tersebut membuat perempuan mengabaikan tanggung jawab mereka di keluarga:

...untuk perempuan yang memiliki anak, waktu untuk bersama keluarga menjadi berkurang... mereka harus meninggalkan keluarga agar mereka dapat bergabung dengan Sekolah Perempuan'; Menurut saya harus ada jalan keluar untuk masalah ini.<sup>136</sup>

Untuk bergabung dengan Sekolah Perempuan, perempuan seringkali harus ke luar rumah, dan itu membuat suami mereka marah... masalahnya adalah waktu, karena mayoritas dari mereka adalah petani, mereka tidak bisa menyesuaikan waktu agar dapat mengikuti kegiatan.<sup>137</sup>

Tantangan terkait waktu ini juga diungkapkan oleh seorang perwakilan PKK:

Mereka harus bisa mengelola waktu secara bijak, mana yang penting, mana yang kurang penting. Sebelum pergi, selesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu.<sup>138</sup>

Ada anggota yang merasa bahwa mereka dianggap sombong atau perempuan nakal karena keluar untuk menghadiri pertemuan - tapi beberapa justru merasa bangga:

Mungkin para pejabat desa merasa terancam, khawatir akan diprotes, tapi sekarang kami sudah berani bicara - hehehe...<sup>139</sup>

Saya tidak mempedulikan anggapan tersebut dan saya justru menggunakannya untuk memotivasi diri saya untuk membuktikan bahwa suatu hari mereka akan sadar dan menganggap semua yang kami lakukan sebagai sesuatu yang 'wah'.<sup>140</sup>

<sup>133</sup>Suami seorang anggota Sekolah Perempuan Hebat, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016.

<sup>134</sup>Koordinator Desa Sekolah Perempuan Hebat - Sooko, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

<sup>135</sup> Koordinator Desa, Sekolah Perempuan Hebat - Kesamben, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

<sup>136</sup>Kepala Dusun, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

<sup>137</sup>Kepala Urusan Umum Desa, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

<sup>138</sup>Bendahara PKK, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.

<sup>139</sup>Anggota, Sekolah Perempuan Hebat, wawancara kelompok, Gresik, Agustus 2016.

<sup>140</sup>Wawancara, Koordinator Desa, Sekolah Perempuan Hebat - Kesamben Kulon, wawancara mendalam, Gresik, Agustus 2016.



## KESIMPULAN

Sekolah Perempuan Hebat jelas memberdayakan perempuan miskin untuk menangani berbagai isu kesehatan di ranah publik maupun domestik. Terdapat beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana Sekolah Perempuan Hebat meningkatkan akses kepada layanan, dan bagaimana anggota semakin banyak berpartisipasi, dan secara perlahan mempengaruhi dinamika politik desa khususnya melalui Musrenbangdes. Dalam skala terbatas, muncul juga optimisme tentang potensi manfaat dari keterampilan baru untuk mencari pencaharian yang didapat dari Sekolah Perempuan. Pada saat yang sama, tentu saja ada sejumlah hasil yang tidak diharapkan. Meskipun para pemimpin laki-laki dan suami sangat vokal menunjukkan dukungan mereka terhadap kegiatan-kegiatan kelompok ini, dari yang awalnya seringkali negatif, dukungan nyata - khususnya dalam bentuk dana dan formalisasi status kelompok melalui peraturan desa atau Keputusan Bupati - masih harus ditunggu.

Hasil paling signifikan dari Sekolah Perempuan Hebat di studi lapangan ini adalah peningkatan percaya diri, keterampilan dan pengetahuan para perempuan anggotanya. Hal ini kemudian membuat para perempuan dapat bernegosiasi dengan suami mereka untuk mendapatkan peran yang lebih besar dan pengalaman yang berbeda, lalu dapat berbicara dan lebih terlibat di dalam berbagai urusan desa dan proses perencanaan. Pada gilirannya, perempuan mendapatkan pengakuan dengan keterlibatan mereka tersebut oleh para pimpinan desa yang mayoritasnya laki-laki, dan perempuan lebih dipercaya dan dipandang penting oleh masyarakat.

## LAMPIRAN: RANGKUMAN KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan ini dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2016 dan terdiri dari diskusi kelompok dan wawancara mendalam yang dilakukan di kantor KPS2K dan balai desa Kesamben Kulon, serta pelaksanaan survei anggota dan fasilitator (lihat rincian di Tabel 13). Para peneliti juga mengamati kehidupan sehari-hari dan interaksi di desa tersebut, mengunjungi kelompok minoritas Hindu-Jawa, dan mengamati acara Istighosah dan upacara Hajat Bumi.

Studi lapangan ini dilengkapi dengan wawancara awal dengan Direktur dan staf Kapal Perempuan yang dilakukan pada bulan Juli 2016, serta kajian (*review*) dokumen.

Tabel 12. Peserta studi lapangan: Sekolah Perempuan Hebat, Kabupaten Gresik

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Diskusi kelompok		
Perwakilan anggota Sekolah Perempuan dari empat desa yang terlibat di dalam Aksi Kolektif Perempuan	11	
Koordinator dan staf program yang saat ini atau sebelumnya terlibat di dalam fasilitasi lapangan	3	
Perwakilan pasangan anggota dan non-anggota	0	7
Informan utama		
Koordinator Desa Kesamben Kulon dan Sooko; mulai sebagai anggota	6	
Bendahara PKK	1	
Bidan desa	1	
Kepala dusun di mana Aksi Kolektif Perempuan berada		1
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		1
Kepala Urusan Umum Desa		1

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Survei		
Survei anggota	20	
Survei fasilitator	1	



## 4. Koalisi Perempuan Indonesia Parepare

Fokus studi kasus:	<b>Balai Perempuan Desa Watang Soreang, Lappakde, dan Labbukang</b>
Mitra MAMPU terkait	<b>Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) nasional dan sub-mitra Koalisi Perempuan Indonesia Kota Parepare</b>

### FOKUS DAN ASAL AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN

Balai Perempuan adalah elemen terpenting bagi keberadaan Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat desa. Sejak Oktober 2016, Kota Parepare memiliki 22 Balai Perempuan, yang bertambah dari yang awalnya 9 pada 2013.<sup>141</sup>

Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi massa yang bekerja memobilisasi setiap anggotanya untuk membentuk suatu kelompok yang kuat. Tujuannya adalah mendorong pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang lebih adil dan demokratis yang didasarkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ketiga Balai Perempuan yang menjadi fokus studi kasus ini dibentuk pada 2013, dan menerima dukungan selama enam bulan (dari Desember 2015-Juni 2016) melalui Koalisi Perempuan Indonesia dan program MAMPU pada 2016. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan kapasitas dan bantuan teknis hingga pertemuan rutin.

### CIRI-CIRI AKSI KOLEKTIF

Koalisi Perempuan Indonesia memiliki struktur organisasi berlapis dari tingkat nasional ke tingkat desa, dengan sekretariat di tingkat nasional, regional (provinsi), cabang (kabupaten/kota), dan Balai Perempuan di masyarakat desa atau kota. Untuk membentuk suatu sekretariat cabang, setidaknya harus ada tiga Balai Perempuan di kabupaten atau kota tersebut; harus ada setidaknya lima sekretariat cabang di tingkat provinsi untuk membentuk sekretariat regional/daerah. Para anggota bergabung dengan Balai Perempuan dengan cara mendaftar sebagai kader.

Koalisi Perempuan Indonesia bertujuan agar setiap Balai Perempuan memiliki setidaknya 30 anggota, dan menghubungkan berbagai kelompok kepentingan yang ditentukan berdasarkan kepentingan anggota. Balai Perempuan di Watang Soreang, Labbukang, dan Lapadde memiliki empat kelompok kepentingan: perempuan profesional, perempuan miskin kota, perempuan di sektor informal, dan ibu rumah tangga. Balai Perempuan dipimpin oleh sekretaris

Seluruh anggota Koalisi Perempuan Indonesia berasal dari berbagai profesi dan latar belakang... Di Kelompok Dewan Kepentingan (*Council of Interest Group*), terdapat perempuan profesional, ibu rumah tangga, perempuan miskin kota, perempuan di sektor informal, dan mahasiswi. Misalnya, saya, teman-teman saya di kelompok kepentingan profesional berasal dari berbagai profesi seperti guru, dokter; sementara kelompok kepentingan informal, contohnya adalah pekerja *freelance*, ibu rumah tangga, dan perempuan miskin kota.

(Kader senior KPI Cabang Parepare, wawancara kelompok, staf KPI dan fasilitator, Parepare, September 2016)

<sup>141</sup>Peningkatan ini didorong oleh para kader cabang Parepare yang melaksanakan proses perekrutan anggota baru.



dan Dewan Kelompok Kepentingan. Orang-orang tersebut dipilih melalui forum diskusi yang juga dihadiri para perwakilan dari tingkat yang lebih tinggi.

Para anggota Balai Perempuan memiliki berbagai peran, termasuk lembaga lokal dan mobilisasi masyarakat, serta melakukan intervensi untuk melindungi hak perempuan dan hak masyarakat secara umum. Keberhasilan kader bergantung pada hubungan dan jaringan mereka; banyak kader cabang merupakan atau telah menjadi ketua RT dan dusun, sementara lainnya menjadi staf dan manajemen di berbagai organisasi masyarakat sipil atau lembaga pemerintah terkait, dan terlibat di dalam kelompok konstituen <sup>142</sup>atau lembaga profesional di Kota Parepare. Banyak juga yang terlibat di dalam berbagai kegiatan.

Koalisi Perempuan Indonesia memberikan pembangunan kapasitas bertahap bagi para kadernya, yang dimulai dari pendidikan kader dasar di tingkat Balai Perempuan. Materinya mencakup ketidaksetaraan gender, analisis sosial dan advokasi. Pendidikan kader tingkat dua mencakup manajemen organisasi, advokasi lanjutan, dan sejarah gerakan perempuan, serta pendidikan kader lanjutan yang mendiskusikan ideologi dunia dan feminisme, serta mengembangkan keterampilan advokasi yang lebih baik. Kader-kader di tingkat cabang harus menjalani program pendidikan ini dan menunjukkan komitmen mereka dan ikatan ideologis dengan tujuan dan idealisme KPI, serta memiliki motivasi untuk memajukan diri dan kepentingan perempuan di ranah sosial dan politik.

Anggota Balai Perempuan diwajibkan membayar iuran sebesar 1.000 rupiah per anggota per bulan. Iuran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan kelompok, serta membantu anggota yang membutuhkan:

Baru-baru ini misalnya, ada yang meninggal dunia (suami seorang anggota). Ya, kami menggunakan iuran ini untuk membantunya.<sup>143</sup>

Balai Perempuan kami menggunakan iuran untuk membantu salah satu anggota kami membayar BPJS Mandiri karena dia saat itu tidak mampu membayarnya.<sup>144</sup>

## ANGGOTA KELOMPOK

Balai Perempuan tampak lebih banyak menarik perempuan <sup>145</sup>elit di masyarakat yang berkepentingan untuk berhubungan dengan orang lain dan mempromosikan kesetaraan gender. Strategi perekrutan ini bertujuan agar dapat bekerja sama dengan orang-orang berpengaruh dan mendorong atau mendukung terciptanya lingkungan yang akomodatif terhadap kesetaraan gender yang lebih besar. Sebagaimana terlihat pada Tabel 14, para kader yang disurvei berasal dari latar pendidikan relatif tinggi (khususnya dibandingkan dengan para anggota aksi kolektif lain yang diteliti), dan sepertiganya memandang diri mereka dari keluarga yang berpengaruh.

Tabel 13. Karakteristik demografis anggota Balai Perempuan yang disurvei

Usia rata-rata	41 tahun, berkisar antara 24-54 tahun
Status pernikahan	17 menikah, 1 berpisah, 4 bercerai

<sup>142</sup>Misalnya, Yayasan lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM), sebuah NGO lokal yang dibentuk pada 1996 yang berfokus pada advokasi untuk akses kepada layanan dasar bagi kelompok marginal di Ajatappareng (Sulawesi Selatan). Sejak Desember 2015 hingga Juni 2016, yayasan ini didukung oleh MAMPU melalui KPI.

<sup>143</sup>Kepala dusun, wawancara mendalam, Parepare, September 2016

<sup>144</sup>Anggota, Balai Perempuan, wawancara kelompok, Watang Soreang, Parepare, September 2016.

<sup>145</sup> Untuk konteks laporan ini, kami mendefinisikan 'elit' sebagai memiliki pengaruh besar, koneksi pribadi kepada pengambil keputusan, atau secara relatif dianggap cukup kaya. Istilah-istilah ini sama sekali tidak dikaitkan dengan konotasi negatif.

Kepala rumah tangga	6 responden
Rata-rata ukuran rumah tangga	6, berkisar antara 4-8 anggota keluarga
Pendidikan	Sekolah Menengah Atas (64%), Perguruan tinggi (36%)
Anggota atau anggota keluarga dengan disabilitas	No
Status sosio-ekonomi	86% memandang diri mereka berada di tingkat ekonomi menengah, 5% memandang diri mereka di atas rata-rata dan 9% memandang diri mereka di bawah rata-rata. 64% memandang rumah tangga mereka memiliki pengaruh rata-rata, 36% memandang mereka berada di posisi pengambilan keputusan atau di kelompok berpengaruh, dan tidak ada yang merasa berada di dalam kelompok marjinal di masyarakat.
Lapangan kerja dan pendapatan	Tugas domestik (41%); kerja rumahan berbayar (27% paruh waktu); kerja di luar rumah berbayar (14% paruh waktu, 18% penuh waktu). 36% memiliki pendapatan tetap, 23% pendapatan tidak tetap, dan 41% tidak memiliki pendapatan
Identitas hukum dan perlindungan sosial	Semuanya memiliki KTP 1 dari 2 anggota yang menganggap rumah tangga mereka lebih miskin dibandingkan pemegang KPS (kartu perlindungan sosial) lainnya, dan 1 orang memiliki SKTM. Secara keseluruhan, 36% memiliki KPS dan 23% memiliki SKTM. 28% memiliki Kartu Indonesia Sehat. 32% responden melaporkan menerima Raskin pada tahun sebelumnya, dan 50% adalah penerima Jamkesmas, sementara 45% menerima Jamkesda.

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=22).

Dari 22 anggota yang disurvei, motivasi awal mereka berpartisipasi adalah untuk interaksi sosial (77 persen) dan mempromosikan kesetaraan gender (59 persen). Motivasi mereka untuk terus berpartisipasi adalah sosial (77 persen responden), diikuti dengan peningkatan keterampilan dan kapasitas pribadi (68 persen). Mempromosikan kesetaraan gender masih menjadi motivasi utama bagi setengah dari anggota yang disurvei. Ini adalah kelompok dengan proporsi anggota terbesar dari kedelapan contoh yang disurvei yang menyatakan bahwa motivasi utama mereka berpartisipasi dalam aksi kolektif adalah mempromosikan kesetaraan gender.

Seluruh anggota yang disurvei telah berpartisipasi di dalam dua kegiatan atau lebih pada tiga bulan terakhir, khususnya kegiatan sosial (82 persen) dan pelatihan (77 persen). Pelatihan (50%) dan sosial (14%) adalah yang paling disukai oleh setengah responden.

## HASIL AKSI KOLEKTIF

Seluruh anggota yang disurvei merasa bahwa partisipasi mereka di Balai Perempuan telah berdampak positif. Tidak ada satu pun yang menyatakan mengalami dampak negatif darinya. Pengamatan menunjukkan bahwa memang telah terjadi manfaat internal (keyakinan diri, percaya diri, pengetahuan, dan keterampilan) dan eksternal (pengorganisasian untuk kesetaraan gender). Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 15, hampir semua menyatakan bahwa mereka merasakan manfaat pribadi. Ini juga merupakan dampak positif yang paling dirasakan bagi 86 persen responden. Pemberdayaan dalam hal peningkatan partisipasi di dalam pengambilan keputusan dan peningkatan aset sosial seperti mendapatkan teman dan jaringan baru juga sering dinyatakan oleh para anggota yang disurvei.

Tabel 14. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota *Balai Perempuan* yang disurvei

Manfaat individu (aset manusia (kekuatan di dalam))	95%
Aset keuangan dan sumber daya (Kekuatan di atas)	27%
Peningkatan partisipasi (aset kapasitas (kekuatan untuk))	82%
Aset sosial (kekuatan dengan)	73%
Aset pendukung	27%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=22).

Selain menikmati jaringan sosial baru, <sup>146</sup>beberapa perempuan juga mengaku merasa lebih percaya diri:

Setelah bergabung, saya yang tadinya tidak berani bicara di depan banyak orang menjadi bisa. Sekarang saya bisa bicara di forum untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya.<sup>147</sup>

Bagi saya, setelah saya bergabung, sekarang saya jadi bisa bicara di depan umum. Sebelumnya kami takut dan hanya menjadi pendengar, tapi sekarang kami bisa memberikan pendapat. Banyak pengaruhnya bagi kami, yang dulu tidak berani bicara dan sangat takut. Perempuan sering dianggap 'lemah'.<sup>148</sup>

Kami selalu diberikan pemahaman di setiap pertemuan. Akhirnya semua itu memperkaya pengetahuan kami dan kami menjadi lebih berani.<sup>149</sup>

Partisipasi di Balai Perempuan telah meningkatkan pengetahuan dan percaya diri para anggotanya untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan sebagaimana diperlihatkan pada kotak di kanan. Para anggota juga mendampingi akses kepada layanan pemerintah seperti BPJS Mandiri dan Raskin:

Ada satu keluarga yang ingin mendaftar, tapi tidak mampu membayar iurannya. Kemudian Balai Perempuan mendaftarkan mereka sebagai anggota BPJS PBI. Kami datang keDinkes dengan membawa SKTM.

Bersama dengan pejabat desa, kami mengunjungi orang-orang yang kami pandang sudah mampu. Jika ada penerima Raskin yang merasa sudah mampu, mereka akan memberikan kupon Raskin mereka kepada keluarga lain yang berhak.<sup>150</sup>

Para anggota Balai Perempuan mampu berhubungan melalui jaringan mereka sendiri maupun cabang KPI Parepare dengan lembaga pemerintah:

Balai Perempuan memberikan percaya diri dan pengetahuan kepada para anggotanya untuk berjuang melawan kekerasan.

'Biasanya, ketika terjadi kasus, kami memanggil perempuan yang mengalaminya, lalu kami antar ke kantor polisi atau pengadilan. Lalu kami akan memanggil seluruh anggota keluarganya'.

(Anggota, Balai Perempuan dan PKK #1, wawancara mendalam, Parepare, September 2016)

'Misalnya, jika terjadi kekerasan terhadap perempuan di sebuah keluarga, kami akan kunjungi keluarga tersebut dan bertanya padanya selanjutnya apa yang ingin dia lakukan, apakah melaporkan suaminya atau melakukan hal lain?'

'Ketika kami melihat ada tetangga yang dipukul oleh suami mereka, dulu kami tidak tahu apa yang harus dilakukan dan harus melapor ke mana, namun sekarang kami jadi tahu dan bisa melakukan sesuatu jika itu terjadi.'

'Biasanya ketika kami dipukul laki-laki, kami tidak bisa melawan mereka karena kami perempuan, tapi sekarang kami bisa melawan mereka kembali dengan bergabung dengan KPI. Kami juga jadi tahu aturannya.'

(Anggota, Balai Perempuan Labukkang, wawancara kelompok, Parepare, September 2016)

'Kami sekarang sudah berani untuk bicara dengan Kapolres. Saya merasa lebih percaya diri. Saya dulu takut bertemu polisi, tapi sekarang saya jadi berani karena saya paham peraturan dan mekanismenya. Saya bisa bicara dengan jujur sekarang.'

(Anggota, Balai Perempuan Watang Soreang, wawancara kelompok, Parepare, September 2016)

<sup>146</sup>Anggota, Balai Perempuan Watang Soreang dan Labukkang, wawancara kelompok, Parepare, September 2016.

<sup>147</sup>Anggota, Balai Perempuan Labukkang, wawancara kelompok, Parepare, September 2016.

<sup>148</sup>Kepala dusun, wawancara mendalam, Parepare, September 2016.

<sup>149</sup>Anggota, Balai Perempuan dan PKK, wawancara mendalam #1, Parepare, September 2016

<sup>150</sup>Anggota, Balai Perempuan Watang Soreang, wawancara kelompok, Parepare, September 2016

Kader perempuan KPI dan Balai Perempuan dapat terus bergerak berkat komunikasi yang baik. Kami sering berkomunikasi dengan mereka, termasuk dengan DPRD, pemerintah kabupaten, termasuk Dinkes, dan Bappeda. Kami bahkan sudah saling SMS, khususnya dengan pemerintah lokal seperti ketua RW, ketua RT, dan lurah.<sup>151</sup>

## KESIMPULAN

Kekuatan Koalisi Perempuan Indonesia berasal dari dedikasi para kadernya, pendidikan ideologi yang berlapis, serta struktur dari tingkat nasional hingga ke tingkat masyarakat kota atau desa. Kader membawa beragam jaringan, dan penyatuan mereka menjadi suatu kelompok kepentingan semakin memperkuat pengaruh mereka. Perhatian KPI kepada kesadaran politik khususnya tentang pentingnya hak perempuan, serta bagaimana mengakses berbagai layanan kemudian diwujudkan dengan peningkatan aktivisme dan promosi akuntabilitas layanan, setidaknya bagi kelompok-kelompok yang ditemui pada studi kasus ini.

Pada saat studi lapangan, tampak jelas bahwa ada beberapa yang memandang Balai Perempuan sebagai batu loncatan bagi perempuan elit yang memiliki ambisi politik; artinya, mereka menjadi anggota untuk mencari dukungan untuk mencalonkan diri. Tentu saja, di wilayah studi kasus terdapat banyak perempuan yang memegang peran kepemimpinan formal.<sup>152</sup> *Jika perempuan dengan pendidikan dan komitmen ideologis feminis menggunakan partisipasi mereka di Balai Perempuan lalu berhasil mendapatkan jabatan politik, tentunya hal tersebut dapat dipandang sebagai hasil yang positif. Tantangannya adalah, bagaimana perempuan tersebut nantinya dapat mempromosikan pengembangan kesadaran gender jika hal ini tidak sejalan dengan agenda partai mereka.*

## LAMPIRAN: RANGKUMAN KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan ini dilaksanakan pada September 2016 di masyarakat kota Watang Soreang, Labukkang, dan Lappakde di Kota Parepare. Kerja lapangan ini terdiri dari diskusi kelompok dan wawancara mendalam, serta pelaksanaan survei anggota dan fasilitator (lihat rincian di Tabel 16). Studi lapangan ini dilengkapi dengan wawancara awal dengan perwakilan kantor nasional KPI yang dilakukan pada bulan Juli 2016 di Yogyakarta, serta kajian (*review*) dokumen.

Tabel 15. Peserta studi lapangan: Balai Perempuan/Koalisi Perempuan Indonesia, Kota Parepare

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Diskusi kelompok		
Perwakilan anggota Balai Perempuan, Desa Watang Soreang	4	
Perwakilan anggota Balai Perempuan, Desa Lappakde	10	
Perwakilan anggota Balai Perempuan, Desa Labbukang	12	
Koordinator kabupaten Koalisi Perempuan Indonesia dan staf lapangan Koalisi Perempuan Indonesia tingkat kabupaten, perwakilan anggota dari 3 desa yang terlibat di dalam Aksi Kolektif Perempuan, pengurus dan staf proyek Program MAMPU	6	
Koordinator kabupaten Koalisi Perempuan Indonesia dan staf lapangan Koalisi Perempuan Indonesia tingkat kabupaten, perwakilan anggota dari 3 desa yang terlibat di dalam Aksi Kolektif Perempuan, pengurus dan staf proyek Program	7	

<sup>151</sup>Staf dan fasilitator KPI, wawancara kelompok #1, Parepare, September 2016

<sup>152</sup>Pada saat wawancara kelompok anggota Balai Perempuan Labukkang, dilaporkan bahwa di delapan RW, empat dipimpin oleh perempuan, dan terdapat juga sejumlah RT yang dikepalai perempuan (wawancara kelompok, Parepare, September 2016).

## MAMPU

## Informan utama

Koordinator Kelompok Kepentingan dari Program Bhakti MAMPU	1
Sekretaris PKK dan kader Balai Perempuan	1
Anggota PKK dan kader Balai Perempuan	2
Kepala dusun di mana Aksi Kolektif Perempuan berada	1
Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1

## Survei

Survei anggota	22
Dari Koalisi Perempuan Indonesia tingkat kabupaten, staf lapangan, staf dan manajemen proyek Program MAMPU-Koalisi Perempuan Indonesia	12



## 5. Buruh Migran Indonesia

Fokus studi kasus: **Migrant United Indonesia Wonosobo (MUIWO), Desa Lipursari, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah**

Mitra MAMPU terkait **Migrant CARE dengan sub-mitra Social Analysis Research Institute (SARI)**

### FOKUS DAN ASAL AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN

Kelompok-kelompok Buruh Migran Indonesia dibentuk dengan dukungan dari Migrant Care di bawah MAMPU untuk berfokus pada perlindungan pekerja migran dan advokasi kebijakan terkait pekerja migran yang menarget peraturan daerah dan desa.<sup>153</sup> *Studi kasus ini berfokus pada salah satu kelompok pekerja migran perempuan, yaitu Migrant United Indonesia Wonosobo, atau MUIWO.* Namanya sengaja dipilih dalam bahasa Inggris untuk mencerminkan pengalaman internasional para anggotanya yang pernah bekerja di Singapura, Hong Kong, Macau, Malaysia, Taiwan, dan Korea Selatan.

Kegiatan MUIWO saat ini mencakup pengembangan keterampilan untuk mencari pendapatan seperti membuat batik dan pengolahan makanan, pelatihan paralegal, serta berpartisipasi di Jambore pekerja migran nasional. Pelatihan kadang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Badan Nasional/Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI/BP3TKI). Para anggota kelompok juga saling bergantian mengikuti pertemuan dan lokakarya yang diadakan oleh SARI di Kota Wonosobo. Pertemuan rutin digunakan untuk saling bertukar informasi, memberikan peluang belajar, serta memperkuat jaringan pemangku kepentingan.

### CIRI-CIRI AKSI KOLEKTIF

MUIWO memiliki struktur yang jelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan perwakilan untuk berbagai jenis kegiatan. Namun, dalam kasus MUIWO di Desa Lipursari, struktur ini didominasi oleh satu keluarga<sup>154</sup> dan dilaporkan bekerja dengan cara yang berbeda dari kelompok Buruh Migran Indonesia di desa-desa lain<sup>155</sup>.

MUIWO adalah kelompok yang berfokus pada perempuan aktif di Desa Lipursari selain PKK. Terdapat tumpang tindih dalam keanggotaan, namun umumnya anggota PKK adalah perempuan dari kalangan elit dan istri kepala desa, sementara kriteria keanggotaan MUIWO adalah status sebagai mantan pekerja migran.

Mentoring oleh SARI dilakukan sejak 2015 melalui pertemuan desa dan kunjungan pemantauan (monitoring) bulanan. Hubungan antara keduanya sangat dekat, yang antara lain ditunjukkan dengan adanya salah satu staf lapangan SARI yang berasal dari Lipursari, mantan pekerja migran, yang juga menjadi anggota MUIWO. SARI saat ini bekerja memperkuat MUIWO dan meningkatkan

<sup>153</sup>Terdapat enam kelompok pekerja migran di seluruh Wonosobo. Kelompok di Desa Kuripan, Mergosari, dan Lipursari dibentuk pada 2014. Kelompok-kelompok berikutnya dibentuk di Desa Paesbumi (2015), Desa Bumi Sejati dan Sindubumi (2016).

<sup>154</sup>Kelompok ini berada di bawah pengaruh pendirinya, identitas lokal yang kuat, serta tokoh penting di kalangan komunitas pekerja migran Wonosobo. Posisi kunci di MUIWO dan SARI diisi oleh anggota keluarga. Terdapat kritik terhadap kondisi ini khususnya terkait transparansi dan nepotisme, namun juga mengakui adanya motivasi dan kontribusi pribadi.

<sup>155</sup>Di desa-desa, MUIWO dikelola bersama oleh anggota-anggota yang berasal dari berbagai kelompok.

jumlah keanggotaan dengan menjangkau keluarga dan masyarakat. Staf lapangan SARI memberikan informasi tentang migrasi aman dengan prosedur, informasi dan akses yang benar kepada mekanisme simpan pinjam untuk meningkatkan modal bagi mereka yang ingin memulai atau memperluas usaha. Mereka mengadvokasi kebijakan untuk meningkatkan akses kepada layanan dan memberikan perlindungan bagi pekerja, serta membantu MUIWO terkait dengan beberapa isu spesifik, seperti praktik perekrutan yang tidak etis serta isu-isu dengan perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI).<sup>156</sup>

Isu tata kelola dan kurangnya kesiapan organisasi hampir menyebabkan bubarnya MUIWO di Lipursari. Namun dana MAMPU melalui Migrant CARE membantu SARI melakukan beberapa pertemuan dan pelatihan untuk menyegarkan kembali visi dan misinya serta melakukan kegiatan-kegiatan terkait. Kegiatan tersebut mencakup memfasilitasi hubungan yang lebih dekat dengan administrasi desa, yang menghasilkan adanya alokasi dari dana desa untuk kebutuhan organisasi MUIWO - *'memang sangat kecil, hanya 500.000. Memang jumlahnya kecil, tapi tidak masalah, nanti bisa ditingkatkan.*<sup>157</sup>

Beberapa kelompok pekerja migran terlibat dalam pengembangan Peraturan Desa untuk membentuk pusat layanan pekerja migran di desa, sementara lainnya menerima dukungan yang lebih signifikan dari dana desa. Desa Lipursari masih menunggu ditandatanganinya Peraturan Desa tersebut oleh kepala desa.

Studi kasus ini menunjukkan adanya ketegangan yang menarik antara SARI yang lebih berfokus pada advokasi dan perubahan skala luas dengan Migrant CARE, dan juga MAMPU, serta anggota MUIWO yang lebih terfokus pada kebutuhan mendesak mereka. MUIWO dan para pemimpin MUIWO yang semakin berfokus membantu usaha kecil dan peluang ekonomi lainnya menyebabkan adanya gesekan dengan visi SARI dan Migrant Care yang lebih berfokus pada hak dan kebijakan terkait pekerja migran:

Sebelum mereka mulai banyak pelatihan, kelompok-kelompok itu aktif dalam advokasi terkait peraturan pekerja migran lokal... ini sangat membuat kami marah... Karena kami dulunya merupakan kelompok mentor untuk advokasi, dan kami tidak bicara tentang pengembangan ekonomi. Tapi sekarang kelompok ini hanya bergulat dengan urusan ekonomi... Ya itu memang penting, tapi kita tidak bisa hanya berfokus pada itu saja... visi organisasi ini harus tetap pada advokasi pekerja migran.<sup>158</sup>

Setelah peremajaan yang dilakukan, sekarang MUIWO memiliki dua tujuan: (1) berfokus pada mantan pekerja migran untuk membangun kemandirian dan pendapatan; dan (2) berfokus pada pekerja migran yang pulang sementara dan calon pekerja migran untuk membangun pemahaman mereka tentang cara bermigrasi yang aman, menghubungkan mereka dengan layanan, serta mempromosikan perlindungan hukum.

## ANGGOTA KELOMPOK

Karena MUIWO didirikan antara lain berdasarkan solidaritas dan karena tingginya mobilitas kerja para anggotanya, keanggotaan MUIWO berfluktuasi sejak ia berdiri. Saat ini terdapat 20 anggota perempuan yang masih aktif. Strategi penjangkauan SARI yang terbaru tampak efektif dalam menarik anggota baru.

<sup>156</sup> Staf lapangan SARI, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016.

<sup>157</sup> Pendiri MUIWO, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016. Salah satu anggota kelompok melaporkan bahwa proposalnya berisi permohonan dana sebesar 10 juta rupiah untuk bahan membuat batik, tapi yang diberikan hanya 500.000 rupiah untuk peralatan kantor (anggota MUIWO, wawancara kelompok, Wonosobo, Oktober 2016).

<sup>158</sup> Manajer Program SARI, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016.



Tabel 16. Karakteristik demografis anggota MUIWO yang disurvei

Usia rata-rata	37 tahun, berkisar antara 26-52 tahun
Status pernikahan	18 menikah, 1 belum menikah, 1 berpisah
Kepala rumah tangga	3
Rata-rata ukuran rumah tangga	4 anggota, berkisar antara 2-6 anggota
Pendidikan	Sekolah Dasar (58%), Sekolah Menengah Pertama (26%), Sekolah Menengah Atas (16%)
Anggota atau anggota keluarga dengan disabilitas	1 anggota dilaporkan sebagai penyandang disabilitas
Status sosio-ekonomi	64% memandang diri mereka berada di tingkat ekonomi menengah, tidak ada yang memandang diri mereka di atas rata-rata dan 36% memandang diri mereka di bawah rata-rata. 60% memandang rumah tangga mereka memiliki pengaruh rata-rata, 32% memandang mereka berada di posisi pengambilan keputusan atau di kelompok berpengaruh, dan 8% merasa berada di dalam kelompok marjinal di masyarakat.
Lapangan kerja dan pendapatan	Tugas domestik (40%); kerja rumahan berbayar (35% paruh waktu; 15% penuh waktu); kerja di luar rumah berbayar (5% paruh waktu, 5% penuh waktu) 5% memiliki pendapatan tetap, 50% pendapatan tidak tetap, dan 45% tidak memiliki pendapatan
Identitas hukum dan perlindungan sosial	Semuanya memiliki KTP Hanya 1 dari 4 anggota yang menganggap rumah tangga mereka lebih miskin dibandingkan pemegang KPS (kartu perlindungan sosial) lainnya, dan tidak ada yang memiliki SKTM. Secara keseluruhan, 20% memiliki KPS dan 5% memiliki SKTM. 28% memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebanyak 58% responden melaporkan menerima Raskin pada tahun sebelumnya, dan 16% adalah penerima Jamkesmas, sementara 5% menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=20)

Semua yang disurvei menjawab bahwa mereka telah berpartisipasi di dalam tiga kegiatan dalam tiga bulan sebelumnya, baik terkait pembangunan kapasitas (90 persen), simpan pinjam (65 persen), kesetaraan gender (55 persen), dan penciptaan pendapatan (30 persen). Motivasi awal para anggota bergabung dengan MUIWO adalah untuk kegiatan sosial (70 persen), pembangunan kapasitas (50 persen), dan peningkatan pendapatan (20 persen). Motivasi saat ini cenderung sedikit berubah - dengan 75 persen menjawab untuk pembangunan kapasitas, 60 persen untuk alasan sosial, dan 45 persen untuk peningkatan pendapatan. Kegiatan pembangunan kapasitas adalah yang paling dinikmati (65 persen), diikuti dengan peningkatan pendapatan (15 persen) dan kesetaraan gender (10 persen).

## HASIL AKSI KOLEKTIF

Sebanyak 65 persen anggota yang disurvei memandang bahwa partisipasi di dalam aksi kolektif berdampak positif pada mereka. Dampak positif yang paling dirasakan adalah terkait dengan manfaat pada pribadi (dinyatakan oleh 94 persen responden) dan aset sosial (dinyatakan 53 persen responden). Tiga responden (15%) merasa bahwa partisipasi di MUIWO belum berdampak pada diri mereka sebagai individu, dan empat orang (20%) menyatakan merasakan dampak positif dan negatif.



Tabel 17. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota MUIWO yang disurvei

Manfaat individu (aset manusia (kekuatan di dalam))	94%
Aset keuangan dan sumber daya (Kekuatan di atas)	29%
Peningkatan partisipasi (aset kapasitas (kekuatan untuk))	6%
Aset sosial (kekuatan dengan)	53%
Aset pendukung	0%

Survei anggota aksi kolektif (n=20)

Bagi anggota kelompok, mendapatkan pengalaman baru adalah manfaat penting: '(Istri saya) menceritakan hal-hal yang saya belum pernah alami. Pertama, dia sangat senang di sana: 'Pak, saya tidur di hotel. Paginya kami berolahraga. Hidup yang menyenangkan';<sup>159</sup>'Manfaat bagi saya setelah bergabung dengan MUIWO adalah saya mendapatkan pengalaman baru'.<sup>160</sup>

Keterampilan baru juga sangat dihargai. 'Setelah pelatihan, kami memiliki keterampilan untuk mencari pendapatan tambahan. Sejak ada pelatihan membuat batik, sekarang kami bisa membuat batik. Kami juga bisa membuat sirup salak'.<sup>161</sup>

Namun, membangun usaha masih menjadi tantangan - 'Batik memerlukan modal besar... Jujur saja, batik kami masih stagnan karena tidak ada modal... Dari batik kami belum mendapatkan pendapatan apapun'.<sup>162</sup> Namun panitia masih berpandangan lebih positif - 'Oh, batik, batik juga berjalan lancar'.<sup>163</sup>

Meskipun manfaat ekonominya masih belum dirasakan, anggota kelompok menggunakan uang saku dan tunjangan transportasi yang diberikan untuk menghadiri pertemuan di luar desa untuk membentuk inisiatif simpan pinjam - 'Sejauh ini kaim berhasil mengumpulkan 1,3 juta rupiah... Kami akan terus lanjutkan kalau ini berjalan lancar'.<sup>164</sup>

Fasilitator kelompok melihat adanya peningkatan keterampilan dan percaya diri di kalangan anggota, dan juga di jaringan mereka yang lebih luas. Selain itu, kelompok tersebut juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dalam isu-isu terkait pekerja migran, dan melaporkan adanya peningkatan partisipasi di Musrenbangdes,<sup>165</sup> serta bahwa kegiatan ini 'membangkitkan motivasi mereka karena (mereka) dianggap lebih penting dan bermanfaat bagi masyarakat sekarang, (dan) ini membuat mereka bangga.'

MUIWO dilaporkan telah memperkuat jaringan dengan pemerintah daerah, meskipun hal ini lebih dilakukan melalui SARI dan tidak secara langsung.<sup>166</sup> Perwakilan MUIWO terlibat dalam perancangan peraturan daerah (Perda No.8 2016 tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran), yang diselesaikan pada akhir 2016,<sup>167</sup> dan satu wawancara menunjukkan bahwa pekerja

<sup>159</sup>Suami anggota MUIWO, wawancara kelompok, Wonosobo, Oktober 2016.

<sup>160</sup>Anggota MUIWO non-aktif, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016.

<sup>161</sup>Anggota MUIWO, wawancara kelompok, Wonosobo, Oktober 2016.

<sup>162</sup>Ibid.

<sup>163</sup>Ibid.

<sup>164</sup>Ibid.

<sup>165</sup>Pendiri MUIWO, Manajer Program, SARI Solo, fasilitator MUIWO (Staf SARI), Staf Lapangan SARI, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016.

<sup>166</sup>Mantan Bupati Wonosobo juga berkomitmen menegakkan perlindungan pekerja migran dan secara aktif mendorong dan mengkoordinasi disahkannya Perda-Perda terkait. Staf SARI menggunakan koneksi pribadi mereka dengan tokoh penting seperti mantan bupati dan kepala desa yang peduli dengan isu pekerja migran untuk mengadvokasi peraturan ini.

<sup>167</sup>Pemimpin MUIWO dan Staf Lapangan SARI, wawancara mendalam, Wonosobo, Oktober 2016

migran perempuan di desa tersebut sudah mengikuti mekanisme aman yang diajarkan pada kegiatan MUIWO dan SARI.<sup>168</sup>

## KESIMPULAN

Meskipun terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi MUIWO, terdapat beberapa bukti bahwa para anggota merasa mengalami pemberdayaan di berbagai wilayah, khususnya dalam hal keterampilan dan keterlibatan dengan proses-proses formal seperti perencanaan pembangunan desa dan pengembangan peraturan perlindungan. Keterlibatan terakhir ini khususnya telah mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah daerah, dan para perwakilan kelompok telah diberikan kesempatan lebih banyak untuk bicara.

MUIWO juga memberikan contoh yang jelas tentang adanya ketegangan yang sudah terjadi maupun yang dapat terjadi akibat perbedaan visi dan prioritas antar berbagai aktor. Keterlibatan dengan MAMPU melalui Migrant Care dan SARI membantu menyelesaikan beberapa isu seputar tata kelola dan membuat kelompok tersebut lebih terbuka, dan juga memperkenalkan ideologi gerakan perempuan. Sebagai mitra lokal, SARI menjalankan peranan penting dalam membangun hubungan antara akar rumput dengan kebijakan tingkat tinggi. Pentingnya peran perantara adalah salah satu pelajaran paling penting dari studi kasus ini. Memang tidak realistis dan tidak adil jika mengharapkan perempuan yang sibuk bertahan hidup - mencari nafkah, mengurus keluarga - akan memiliki waktu untuk menghadiri dan terlibat di dalam advokasi yang mereka anggap tidak terlalu relevan dengan keadaan mereka. Namun perantara dapat memanfaatkan pengalaman mereka dan ikut terlibat mewakili para perempuan tersebut. Bagi sebagian perempuan, stabilitas ekonomi adalah prasyarat untuk menciptakan aksi kolektif yang lebih bersifat politis.

## LAMPIRAN: RANGKUMAN KERJA LAPANGAN - MUIWO

Kerja lapangan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 dan terdiri dari diskusi kelompok dan wawancara mendalam, serta pelaksanaan survei anggota dan fasilitator (lihat rincian di Tabel 19. Peserta studi lapangan: MUIWO Wonosobo). Studi lapangan ini dilengkapi dengan kajian dokumen dan wawancara dengan Migrant Care yang dilakukan pada bulan Agustus 2016.

Tabel 18. Peserta studi lapangan: MUIWO Wonosobo

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Diskusi kelompok		
Anggota aksi kolektif, Desa Lipursari	7	
Perwakilan pasangan anggota		7
Informan utama		
Pendiri MUIWO	1	
Ketua MUIWO		1
Anggota aksi kolektif dan anggota PKK	1	
Anggota aksi kolektif/paralegal	1	
Mantan anggota aksi kolektif	1	

<sup>168</sup>Suami anggota MUIWO, wawancara kelompok, Wonosobo, Oktober 2016.

Kepala BMI Wonosobo/tokoh masyarakat	1	
Manajer Program, SARI, Solo		
Staf lapangan SARI (diwawancara terpisah)	1	1
Pemimpin perempuan/perwakilan PKK	1	
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Lipursari		1
Survei		
Survei anggota	20	
Fasilitator/staf		3



## 6. Program Perempuan Pekerja Rumahan (PPR)

Fokus studi kasus: **Kelompok Kreatif Bunda, Desa Wonolelo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta**

Mitra MAMPU terkait **Yasanti**

### FOKUS DAN ASAL AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN

Yasanti mengelola tiga inisiatif pekerja rumahan pekerja rumahan - satu di Kabupaten Bantul dan satu di DI Yogyakarta, di mana pekerja memasak kebutuhan UKM, dan terakhir di Kota Semarang, Jawa Tengah, di mana pekerja bekerja di industri garmen. Perbedaan dalam mode pelibatan pekerja rumahan ini menghasilkan perbedaan dalam hubungan karyawan-pengusaha; hubungan kerja di Bantul bersifat lebih informal. Studi kasus ini berfokus pada contoh Bantul, di mana Yasanti mendukung kelompok yang sudah ada sebelumnya, yaitu Kelompok Bunda Kreatif.

Hubungan antara Yasanti dan Bantul dapat ditelusuri kembali hingga saat Gempa Yogyakarta pada 2006. Beberapa organisasi datang membantu, yang salah satunya adalah Solidaritas Perempuan.<sup>169</sup> Yasanti meneruskan *Solidaritas Perempuan*, dengan staf inti yang sama, dan seiring waktu mulai menambah fokusnya kepada pekerja rumahan. *Inisiatif pekerja rumahan perempuan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan anggota, namun difokuskan pula untuk membangun pengetahuan pekerja rumahan tentang hak dan peluang mereka atas perlindungan, serta akses kepada berbagai layanan yang relevan:*

Bunda Kreatif tidak hanya berpikir tentang modal usaha...tapi memang tanpa modal tidak akan bertahan lama. Namun sekarang yang mereka butuhkan adalah kesadaran akan hak mereka; itu perspektif kami.<sup>170</sup>

Pekerja rumahan pekerja rumahan 'hanya dianggap seperti hantu yang antara ada dan tiada'<sup>171</sup>, sehingga pertama-tama, Yasanti bertujuan agar pekerja rumahan diakui. Meskipun kegiatan ekonomi pekerja rumahan adalah nyata, namun secara hukum mekanisme ini tidak melihat adanya pemberi kerja resmi, sehingga sangat rentan mengabaikan ketentuan perlindungan yang ditetapkan undang-undang tenaga kerja. Karenanya, pekerja rumahan sangat rentan terhadap kondisi dan eksploitasi yang tidak aman. Advokasi Yasanti berfokus untuk mendorong pengakuan formal terhadap hak-hak pekerja rumahan melalui peraturan pemerintah, dan mekanisme kerja

Lalu kami bertemu Yasanti, lalu membangun kerja sama dengan mereka. Saya tidak tahu bagaimana, tapi waktu itu ada orang yang mendatangi saya. Kemudian saya ikut pelatihan, dan awalnya saya dikenalkan kepada staf desa. Terdapat laporan bahwa ada sekelompok ibu-ibu yang bersama Yasanti melakukan kegiatan.

Alhamdulillah, ketika didampingi oleh Yasanti, ibu-ibu tersebut berani melakukan sesuatu. Sekarang mereka sudah berani bicara dan aktif.

Kepala desa, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>169</sup>Solidaritas Perempuan mengalami kesulitan dalam upaya pemberian bantuan bencana karena mereka dianggap terlibat dalam kegiatan Kristenisasi. Sementara Yasanti mampu bekerja tanpa terkena kesalahpahaman ini.

<sup>170</sup>Pengurus Yasanti - Perempuan Pekerja Rumahan, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>171</sup>Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

yang lebih aman dengan pemberi kerja melalui pengakuan tertulis (kontrak tertulis) dari skema alih-daya (outsourcing) yang dilakukan.<sup>172</sup>

Langkah awal dari proses ini adalah mengumpulkan data tentang pekerja rumahan perempuan di wilayah tersebut:

Memang sudah ada petugas khusus yang melakukannya jika terkait urusan pemerintah, tapi di Kreatif Bunda, anggota kami yang mengumpulkan data. Cara ini membuat mereka belajar cara bertemu orang baru dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pekerja rumahan. Kami diajarkan untuk bertemu pemerintah dan cara berkomunikasi dengan mereka di sekolah Yasanti. Mereka memberikan kami kesempatan untuk merasa bebas bertanya dan menjawab pertanyaan.<sup>173</sup>

Fasilitator kelompok berasal dari Sekolah Perempuan Yasanti. Melalui sekolah tersebut, Yasanti mengembangkan dan memberikan modul partisipatif tentang hak pekerja rumahan perempuan, hak asasi manusia, keterampilan advokasi, dan pengorganisasian masyarakat. Di Sekolah Perempuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah kelompok sel, yang memberikan kesempatan untuk praktik advokasi dan pengorganisasian kelompok. Kegiatan ini khususnya difokuskan untuk mengembangkan kelompok pekerja rumahan dan terlibat di berbagai tingkatan pemerintahan, pemberi kerja, serta pekerja rumahan dan keluarga mereka.

## CIRI-CIRI AKSI KOLEKTIF

Responden survei fasilitator melaporkan bahwa kelompok pekerja rumahan perempuan memiliki struktur formal dan daftar anggota, untuk menciptakan visi bersama dan kemampuan untuk bekerja sebagai kelompok untuk menciptakan perubahan lebih besar.<sup>174</sup> Aksi kolektif ini juga memegang prinsip-prinsip feminis, dengan fokus pada hak dan akses kepada layanan. Yasanti memiliki peran aktif karena selalu rutin berinteraksi dengan kelompok pekerja rumahan perempuan. Sejauh ini belum tampak bahwa para anggota Kelompok Kreatif Bunda terkait erat dengan para pimpinan atau elit desa, meskipun sudah ada beberapa hubungan yang terbentuk. Kelompok ini tampak bekerja secara informal, tanpa adanya pemimpin yang dominan atau terlalu mengontrol, dan dijalankan berdasarkan solidaritas kelompok:

PKK berbeda dengan kami. PKK lebih terkait urusan rumah tangga, seperti mengurus anak, memasak, dan sebagainya. Anggota Perempuan Pekerja Rumahan di PKK sekarang menjadi lebih kritis. Mereka tidak lagi hanya diam saja. Mereka menjadi lebih berani menyampaikan pikiran-pikiran mereka.

Anggota Kelompok Kreatif Bunda, wawancara kelompok, Bantul, Oktober 2016)

Perbedaan antara kelompok ini dengan kelompok lainnya adalah, di dalam kelompok lain kami hanya mendengarkan pembicara, sementara di dalam kelompok ini, kami tidak hanya mendengarkan pembicara, tapi kami juga bicara. Di dalam kelompok ini, kami bisa berdiskusi hal-hal menarik dan [kami juga] mendapat banyak teman. Semua masukan didengarkan, dan [kami menemukan] solusi untuk semua... Biasanya di organisasi lain, tidak ada yang berani mempertanyakan ketua, tapi di sini, semua anggota dapat berbicara, dan semuanya diselesaikan secara terbuka'.<sup>175</sup>

## ANGGOTA KELOMPOK

Keanggotaan dibatasi hanya untuk pekerja rumahan perempuan. Sebagian besar anggota membuat tas kain perca yang dijual di toko kerajinan serta pakaian untuk pasar lokal. Ada rencana

<sup>172</sup>Pengurus Yasanti - Perempuan Pekerja Rumahan, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>173</sup>Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>174</sup>Responden Yasanti kepada survei fasilitator (n=2, Bantul dan Semarang).

<sup>175</sup>Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016.

untuk memperluas keanggotaan menjadi untuk seluruh perempuan, untuk meningkatkan akses kepada peluang untuk memperoleh pendapatan.<sup>176</sup>Keanggotaan naik turun; pada saat studi lapangan ini dilakukan, dilaporkan terdapat 39 anggota. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 20, para anggota memandang diri mereka umumnya berasal dari status ekonomi rata-rata dan cukup berpengaruh di masyarakat. Karena kriteria keanggotaan tersebut, tidak seperti kelompok lain, semua anggota adalah pekerja berbayar, meskipun mayoritasnya hanya memiliki pendapatan tidak tetap.

Tabel 19. Karakteristik demografis anggota *Kelompok Bunda Kreatif* yang disurvei

Usia rata-rata	Rata-rata 38, usia berkisar dari 30-51
Status pernikahan	19 menikah, 1 berpisah
Kepala rumah tangga (pencari nafkah)	5 anggota
Rata-rata ukuran rumah tangga	4, berkisar antara 2-5 anggota keluarga
Pendidikan	Sekolah Dasar (30%), Sekolah Menengah Pertama (35%), Sekolah Menengah Atas (35%)
Anggota atau anggota keluarga dengan disabilitas	Ya, 1 responden memiliki anak dengan disabilitas
Status sosio-ekonomi	75% memandang diri mereka berada di tingkat ekonomi menengah, tidak ada yang memandang diri mereka di atas rata-rata dan 25% memandang diri mereka di bawah rata-rata. 85% memandang rumah tangga mereka memiliki pengaruh rata-rata, 15% memandang mereka berada di posisi pengambilan keputusan atau di kelompok berpengaruh, dan tidak ada yang merasa berada di dalam kelompok marjinal di masyarakat.
Lapangan kerja dan pendapatan	Tugas domestik (0%); kerja rumahan berbayar (50% paruh waktu; 40% penuh waktu); kerja di luar rumah berbayar (10% paruh waktu). Semua memiliki pendapatan - 20% memiliki pendapatan tetap, 80% pendapatan tidak tetap
Identitas hukum dan perlindungan sosial	Semuanya memiliki KTP Hanya 2 dari 5 anggota (40%) yang menganggap rumah tangga mereka lebih miskin dibandingkan pemegang KPS (kartu perlindungan sosial) lainnya, dan tidak ada yang memiliki SKTM. Secara keseluruhan, 40% memiliki KPS dan 10% memiliki SKTM). 28% memiliki kartu jaminan kesehatan nasional (KIS) atau lainnya). 50% responden melaporkan menerima Raskin pada tahun sebelumnya, dan 10% adalah penerima Jamkesmas, sementara 15% menerima Program Keluarga Harapan

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=20)

Seluruh anggota yang disurvei telah berpartisipasi di dalam dua kegiatan atau lebih pada tiga bulan terakhir. Semuanya telah berpartisipasi di setidaknya satu kegiatan simpan pinjam dan pelatihan atau pengembangan keterampilan. Kegiatan simpan pinjam adalah yang paling sering dinikmati atau diikuti oleh setengah responden. Awalnya, perempuan bergabung dengan kelompok ini karena motivasi sosial (75 persen) serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan pribadi (65 persen). Dua kegiatan yang paling disukai adalah simpan pinjam (50%) dan pelatihan (25%).

<sup>176</sup>Sekretaris Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

## HASIL AKSI KOLEKTIF

18 anggota yang disurvei merasa telah mengalami dampak positif dari partisipasi mereka di dalam aksi kolektif, dengan dua responden (10%) juga merasakan adanya konsekuensi negatif dan konsekuensi positif. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 21, semua anggota yang disurvei melaporkan adanya manfaat bagi pribadi mereka, dan ini merupakan manfaat terbesar yang dirasakan (bagi 100 persen responden, yang diikuti dengan peningkatan aset sosial (bagi 85 persen responden).

Saya tidak percaya saya bisa bicara seperti ini. Rasanya tidak percaya. Suami saya pun tidak percaya saya bisa bicara seperti ini. Dan sekarang saya di sini. Dulu saya tidak punya teman, tapi sekarang saya lebih berani... Ketika saya berkunjung ke kepala desa dan kantor desa, saya bahkan sudah berpikir bahwa itu hal yang biasa... Saya bisa bilang bahwa saya sudah banyak berubah.

Sekretaris Kelompok Kreatif Bunda, Bantul,  
Oktober 2016

Tabel 20. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota *Kelompok Kreatif Bunda* yang disurvei

Manfaat individu (aset manusia (kekuatan di dalam))	100%
Aset keuangan dan sumber daya (Kekuatan di atas)	50%
Peningkatan partisipasi (aset kapasitas (kekuatan untuk))	30%
Aset sosial (kekuatan dengan)	85%
Aset pendukung	15%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=20)

Beberapa anggota yang diwawancarai melaporkan adanya peningkatan percaya diri: *'Dulu saya tidak bisa bicara di depan banyak orang, tapi sekarang saya bisa'*, dan juga ada peningkatan pengetahuan karena bergabung dengan kegiatan Yasanti:

Dulu (kami) tidak tahu apa hak kami sebagai pekerja rumahan perempuan, tapi sekarang (kami) tahu walaupun kami tidak hapal semua, tapi dulu (kami) sama sekali tidak tahu apa itu pekerja rumahan perempuan, tapi sekarang kami tahu. Kemudian tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, sekarang kami sudah tahu.<sup>177</sup>

Hubungannya dengan Yasanti juga dikaitkan dengan pembukaan peluang pasar baru:

Saat ini omzetnya sudah lebih besar... dan pasar kami bahkan telah mencapai Solo. Dulu, kami hanya memasarkannya ke Prambanan, Malioboro, Beringharjo, dan tujuan wisata lainnya di Yogya. Setelah diperkenalkan oleh Yasanti, kami mendapatkan pesanan dari mana-mana. Ketika kami mengikuti pelatihan, ada yang memesan tas dari kami'.<sup>178</sup>

Namun secara umum, peningkatan pendapatan tidak terlalu menonjol di dalam wawancara. Salah satu anggota menyatakan bahwa pelatihan wirausaha dibutuhkan karena mereka memerlukan kemampuan menetapkan harga penjualan yang menguntungkan.wirausahawan

Ada beberapa yang mengatakan bahwa Kreatif Bunda menjadi lebih banyak terlibat di dalam proses perencanaan desa, dan dengan itu dapat mengakses bantuan pemerintah desa untuk Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):

Kami diundang ikut Musrenbang, dan kami menawarkan program-program Kreatif Bunda di sana. Alhamdulillah, pada 2016 kami dapat bergabung ke pelatihan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja).<sup>179</sup>

<sup>177</sup>Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>178</sup>Kepala desa, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>179</sup>Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

Kelompok ini diundang untuk menawarkan program apa saja -berdasarkan nama dan alamat- yang ingin mereka ikuti kepada Bappeda pada bulan Januari setiap tahunnya - masalahnya, kelompok ini tidak tahu apa saja pilihan yang ada, tapi berniat untuk bertanya karena saat ini mereka sudah berain.<sup>180</sup>

Namun, dalam kehidupan rumah tangga mereka, perempuan masih menghadapi peran gender yang berurat akar, dan juga kerja rumahan mereka:

Tidak mudah mendapatkan dukungan dari suami saya, karena sudah budayanya perempuan yang harus mencuci piring dan pakaian... Awalnya sulit untuk mengubah suami saya'.<sup>181</sup>

Ikut berpartisipasi di dalam kelompok OK, '*asalkan tidak mengganggu tanggung jawab dan rutinitas keluarga*',<sup>182</sup> dan kalau laki-laki diminta menjaga anak, maka mereka memandang itu hal yang 'menyebalkan'.<sup>183</sup>

Sekretaris kelompok kemudian melaporkan bahwa mereka berusaha sedisiplin dan seefisien mungkin dalam mengadakan pertemuan kelompok untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan. 'Jam 10 kami mulai acara, walaupun baru dua anggota yang hadir, dan jam 12 kami tutup acaranya'.<sup>184</sup>

## KESIMPULAN

Ada berbagai kepentingan, konteks dan motif dari pembentukan Kelompok Kreatif Bunda. Dua strategi yang digunakan, yaitu sekolah perempuan dan kelompok sel tampak disiapkan secara matang, yaitu membangun kapasitas sambil memperluas lingkaran pengaruh. Kurikulum yang ada digunakan untuk mempercepat pertumbuhan dan pengaruh kelompok ini di tingkat desa. Pendekatan kepada pengembangan kelompok menekankan pada solidaritas anggota dan bukan pelembagaan kuat perwakilan atau struktur pengambilan keputusan. Kelompok Kreatif Bunda tampak bekerja dalam struktur mendatar, dengan sedikit koordinasi jika dibutuhkan.

Sebelum Yasanti bergabung dengan MAMPU, kurikulum sekolah perempuannya tidak banyak menyentuh isu-isu praktis perlindungan pekerja rumahan. Dana dari MAMPU membantu Yasanti menciptakan hubungan antara pendekatan feminisnya dengan isu hilir terkait pekerja rumahan yang terabaikan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pengakuan hak politik dan ekonomi pekerja rumahan perempuan, serta membantu mereka mengakses skema perlindungan sosial yang relevan.

## LAMPIRAN: RANGKUMAN KERJA LAPANGAN

Kerja lapangan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Dusun Bojong, Desa Wonolelo, Kabupaten Bantul. Kerja lapangan ini terdiri dari diskusi kelompok dan wawancara mendalam, serta pelaksanaan survei anggota dan fasilitator (lihat rincian di Tabel 22). Para peneliti juga mengamati kehidupan sehari-hari dan interaksi di desa tersebut. Studi lapangan ini dilengkapi dengan kajian dokumen awal.

<sup>180</sup>Sekretaris Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>181</sup>Anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>182</sup>Kepala dusun, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>183</sup>Suami anggota, Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016

<sup>184</sup>Sekretaris Kelompok Kreatif Bunda, wawancara mendalam, Bantul, Oktober 2016



Tabel 21. Peserta studi lapangan: Kelompok Bunda Kreatif, Kabupaten Bantul

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Diskusi kelompok		
Perwakilan anggota pekerja rumahan perempuan dari 2 desa	10	
Perwakilan suami anggota pekerja rumahan perempuan dan tokoh masyarakat		8
Informan utama		
Anggota Sekretaris aksi kolektif	1	
Kepala dusun (diwawancara terpisah)		2
Kepala desa	1	
Non-anggota	1	
Koordinator Program MAMPU Yasanti	1	
Survei		
Survei anggota	20	
Fasilitator	2	

## 7. Community Center

Fokus studi kasus:	<b>Community Center Mentari Sehat, Desa Bukit Bungkul, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi</b>
Mitra MAMPU terkait	<b>Permampu, dengan mitra lokal Aliansi Perempuan Merangin (APM)</b>

### FOKUS DAN ASAL AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN

Pada awal 1997, lima perempuan di Desa Pulau Tujuh membentuk sebuah kelompok desa karena mereka peduli dengan isu-isu yang dihadapi perempuan di tingkat lokal, seperti kematian ibu, kekerasan terhadap perempuan, dan kehamilan remaja tak diinginkan. Kelompok ini kemudian menjadi kelompok belajar Sehat Mandiri. Pada 1998, cabang Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jambi memberikan dukungan pembangunan kapasitas terkait hak-hak perempuan di pedesaan, dan membangun kesadaran kelompok tersebut tentang kesehatan reproduksi dari perspektif gender.

Kelompok belajar Sehat Mandiri ini kemudian mendapatkan pelatihan dari Komnas Perempuan, dan menjadi bagian dari jaringan Komnas Perempuan dalam mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan, serta berpartisipasi di dalam kampanye 16 hari aksi melawan kekerasan. Kelompok belajar ini selanjutnya menjadi 'Community Center' pada 2001, dan menjadi lebih terstruktur yang secara internal dirancang untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, dan secara eksternal dianggap lebih mudah dikenali dan mencerminkan kegiatan mereka - yaitu suatu tempat di mana masyarakat dapat berkumpul, berbagi dan belajar. Saat ini terdapat 18 Community Center di tujuh kecamatan di Kabupaten Merangin. Studi kasus ini berfokus pada satu contoh, yaitu di Desa Bukit Bungkul.

'Kemandirian pelaksanaan kelompok ini tidak bisa diragukan lagi. Dulu, ada kegiatan di Manau dan tidak sepenuhnya didukung oleh APM. Tapi kami bertahan, dan terus kami laksanakan karena kami memiliki tanggung jawab'.

(Tokoh masyarakat, wawancara mendalam, Merangin, Oktober 2016)

Untuk menghadapi tantangan organisasi dan konsolidasi di tingkat tinggi, seluruh Community Center ini kemudian membentuk Aliansi Perempuan Merangin (APM) yang menjadi badan hukum pada 2003. Misi aliansi tersebut adalah *memperjuangkan hak dan otonomi perempuan, termasuk hak atas kesehatan reproduksi di kehidupan keluarga dan masyarakat*,<sup>185</sup> dan kerja mereka sangat berfokus pada advokasi, dan menarget pembuat kebijakan dan berbagai tingkatan kepemimpinan. Antara tahun 2004 dan 2006, APM berhasil mengadvokasi pembangunan sebuah klinik kesehatan reproduksi, aksi publik untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, dan jalan akses aspal desa sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. APM menyadari bahwa kekuatan mereka terletak pada peningkatan advokasi tingkat desa. Mereka telah menerima dukungan internasional dari Ford Foundation dan HIVOS.

Permampu mendorong kemitraan dengan APM sejak 2015. Dengan dukungan MAMPU, kemitraan ini menjadi pendorong kegiatan-kegiatan Community Center dengan mengidentifikasi kembali faktor-faktor lokal yang menghambat hak perempuan, termasuk pandangan budaya dan keagamaan konservatif.

<sup>185</sup><http://aliansiperempuanmerangin.blogspot.com.au>

## CIRI-CIRI AKSI KOLEKTIF

Community Center Mentari Sehat memiliki struktur organisasi formal, dengan komite administratif dan protokol organisasi yang jelas. Kelompok ini mengembangkan rencana kerja tahunan, termasuk pengembangan sumber daya manusia, hak perempuan, olahraga, informasi dan komunikasi, dan kegiatan keagamaan.

Dalam sejarahnya, Community Center sempat mengalami prasangka dari masyarakat, dan berusaha mengatasi ini dengan mendorong anggotanya membangun hubungan dengan para pemimpin desa dan pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, Community Center semakin meningkatkan advokasinya, misalnya dengan cara memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (25 November) dengan mengundang para pejabat publik ke desa untuk menyaksikan demonstrasi massa simbolik. Sejak berhubungan dengan MAMPU melalui APM dan Permampu, Community Center telah memfasilitasi forum-forum kelompok kepentingan untuk mendukung advokasi dan membangun pemahaman tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi. Forum-forum tersebut mencakup forum untuk suami, laki-laki muda, perempuan muda, remaja di sekolah, tokoh adat, dan tokoh agama.

Community Center masih dipimpin oleh para pendirinya, yang membawa pengetahuan dan perspektif historis mereka. Regenerasi dan suksesi kepemimpinan di organisasi ini menjadi tantangan. Community Center menekankan pentingnya kemandirian, yang diharapkan dapat mendorong keberlanjutan. Organisasi ini mulai melaksanakan berbagai kegiatan pengumpulan dana seperti melalui iuran anggota, serta mengadvokasi alokasi dana desa maupun penganggaran yang lebih sensitif gender di tingkat kabupaten.

## ANGGOTA KELOMPOK

Anggota Community Center umumnya adalah turunan pendatang Jawa yang tinggal di Kabupaten Merangin. Banyak yang bekerja di pertanian, ada yang menjadi pegawai negeri, guru, maupun karyawan. Keanggotaannya dipengaruhi oleh siklus pertanian dan kebutuhan kerja lainnya:

Dari 70 anggota, kadang hanya ada 40 anggota yang aktif. Selain karena pekerjaan, anggotanya juga lebih sedikit karena harus membantu suami mereka yang bekerja di PT Sawit, menyadap karet di hutan, atau membantu suami mereka bekerja di sawah atau perkebunan kelapa sawit. Beberapa dari mereka tidak bisa menjadi anggota aktif karena mereka sudah menjadi kepala PAUD, dan jadwal pertemuannya berbenturan dengan jadwal mengajar mereka.<sup>186</sup>

Sebagaimana digambarkan pada Tabel 23 di bawah, para anggota cenderung memandang diri mereka sebagai kelompok ekonomi menengah di masyarakat mereka. Para anggota Community Center memiliki latar pendidikan tertinggi dari contoh-contoh yang diteliti.

Tabel 22. Karakteristik demografis anggota Community Center yang disurvei

Usia rata-rata	43 tahun, berkisar antara 30-61 tahun
Status pernikahan	21 menikah, 1 berpisah
Kepala rumah tangga	2
Rata-rata ukuran rumah tangga	4, berkisar antara 2-6 anggota keluarga
Pendidikan	Sekolah Dasar (23%), Sekolah Menengah Pertama (27%), Sekolah Menengah Atas (36%), Universitas (9%)
Anggota atau anggota keluarga dengan	No

<sup>186</sup>Anggota, Community Center Mentari Sehat, wawancara kelompok, Merangin, Oktober 2016

disabilitas	
Status sosio-ekonomi	77% memandang diri mereka berada di tingkat ekonomi menengah, 9% memandang diri mereka di atas rata-rata dan 14% memandang diri mereka di bawah rata-rata. 59% memandang rumah tangga mereka lebih berpengaruh atau bagian dari kelompok pengambilan keputusan, dan 41% merasa memiliki pengaruh rata-rata.
Lapangan kerja dan pendapatan	23% memiliki pendapatan tetap , 27% pendapatan tidak tetap , dan 50% tidak memiliki pendapatan.
Identitas hukum dan perlindungan sosial	2 dari 3 perempuan yang menganggap rumah tangga mereka berada di tingkat ekonomi rendah melaporkan bahwa rumah tangga mereka memiliki KPS, sementara 1 orang melaporkan memiliki SKTM. Secara keseluruhan, 50% rumah tangga anggota memiliki KPS dan 14% memiliki SKTM). 45% memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Partisipasi di program-program bantuan sosial rendah - 27% responden melaporkan menerima Raskin pada tahun sebelumnya. Tidak seorang pun yang mengakses Jamkesmas.

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=22).

Seluruh anggota yang disurvei melaporkan telah berpartisipasi di dalam tiga kegiatan pada tiga bulan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan tersebut terutama adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan (seluruh anggota yang disurvei), kegiatan terkait pemberdayaan perempuan (86 persen), dan kegiatan terkait simpan pinjam (73 persen). Dua kegiatan yang paling disukai adalah pelatihan (82 persen anggota yang disurvei) dan kegiatan pemberdayaan perempuan (18 persen). Motivasi utama untuk berpartisipasi di Community Center adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pribadi (82 persen anggota yang disurvei). Ini masih menjadi motivasi partisipasi saat ini bagi 91 persen anggota yang disurvei, yang diikuti oleh motivasi sosial (32 persen) , dan motivasi terlibat dalam mempromosikan kesetaraan gender (23 persen yang disurvei).

## HASIL AKSI KOLEKTIF

Seluruh anggota yang disurvei merasa bahwa partisipasi mereka di Community Center telah berdampak positif, dan hampir seluruhnya merupakan manfaat pribadi, seperti peningkatan percaya diri dan keyakinan diri (lihat Tabel 24) dan hampir separuhnya merasa partisipasi mereka telah meningkat.

### Pandangan anggota Community Center tentang manfaat partisipasi mereka

'Pada dasarnya menurut saya [Community Center] itu sangat baik karena saya mendapatkan banyak pengalaman. Saya bisa mengikuti pelatihan tentang ekonomi maupun hal lainnya. Semua pelatihan itu sangat membantu saya, dari yang tidak tahu apa-apa menjadi lebih tahu, dan menjadi lebih mandiri.'

'Sejak saya bergabung dengan CC, saya menjadi lebih mandiri, saya menjadi perempuan mandiri. Dulu, saya perempuan yang manja. Sekarang saya lebih paham tentang isu-isu keluarga, isu kesehatan di keluarga, dan bagaimana keluarga dapat hidup harmonis. Saya tahu cara membuat hidup keluarga lebih baik.'

'Saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Dari tidak tahu menjadi tahu.'

'Saya terkesan ketika mengikuti CC karena saya bisa memahami tentang pap smear.'

'Pengetahuan saya tentang kesehatan perempuan, keluarga, dan khususnya anak-anak (meningkat).'

'Di CC, saya punya lebih banyak teman, pengalaman, lebih tahu tentang isu kesehatan, dan cara mengelola keluarga.'

'Setelah belajar di CC, kalau kami memiliki anggaran rumah tangga, kami hanya membeli yang dibutuhkan saja. Artinya, CC telah memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keluarga.'

'Dulu kami tidak tahu apa-apa, tapi

Tabel 23. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota Community Center yang disurvei

Manfaat individu (aset manusia (kekuatan di dalam))	95%
Aset keuangan dan sumber daya (Kekuatan di atas)	0%
Peningkatan partisipasi (aset kapasitas (kekuatan untuk))	45%
Aset sosial (kekuatan dengan)	9%
Aset pendukung	0%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=20)

Permampu telah menyelenggarakan sejumlah pelatihan untuk anggota Community Center di bawah Program MAMPU tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi. Pelatihan-pelatihan ini telah mengembangkan pengetahuan anggota, serta mendorong mereka melihat kesehatan seksual dan reproduksi mereka terkait dengan hubungan gender dan kekuasaan, dan bukan sekadar kondisi fisik perempuan.

Dulu saya buta sekali. Saya tidak dapat informasi apapun tentang kesehatan reproduksi... Ketika saya melahirkan untuk pertama kalinya pada 1995, ada *loudspeaker* keliling (yang mempromosikan) keluarga berencana. Saya kemudian datang ke balai desa - saya tidak tahu tentang jenis-jenis keluarga berencana, dan saya tidak tahu tentang efek samping. Pokoknya saya datang saja. Ternyata, setelah banyak yang bergabung, baru ketahuan bahwa 50 persen mengalami pendarahan. Kami kaget, kami tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Kemudian di kelompok belajar kami, kami belajar tentang dampak keluarga berencana. Dari situ kami memahami bahwa informasi adalah hak kami karena keluarga berencana mempengaruhi tubuh kami, dan kesehatan reproduksi kami.<sup>187</sup>

Beberapa anggota juga melaporkan berhasil membagikan pengetahuan baru ini kepada orang lain: 'Saya dulu tidak tahu bagaimana menjawab ketika anak perempuan saya bertanya, 'Ibu, menstruasi itu apa?' Saya tidak bisa menjawab. Sekarang saya sudah bisa menjawabnya'.<sup>188</sup>

Community Center dan APM juga telah berusaha mengidentifikasi isu-isu kesehatan seksual dan reproduksi 'hulu', yang salah satunya adalah pernikahan anak/dini. Hal ini mencakup advokasi peraturan desa di Desa Pulau Tujuh:

Saya menikah pada usia 21 tahun. Umumnya, kami menikah pada usia tersebut, tapi sekarang banyak terjadi pernikahan anak, dan bahkan lebih parah lagi, mereka hamil usia 13 atau 14 tahun. Salah satu upaya para perempuan di APM adalah mendorong pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencegah pernikahan dini. Dulu kami mengumpulkan para perempuan yang duduk di BPD dan urusan desa, untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang dampak pernikahan anak. Kemudian ketika mereka kembali ke desa masing-masing, mereka mengadakan diskusi di desa-desa mereka, dan mereka berbicara dengan pemerintah desa tentang penerbitan peraturan desa. Peraturan desa tersebut bertujuan untuk mengatasi pernikahan dini.<sup>189</sup>

Forum anak muda juga menjadi salah satu strategi penting untuk membangun pemahaman anak muda tentang kesehatan seksual dan reproduksi:

Sama dengan teman-teman saya, kalau kami ikut OPBUBU (Organisasi Perempuan Bukit Mungkul), kami bisa belajar tentang kesehatan seksual reproduksi. Di Karang Taruna, kami tidak bisa mendapatkan itu. Di organisasi lain, kalau kami mendiskusikan

<sup>187</sup>Fasilitator Lapangan APM, wawancara kelompok, Merangin, Oktober 2016.

<sup>188</sup>Guru lokal dan penasihat siswa (mantan anggota Community Center), wawancara mendalam, Merangin, Oktober 2016.

<sup>189</sup>Fasilitator Lapangan APM, wawancara kelompok, Merangin, Oktober 2016.

tentang isu seksual, masih dianggap tabu dan tidak sopan. Padahal kami di sini hanya menceritakan kebenaran.<sup>190</sup>

Ada beberapa pertentangan dari sebagian di masyarakat: '*Banyak yang senang, tapi banyak juga yang tidak senang*'.<sup>191</sup> Hal ini tampaknya terutama akibat dampak perubahan peran gender di dalam dinamika keluarga:

...menurut suami, jika setara saja tidak masalah, tapi jika lebih tinggi, maka para istri jadi memiliki kecenderungan untuk mengontrol suami.<sup>192</sup>

Para anggota menyadari bahwa 'ada banyak hambatan, yaitu (mereka) yang berpikir bahwa anggota Community Center jadi tidak patuh kepada suaminya',<sup>193</sup> dan bahwa 'jika masih ada kelompok yang tidak setuju, hal itu lebih karena tindakan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender'.

Selain itu terdapat pula reaksi terkait hal-hal yang dianggap sensitif. 'Sebagai penasihat (konselor) saya diancam... Kadang-kadang teman kami sendiri, teman perempuan, mereka tidak senang, dan juga kalangan tokoh agama',<sup>194</sup> tapi ini tidak banyak ditemukan di studi lapangan yang dilakukan.

## KESIMPULAN

Dalam contoh ini, aksi kolektif dapat dipandang dari berbagai tingkatan berbeda - kerja dari, dan kelompok yang dibentuk oleh anggota Community Center, yang datang untuk berdiskusi dan belajar bersama, serta perubahan sikap terkait kesehatan seksual dan reproduksi; dan di tingkat APM, dengan Community Center sebagai anggota. Aliansi ini memberikan kekuatan lebih kepada Community Center, dan juga membuka akses untuk mendapatkan dukungan luar, termasuk dari MAMPU. Sementara Permampu dan MAMPU telah mendukung dinamika Community Center dan APM, operasi mereka didasarkan pada sejarah panjang pengorganisasian perempuan oleh mereka sendiri. Aktor-aktor eksternal selama ini mendukung kelompok dan jaringan ini untuk membongkar isu mereka ke dalam analisis gender, serta memberikan pendidikan kritis untuk perempuan akar rumput, yang sekarang meluas ke banyak kelompok lain di masyarakat. Kolaborasi luas antara laki-laki, anak muda, pemerintah, dan kelompok kepentingan lainnya ini menjadi suatu taktik strategis untuk membantu Community Center mencapai tujuan-tujuannya, serta memitigasi perlawanan masyarakat karena sensitifnya isu-isu yang didiskusikan.

## LAMPIRAN: RANGKUMAN KERJA LAPANGAN - COMMUNITY CENTER

Kerja lapangan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 dan terdiri dari diskusi kelompok dan wawancara mendalam yang dilakukan di tiga desa (Bukit Bungkul, Pulau Tujuh, dan Mampun Baru) (lihat rincian di Tabel 25). Studi lapangan ini dilengkapi dengan wawancara awal dengan Permampu yang dilakukan pada bulan Agustus 2016, serta kajian (*review*) dokumen.

Tabel 24. Peserta studi lapangan: Community Center, APM Merangin

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Diskusi kelompok		
Fasilitator lapangan	5	1

<sup>190</sup>Perwakilan Forum Anak Muda Community Center, wawancara mendalam, Merangin, Oktober 2016.

<sup>191</sup>Anggota, Community Center Mentari Sehat, wawancara kelompok, Merangin, Oktober 2016.

<sup>192</sup>Suami seorang anggota Community Center dan tokoh laki-laki, wawancara kelompok, Merangin, Oktober 2016.

<sup>193</sup>Anggota, Community Center Mentari Sehat, wawancara kelompok, Merangin, Oktober 2016.

<sup>194</sup>Kepala Community Center Mentari Sehat, wawancara mendalam, Merangin, Oktober 2016.

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Anggota Community Center Mentari Sehat	13	
Suami seorang anggota Community Center dan tokoh laki-laki (desa dan pemerintah)		6
Informan utama		
Kepala Community Center Mentari Sehat	1	
Tokoh masyarakat (guru)	1	
Kepala Puskesmas	1	
Kepala desa di mana Community Center berada		1
Mantan kepala desa		1
Dewan Forum Perempuan Muda	1	
Koordinator Forum Laki-Laki Muda		1
Dukun beranak	1	
Direktur APM Merangin	1	
Manajer Program APM Merangin	1	
Survei		
Survei anggota	22	
Fasilitator/staf	21	



## 8. Posko Lestari dan Mentari

Fokus studi kasus:

**Desa Arakan (Lestari) dan Desa Pungkol (Mentari),  
Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan,  
Sulawesi Utara**

Mitra MAMPU terkait

**Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan  
(Komnas Perempuan) dengan mitra lokal Swara Parangpuan**

### FOKUS DAN ASAL AKSI KOLEKTIF PEREMPUAN

Posko Lestari dan Posko Mentari didukung oleh Swara Parangpuan, salah satu anggota Forum Pengada Layanan (FPL) Sulawesi Utara yang merupakan bagian jaringan Komnas Perempuan.<sup>195</sup> *Posko ini membantu dan mengadvokasi atas nama perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan.*

Posko Lestari telah tumbuh dari sebuah kelompok kesadaran masyarakat yang dibentuk pada 1994 yang mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Swara Parangpuan berhubungan dengan kelompok ini pada 1998, dan memberikan mentoring dan informasi tentang berbagai isu, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Desa Arakan kemudian mulai melaporkan kasus-kasus kekerasan kepada Swara Perempuan.

Pada saat bergabung dengan MAMPU pada akhir 2014, Swara Parangpuan mengundang beberapa perempuan dari Desa Arakan, termasuk dari kelompok kesadaran masyarakat, untuk bertemu dan mendengar penjelasan tentang MAMPU dan mendiskusikan kegiatan yang dapat dilakukan bersama. Pertemuan pertama tersebut dihadiri 20 perempuan, yang 18 di antaranya tertarik untuk terlibat di dalam aksi kolektif yang berfokus untuk membantu dan mengadvokasi atas nama perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan. Posko Lestari dibentuk pada Desember 2014 dan telah melakukan kerja rutin untuk mendampingi dan mencari solusi, khususnya untuk kasus-kasus KDRT.

Swara Parangpuan juga mengundang kelompok perempuan yang tertarik di Desa Pungkol, dan memberikan pelatihan penanganan kasus, konseling, dan advokasi. Posko Mentari dibentuk pada akhir 2014 dan seperti Posko Lestari, juga turut mendampingi dalam situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, maupun kasus-kasus perdagangan manusia.

(Posko Lestari) telah bekerja aktif sejak Januari 2015 hingga sekarang... Pada saat pendiriannya, kami menemukan bahwa pemerintah desa tidak memiliki jaringan yang cukup dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, padahal ini adalah isu yang sehari-hari dihadapi Swapar... Boleh dikatakan kami adalah sayap Swapar. Sehingga, ketika terjadi kasus kekerasan, warga akan melapor kepada kami. Ketika memungkinkan bagi kami untuk menangani kasusnya secara langsung, kami akan menanganinya. Tapi kalau kasusnya terlalu sulit untuk kami tangani, kami akan meminta bantuan dari Swapar.

(Mantan anggota Posko Lestari, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016)

<sup>195</sup>FPL yang sebelumnya dikenal sebagai Forum Belajar, diinisiasi oleh Komnas Perempuan sebelum MAMPU untuk memperkuat jaringan penyedia layanan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebelum MAMPU, Komnas Perempuan didukung oleh FPL di 16 provinsi, dan ini meningkat bersamaan dengan bantuan MAMPU (wawancara, manajemen Komnas Perempuan, Jakarta, Agustus 2016).



## CIRI-CIRI AKSI KOLEKTIF

Posko ini memiliki struktur formal yang terdiri dari koordinator, sekretaris dan bendahara. Mereka melakukan pertemuan rutin dan sesuai kebutuhan untuk menangani suatu kasus.

Peran kedua Posko diformalisasi melalui Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut memberikan mandat kepada Posko Mentari yang mencakup nama-nama anggota inti, dan menjelaskan peran mereka dalam menanggapi kasus kekerasan di dalam struktur desa. Demikian

Kami memberikan mereka pengetahuan, lalu mereka sadar bisa melakukan sesuatu di desa mereka. Para perempuan ini lebih sadar kasus sekarang. Dulu, mereka berpikir bahwa KDRT adalah hal yang umum namun takut membantu pihak yang mengalami isu tersebut, karena khawatir akan berujung pada perkelahian. Tapi sekarang mereka sudah mengetahui Undang-Undang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan mereka menyosialisasikan hal ini di desa mereka masing-masing... (misalnya) mereka dulu melakukan pertemuan rutin yang mengundang majelis taklim untuk membicarakan soal topik-topik standar. Tapi sekarang mereka lebih suka mendiskusikan undang-undang, UU Penghapusan KDRT, UU Perlindungan Anak, dan isu UU Desa. Tidak mungkin mereka mendiskusikan hal-hal ini sendiri. Mereka harus berada di dalam kelompok.

(Staf Swara Perempuan, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016)

pula, para anggota Posko Lestari telah diberikan kartu identitas formal untuk menegaskan peran mereka dalam mendampingi kasus-kasus yang dapat bersifat konfrontatif dan sensitif. Posko Mentari mengumpulkan dana sendiri untuk melaksanakan kegiatan mereka, namun mengharapkan bisa mendapat alokasi dana desa 2017.<sup>196</sup>

Kedua Posko memiliki hubungan yang erat dengan aparat desa dan PKK, dan melakukan pendekatan kolaboratif untuk bekerja dengan struktur desa.

Swara Perempuan memiliki peran penting dalam mendukung kelompok ini; kepala Desa Arakan menyatakan bahwa kelompok ini masih bergantung pada dukungan fasilitator Swara Perempuan.<sup>197</sup> *Fasilitator ini memenuhi peran perantara, yang menghubungkan Posko kepada*

*dukungan Swara Perempuan dan juga memfasilitasi hubungan dengan struktur pemerintahan desa.*

## ANGGOTA KELOMPOK

Swara Perempuan memiliki strategi yang khusus melibatkan perempuan elit di Posko. Dalam konteks ini, yang dimaksud perempuan elit adalah yang memegang posisi berpengaruh, seperti kepala majelis taklim, istri kepala desa, dan mereka yang memegang posisi kepemimpinan di PKK. Sebagaimana disajikan Tabel 26, tiga per empat anggota yang disurvei memandang diri mereka berada diposisi pengambilan keputusan dan kelompok berpengaruh di masyarakat mereka, dan sisanya menyatakan memiliki pengaruh rata-rata. Kedua posko memiliki hubungan kuat dan lintas keanggotaan dengan PKK. Koordinator Posko Lestari juga merupakan ketua majelis taklim, sementara anggota lainnya termasuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guru, dan istri kepala dusun.<sup>198</sup> *Koordinator Posko Mentari juga merupakan kepala tim motivator PKK, sementara anggota lainnya termasuk sekretaris PKK, kepala desa, dan perwakilan Hukum Tua. Dua anggota kelompok adalah laki-laki. Para anggota ini membantu Posko memiliki kewenangan lebih besar dan mendorong para pimpinan desa mendukung mereka ketika menangani kasus kekerasan.*

<sup>196</sup> Anggota, Posko Mentari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016

<sup>197</sup> Kepala Dusun, Arakan, wawancara mendalam, Kecamatan Tatapaan, Oktober 2016

<sup>198</sup> Anggota, Posko Lestari, wawancara kelompok, Kecamatan Tatapaan, Oktober 2016

Posko tidak melibatkan perempuan miskin dan termarginalkan sebagai anggota, meskipun dapat dikatakan bahwa kegiatan Posko membawa manfaat kepada perempuan miskin atau termarginalkan jika mereka menghadapi kekerasan.

Tabel 25. Karakteristik demografis anggota *Posko* yang disurvei

Usia rata-rata	40 tahun, berkisar antara 27-63 tahun
Status pernikahan	18 menikah dan tinggal bersama, 1 cerai
Kepala rumah tangga	3 (16%) anggota*
Rata-rata ukuran rumah tangga	4 (berkisar antara 2-9)
Pendidikan	Sekolah Dasar (21%), Sekolah Menengah Pertama (27%), Sekolah Menengah Atas (21%), Paket A/B/C (11%), Universitas (21%)
Anggota atau anggota keluarga dengan disabilitas	1 anggota memiliki anak dengan disabilitas
Status sosio-ekonomi	84% memandang diri mereka berada di tingkat ekonomi menengah, 11% memandang diri mereka di atas rata-rata dan 5% memandang diri mereka di bawah rata-rata. 26% memandang rumah tangga mereka memiliki pengaruh rata-rata, 74% memandang mereka berada di posisi pengambilan keputusan atau di kelompok berpengaruh, dan tidak ada yang merasa berada di dalam kelompok marginal di masyarakat.
Lapangan kerja dan pendapatan	Tugas domestik (47%); kerja rumahan berbayar (11% paruh waktu; 5% penuh waktu); kerja di luar rumah berbayar (37% penuh waktu). 42% memiliki pendapatan tetap, 11% pendapatan tidak tetap, dan 47% tidak memiliki pendapatan
Identitas hukum dan perlindungan sosial	Semuanya kecuali satu orang memiliki KTP 1 anggota yang menganggap rumah tangga mereka lebih miskin dibandingkan yang lain memiliki KPS (kartu perlindungan sosial), namun tidak memiliki SKTM. Secara keseluruhan, 58% memiliki KPS dan 10% memiliki SKTM). 28% memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). 95% responden melaporkan menerima Raskin pada tahun sebelumnya, dan 11% adalah penerima Jamkesmas, sementara 11% menerima Program Keluarga Harapan.

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=19, termasuk 2 laki-laki)

Seluruh anggota yang disurvei telah berpartisipasi di dalam dua kegiatan atau lebih pada tiga bulan terakhir, khususnya kegiatan advokasi (84 persen) dan terkait pemberdayaan perempuan (79 persen). Dua kegiatan yang paling banyak diikuti atau disukai adalah advokasi (42 persen responden) dan kegiatan pelatihan atau pembangunan kapasitas (26 persen). Untuk lebih dari setengah anggota yang disurvei, terlibat di dalam advokasi menjadi motivasi untuk bergabung dengan Posko, dan advokasi saat ini masih menjadi motivasi utama untuk terlibat bagi 18 atau 19 anggota yang disurvei. Dari wawancara kelompok yang dilakukan tampak jelas bahwa para anggota Posko memiliki rasa solidaritas dengan perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan, dan memiliki keinginan untuk membantu mereka. Ini menjadi motivasi yang kuat bagi mereka.

Saya adalah koordinator Posko dan juga Kepala Tim Motivator PKK. Saya juga berada di Posko karena saya belajar tentang advokasi di Posko, sementara itu tidak saya dapatkan di PKK.

(Anggota Posko Lestari,

Insiden kekerasan sekarang lebih jarang terjadi di masyarakat, sehingga kami tidak lagi takut menghadapi kekerasan. Jika yang kami lakukan positif, kami akan terus

melakukannya. Setidaknya kekerasan terhadap perempuan bisa berkurang. Itu yang menjadi motivasi saya.<sup>199</sup>

## HASIL AKSI KOLEKTIF

Sebanyak 16 dari 19 anggota yang disurvei merasa bahwa partisipasi mereka di Posko telah membawa hasil positif; dua di antara mereka merasa telah mengalami dampak positif dan negatif. Satu orang merasa tidak ada dampak sama sekali. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 27, manfaat yang paling banyak dilaporkan adalah manfaat di tingkat individu, dan hal ini juga merupakan manfaat terbesar yang dirasakan setengah anggota yang disurvei. Mayoritas anggota juga melaporkan mendapatkan manfaat dari partisipasi dan aset sosial.

Tabel 26. Perubahan pada aset pemberdayaan yang dilaporkan oleh anggota Posko - Swara Perempuan yang disurvei

Manfaat individu (aset manusia (kekuatan di dalam))	89%
Aset keuangan dan sumber daya (Kekuatan di atas)	6%
Peningkatan partisipasi (aset kapasitas (kekuatan untuk))	78%
Aset sosial (kekuatan dengan)	78%
Aset pendukung	44%

Sumber data: Survei anggota aksi kolektif (n=19)

Pengalaman Posko ini dikatakan terkait dengan meningkatnya percaya diri percaya diri untuk berbicara di depan umum,<sup>200</sup> dan mereka diundang untuk bicara di forum desa.<sup>201</sup> Dicatat pula bahwa para anggota memang sejak awal merupakan kalangan elit desa, namun ada indikasi bahwa partisipasi mereka di kegiatan Posko semakin diakui karena kerja keras mereka, dan hal ini lebih lanjut meningkatkan status mereka.

(Ketika perempuan bergabung dengan Posko), mereka menjadi lebih berkembang... mereka seringkali mengikuti pertemuan PKK, gereja atau ibadah lainnya... mereka jadi terlibat dalam berbagai kegiatan.<sup>202</sup>

Selain itu terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan perubahan peran gender: 'Dulu masyarakat khususnya kaum suami di Bajo percaya bahwa mereka tidak boleh berada di dapur atau mencuci piring. Namun, sekarang kaum suami di Arakan mulai mau mencuci piring di pinggir jalan, karena sumur mereka terletak di dekat jalan. Ini adalah salah satu perubahan yang terjadi',<sup>203</sup> tapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa sembilan dari lima belas wawancara menunjukkan bahwa frekuensi kekerasan di lokasi kedua Posko berada dilaporkan telah berkurang, dan hal ini dikatakan disebabkan oleh ketakutan atas peningkatan pengetahuan perempuan tentang hukum, dan juga ancaman bahwa perempuan sekarang memiliki tempat untuk mengadakan kasusnya:

Misalnya, ketika ada orang tua yang ingin memukul anaknya, kami jadi agak takut melakukannya, karena sekarang orang tahu

Sebagai kepala desa di sini, saya sangat bangga dengan pembentukan Posko ini karena sangat membantu saya dalam memberikan layanan. Sebagai kepala desa, kami selalu waspada dengan kasus-kasus KDRT... Posko ini sangat membantu warga lebih menjaga dirinya, dan dari pengalaman kami, setelah dibentuknya Posko ini, dan juga dari cerita dan sejarah yang saya jelaskan tadi, dan yang diceritakan rekan-rekan saya barusan memang benar-benar terjadi di desa ini.

Kami dulu memang sudah memiliki Perlindungan Perempuan dan Anak (inisiatif kepolisian), tapi tidak ada yang mau memfasilitasi. Dulu, jika terjadi kasus kekerasan, orang-orang hanya menonton saja. Sekarang, orang sudah mulai berpikir dan tidak hanya menonton. Mereka akan mengambil tindakan, karena kita sudah memiliki Posko. Jadi, untuk menegaskan yang baru saja dikatakan rekan saya tentang Posko, Posko itu memang membantu pemerintah desa di sini.

<sup>199</sup> Anggota, Posko Mentari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>200</sup> Perwakilan PKK/istri kepala desa, Arakan, wawancara mendalam, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>201</sup> Anggota, Posko Lestari dan Posko Mentari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>202</sup> Perwakilan PKK #1, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>203</sup> Perwakilan manajemen Swara Perempuan, Program Mampu, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016.

sudah ada Posko di sini, dan Posko tidak akan membiarkan itu, karena sudah ada aturannya... KDRT? Ya, memang sudah berkurang... Di masa lalu, ada yang sampai terluka, tapi sekarang tidak terjadi lagi.<sup>204</sup>

Sejak Posko ada di sini, suami saya jarang memukul saya... dulu sering, sebelum Posko ini dibentuk, dulu sering sekali terjadi... Tapi sekarang jauh lebih jarang; mereka takut sekarang.<sup>205</sup>

Mungkin jumlah suami yang memukul istri menjadi berkurang karena mereka sudah mengetahui informasi tentang KDRT.<sup>206</sup>

Suami saya dulu gampang sekali marah, tapi sekarang dia takut.<sup>207</sup>

Jika ada laki-laki minum-minum di luar semalam suntuk, lalu pulang dan memukul istrinya, (perempuan di sini) sekarang akan langsung ke Posko... Jadi sekarang kaum laki-laki harus hati-hati dengan perempuan di sini.<sup>208</sup>

Para laki-laki juga membenarkan bahwa kini mereka lebih merasa takut untuk melakukan kekerasan di keluarga mereka:

...ketika kami punya masalah di keluarga, kami tidak lagi berani melakukan kekerasan...Sekarang ada batasan bagi laki-laki yang ingin memberikan pelajaran kepada perempuan dan anak-anak.

Setelah organisasi perempuan ini dibentuk, warga Desa Pungkol menjadi lebih dewasa. Kapanpun terjadi konflik di keluarga mereka, para suami takut berbuat seenaknya terhadap istri dan anak-anak mereka karena istri dan anak-anak dilindungi oleh hukum...

Jadi ada perubahan besar yang terjadi. Saya akan perkenalkan diri saya dulu. Sebelum dibentuknya Posko, saya dulu juga kadang melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan... Saya melakukan kekerasan fisik, menggunakan tangan saya untuk memukul atau kaki untuk menendang.

Kedua Posko melaporkan sudah memperluas jangkauan mereka ke desa-desa lain:

Bahkan ada beberapa kasus di desa lain yang ditangani oleh Posko ini. Karenanya, tidak hanya warga Desa Pungkol yang lebih berhati-hati untuk tidak berbuat sewenang-wenang (di keluarga), tapi juga warga desa lain.<sup>209</sup>

Adanya warga dari wilayah geografis lain yang mau melapor ke Posko ini merupakan indikator bahwa ada sebuah hal positif yang sedang berjalan. Jaringan rujukan ini juga telah diperkuat, dengan mekanisme yang lebih jelas untuk penanganan kasus.<sup>210</sup>Misalnya, Posko Mentari sudah membuat perjanjian kerja sama dengan Dinas Sosial untuk kasus pengabaian anak, dinas pendidikan dan sekolah untuk menyosialisasikan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, dan polres (kabupaten) (melalui kepala desa) untuk isu-isu terkait hukum, DPRD, serta pemerintah kabupaten untuk mengajukan permohonan dana.<sup>211</sup>*Beberapa pertemuan tersebut difasilitasi oleh Swara Perempuan.*<sup>212</sup>

<sup>204</sup>Perwakilan PKK dan kepala dusun, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>205</sup>Perwakilan PKK #2, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>206</sup>Perwakilan PKK/istri kepala desa, Arakan, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>207</sup> Anggota, Posko Mentari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>208</sup>Para suami anggota Posko Lestari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>209</sup>Pemimpin laki-laki/suami anggota, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>210</sup> Kepala Dusun, Arakan, wawancara mendalam, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>211</sup> Posko Mentari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>212</sup>Perwakilan manajemen Swara Perempuan, Program Mampu, wawancara kelompok, Minahasa Selatan, Oktober 2016.

Tentunya tidak mengejutkan bahwa kerja-kerja dalam isu-isu yang sensitif tersebut telah menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif. Salah satu yang paling menonjol adalah ketidaknyamanan atau reaksi negatif yang diterima ketika bekerja dalam perlindungan perempuan dan anak dari pelaku kekerasan: *'Mengurus panitia KDRT sangat sulit, sulit sekali, karena kami kadangharus berkonflik dengan keluarga atau suami korban'*.<sup>213</sup> Ini dapat lebih menantang ketika para anggotanya takut dengan terdakwa, atau kasus-kasus yang melibatkan tokoh penting, seperti anggota kepolisian atau keluarga tentara.<sup>214</sup> Anggota juga melaporkan sering dituduh arogan, mendominasi suami, ikut campur urusan orang lain, dan tidak mengerti aturan di masyarakat.<sup>215</sup>

## KESIMPULAN

Dalam waktu relatif singkat, contoh aksi kolektif ini menunjukkan hasil yang menjanjikan. Keberadaannya memang didorong MAMPU sebagai aktor eksternal, namun bertujuan untuk menanggapi masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat, dengan panduan dari mitra lokal yang terpercaya dan berpengalaman (Swara Perempuan), dan dengan dihubungkan dengan agenda nasional (Komnas Perempuan). Organisasi-organisasi ini telah mengembangkan keterampilan advokasi dan penanganan kasus mereka untuk Posko.

Keberadaan Peraturan Desa di kedua lokasi juga merupakan elemen penting. Peraturan tersebut memformalkan dan memberi legitimasi kepada Posko dan para anggotanya. Peraturan Desa tersebut juga menjadi bukti bahwa pemimpin desa mengakui manfaat peran Posko. Jika kemudian kelak ada alokasi nyata dari dana desa kepada Posko, maka hal itu semakin menegaskan adanya pengakuan ini.

Sangat mungkin bahwa para perempuan dari latar belakang yang biasa, yang tidak memiliki koneksi langsung, atau tidak terlibat dalam kepemimpinan desa, dapat bekerja di sektor sensitif ini dengan mendapatkan dukungan kelembagaan yang sama dalam jangka waktu singkat. Studi kasus ini memberikan suatu contoh baik dari perkembangan kepemimpinan berorientasi pengembangan, yaitu kepemimpinan yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada kelompok kurang beruntung.

## LAMPIRAN: RANGKUMAN KERJA LAPANGAN - POSKO

Kerja lapangan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 dan terdiri dari diskusi kelompok dan wawancara mendalam, serta pelaksanaan survei anggota dan fasilitator (lihat rincian di **Tabel 28**).

Studi lapangan ini dilengkapi dengan wawancara awal dengan Komnas Perempuan yang dilakukan pada bulan Agustus 2016, serta kajian (review) dokumen.

Tabel 27. Peserta studi lapangan Aksi Kolektif Perempuan: Posko-Swara Perempuan

Deskripsi	Perempuan	Laki-laki
Diskusi kelompok		
Anggota aksi kolektif, Posko Lestari	7	0
Anggota aksi kolektif, Posko Mentari	8	2
Suami anggota aksi kolektif, Posko Lestari		3

<sup>213</sup>Posko Lestari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>214</sup>Posko Mentari, wawancara kelompok, Pungkol, Oktober 2016.

<sup>215</sup>Anggota Posko Lestari, anggota Posko Mentari, Manajemen Swara Perempuan Program MAMPU, wawancara kelompok, Minahasa Selatan, Oktober 2016.

Suami anggota aksi kolektif, Posko Pungkol		6
Manajemen Swara Perempuan Program MAMPU (koordinator dan staf)	2	1
Informan utama		
Anggota PKK	6	
sekretaris PKK	1	
Anggota non-aktif	1	
Istri kepala desa	1	
Kepala dusun di mana Aksi Kolektif Perempuan berada		1
Survei		
Survei anggota	19	
Fasilitator		4



# MAMPU

Australia - Indonesia Partnership  
for Gender Equality  
and Women's Empowerment

